Sustainability Counts II

Situasi pelaporan keberlanjutan di Asia Pasifik

Memahami persyaratan pelaporan keberlanjutan secara global dan di seluruh Asia Pasifik, serta wawasan tentang perjalanannya hingga saat ini

Diperbarui pada 19 Juli 2023

pwc

NUS National University of Singapore | Centre for Governance and Sustainability
NUS Business School

Daftar Isi

01 Hal-hal penting dalam Laporan 03

02 Perkembangan global dalam pelaporan dan *assurance* keberlanjutan 06

03 Persyaratan pelaporan keberlanjutan dan *assurance* di seluruh Asia Pasifik 25

04 Situasi pelaporan keberlanjutan di Asia Pasifik: Hal-hal penting 28

05 Mengatasi tantangan pelaporan keberlanjutan 59

06 Lampiran 66

07 Kontak 82

Isi di Bagian 2, 3 dan Lampiran laporan ini didasarkan pada informasi yang tersedia hingga Mei 2023, selain informasi tentang persyaratan pelaporan yang diperbarui. Isi studi yang dilakukan di Bagian 4 didasarkan pada laporan keberlanjutan terbaru dan laporan tahunan yang tersedia hingga Januari 2023. Daftar istilah penting, akronim, dan singkatan disertakan dalam lampiran.

01

Hal-hal penting dalam Laporan

Hal-hal penting dalam Laporan

Laporan *Sustainability Counts* perdana PwC yang diluncurkan pada bulan Mei 2022 menyoroti kondisi pelaporan keberlanjutan di kawasan Asia Pasifik. Laporan ini adalah edisi kedua *Sustainability Counts* dan menyampaikan informasi terbaru tentang kondisi kawasan tersebut setahun setelahnya.

Perkembangan global terkini dari standar dan kerangka pelaporan keberlanjutan

- Ada banyak kemajuan dalam lanskap pelaporan keberlanjutan pada tahun 2023, termasuk pengembangan **proposal "tiga besar"** – *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) di Eropa, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), dan proposal iklim oleh United States Securities and Exchange Commission (US SEC).
- Perkembangan penting lainnya termasuk **revisi Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) 2021** yang lebih berfokus pada dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, dan berlaku efektif untuk pelaporan mulai 1 Januari 2023. Rekomendasi akhir untuk **Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)** yang diharapkan selesai pada September 2023.
- Perusahaan yang terpapar pada lebih dari satu standar harus terus mengikuti perkembangan seputar **daya kelola (*interoperability)* antar standar-standar tersebut**.
- Perusahaan harus mengambil tindakan praktis **seperti menilai penerapan standar dan mengembangkan *roadmap* strategis dan rencana operasionalisasi**.
- **Penjaminan (*assurance*) dalam pelaporan keberlanjutan menjadi semakin penting** seiring banyaknya pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan informasi yang andal dan terpercaya seputar keberlanjutan perusahaan.
- International Auditing and Assurance Standards Board saat ini sedang mengembangkan **standar payung terbaru untuk *assurance* pelaporan keberlanjutan** dan berencana merilis *exposure draft* pada 2023 dengan target persetujuan akhir standar pada tahun 2024.

Jalan menuju pelaporan keberlanjutan di Asia Pasifik

- **Peningkatan fokus pada pelaporan keberlanjutan oleh regulator** juga terjadi di seluruh yurisdiksi di Asia Pasifik, di mana persyaratan pelaporan keberlanjutan sudah atau berencana diterapkan di sebagian besar yurisdiksi Asia Pasifik yang diteliti.
- Terdapat juga **peningkatan pemanfaatan Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)** untuk pelaporan iklim, di mana tujuh dari 14 yurisdiksi Asia Pasifik yang dikaji berencana atau telah mewajibkan pelaporan TCFD.
- **Kewajiban persyaratan *assurance* baru mulai diterapkan di Asia Pasifik,** di mana empat yurisdiksi kini mewajibkan persyaratan *assurance* dalam bentuk tertentu.

Kondisi pelaporan keberlanjutan di kawasan Asia Pasifik

- **Standar GRI**, yang digunakan oleh **81%** perusahaan dalam studi, masih menjadi **standar pelaporan keberlanjutan yang dominan** di kawasan ini. Perhatian kini tertuju pada bagaimana tiap-tiap yurisdiksi akan menggunakan/menyiapkan pemenuhan standar ISSB maupun persyaratan CSRD dan US SEC.
- **Terdapat kenaikan sebesar 21%** dalam penggunaan **kerangka kerja TCFD** hingga 57% di kalangan perusahaan. Pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim mencapai 88% pada 2022. Selain itu, 89% perusahaan juga telah melakukan analisis skenario iklim.
- **Dengan 80%** perusahaan dalam studi yang melakukan pengungkapan emisi karbon, dimana **pengukuran emisi Lingkup 1 dan 2 mulai matang**. Selain Jepang, sebagian besar perusahaan di kawasan Asia Pasifik akan **perlu melakukan upaya lebih besar demi mencapai transparansi dan akurasi pengukuran emisi Lingkup 3 yang lebih baik.**
- Perusahaan di sebagian besar yurisdiksi memiliki target lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), namun **menetapkan target emisi nol bersih (*net zero*) menjadi tantangan** karena **hanya 51% perusahaan yang mengungkapkannya**. Ini termasuk penetapan target berbasis sains yang divalidasi oleh the Science Based Targets initiative (SBTi).
- **Kondisi *external assurance* keberlanjutan masih relatif buruk** di kawasan Asia Pasifik, kecuali di Korea Selatan dan Taiwan. Jumlah perusahaan yang berupaya memperoleh *reasonable assurance* dan *internal assurance* juga masih sangat sedikit.

Langkah ke depan - Transparansi yang mendorong kesuksesan yang berkelanjutan

- Upaya untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan **dimulai dengan penetapan tujuan dan strategi keberlanjutan yang benar**.
- Hal ini membutuhkan **penilaian dan pemilihan standar dan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang disyaratkan atau sesuai** untuk menyampaikan kondisi prioritas dan ambisi keberlanjutan. Matriks, proses, sistem, dan kendali ESG adalah unsur-unsur pembangun yang penting bagi transparansi.
- **Kualitas data yang baik** sangat penting untuk menyajikan informasi ESG yang otentik agar bisa bermanfaat bagi pengguna laporan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, **verifikasi data** sangat penting untuk membangun kepercayaan berkenaan dengan data tersebut.
- **Pengintegrasian ESG ke dalam strategi bisnis, proses manajemen risiko, dan pengukuran kinerja** melalui pelaporan yang lebih baik dapat mendorong kesuksesan yang berkelanjutan. Anda akan dapat memitigasi risiko-risiko ESG, mencapai penghematan biaya, dan mengubah risiko-risiko ESG menjadi peluang baru yang menghasilkan penciptaan nilai jangka panjang.

02

Perkembangan global dalam pelaporan dan *assurance* keberlanjutan

Lanskap pelaporan keberlanjutan

Seiring upaya dunia untuk terus menangani berbagai masalah keberlanjutan dan semakin banyaknya permintaan dari investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya agar transparansi tentang isu keberlanjutan semakin ditingkatkan, kami mengamati adanya fokus yang kuat pada pengembangan standar pelaporan keberlanjutan yang konsisten, dapat dibandingkan, dan terpercaya secara global. Selain itu, terdapat juga kemajuan signifikan dalam lanskap pelaporan keberlanjutan 2023, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada area-area berikut:

Proposal “tiga besar”

- Regulator dan pembuat standar di berbagai yurisdiksi menerbitkan proposal definitif untuk mentransformasi pelaporan keberlanjutan pada tahun 2022. Pelaporan keberlanjutan didominasi oleh proposal “tiga besar”:

  (1) ***European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG)** – *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) sebagai bagian dari CSRD **[Diharapkan selesai pada akhir Juni 2023]**

  (2) **ISSB** – Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS **[Diharapkan selesai pada akhir Juni 2023]**

  (3) **US SEC** – Peningkatan dan Standardisasi Pengungkapan Terkait Iklim untuk Investor (proposal iklim) **[Belum difinalisasi]**

- Ketiga proposal tersebut memiliki aspek yang memiliki fokus dan potensi implikasi yang berbeda terhadap perusahaan. Misalnya, proposal ISSB dan US SEC difokuskan pada materialitas keuangan, sedangkan ESRS difokuskan pada materialitas ganda (yaitu, materialitas keuangan dan materialitas dampak).

- Proposal “tiga besar” bergerak cepat, dan dengan kecepatan yang berbeda. CSRD mulai berlaku pada Januari 2023, dan ESRS diperkirakan mulai digunakan pada Juni 2023. ISSB diharapkan menerbitkan standar perdananya pada akhir Q2 2023.

- Proposal EFRAG dan US SEC mengikuti implementasi peraturan, sedangkan standar ISSB mengikuti penggunaan oleh masing-masing yurisdiksi.

Perkembangan lainnya

- Saat ini, Standar GRI adalah standar yang paling banyak digunakan untuk pelaporan keberlanjutan. Standar GRI 2021 yang direvisi berlaku efektif untuk pelaporan mulai 1 Januari 2023, dengan revisi pendekatan materialitas yang lebih fokus pada materialitas dampak.

- Rekomendasi akhir untuk TNFD diperkirakan terbit pada September 2023.

Penting bagi perusahaan untuk menilai penerapan standar ini dan mengikuti perkembangan terkini. Meskipun masih dalam proses finalisasi, standar dan aturan tersebut berkembang pesat dan perusahaan harus mulai mengambil tindakan praktis sekarang untuk membuat perencanaan ke depan. Misalnya, perusahaan dapat melakukan evaluasi lebih awal dan mulai mengembangkan *roadmap* strategis dan rencana operasionalisasi.

Proposal “tiga besar”

(1) EFRAG

Pada April 2021, dengan latar belakang Kesepakatan Hijau Eropa, dan dengan tujuan akhir mencapai netralitas iklim pada 2050 di Uni Eropa (UE) dan Strategi Keuangan Berkelanjutan yang ambisius, Komisi Eropa (EC) menerbitkan CSRD. Tujuan CSRD adalah untuk membawa pelaporan keberlanjutan ke level yang setara dengan pelaporan keuangan.

CSRD digunakan oleh Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa pada November 2022 dan diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa pada Desember 2022.

CSRD mulai berlaku pada 5 Januari 2023. Negara-negara Anggota Uni Eropa diberi waktu 18 bulan untuk mengubah Arahan tersebut menjadi undang-undang dalam negerinya sendiri.

Cakupan perusahaan yang terkena dampak langsung persyaratan baru ini sangat luas, termasuk perusahaan yang berkantor pusat di UE dan non-UE. Informasi keberlanjutan awalnya akan tunduk pada *limited assurance*, beralih ke *reasonable assurance* pada tahap selanjutnya.

CSRD akan membutuhkan pengungkapan yang komprehensif dan terperinci yang mencakup spektrum topik keberlanjutan yang luas (mis. perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan ekosistem, tenaga kerja, masyarakat yang terkena dampak, perilaku bisnis). Persyaratan pengungkapan ini akan diperinci dalam ESRS yang sedang dikembangkan oleh EFRAG.

Draf eksposur ESRS diterbitkan untuk konsultasi publik pada 29 April 2022. Pada November 2022, EFRAG menyerahkan draf ESRS ke Komisi Eropa.

Finalisasi: ESRS diperkirakan mulai digunakan oleh Komisi Eropa pada Juni 2023, sedangkan perusahaan-perusahaan pertama dalam lingkup CSRD akan menerapkannya mulai tahun keuangan 2024.

Pertimbangan ruang lingkup CSRD dan periode penerapan pertama kali

Secara ringkas, penerapan akan diperlukan untuk jenis perusahaan berikut:

2025 (atas dasar pelaporan 2024)

Perusahaan yang sudah diwajibkan untuk mengikuti *Non-Financial Reporting Directive* (NFRD)

- Secara umum, NFRD berlaku untuk Entitas Kepentingan Publik (PIE) besar (entitas terbuka, entitas asuransi, dan bank) dengan lebih dari 500 karyawan
- Besar didefinisikan memiliki total aset lebih dari €20 juta atau omset lebih dari €40 juta
- Namun, Negara Anggota mungkin telah menunjuk entitas lain sebagai PIE sehingga entitas perlu mempertimbangkan persyaratan lokalnya sendiri

2026 (atas dasar pelaporan 2025)

Perusahaan yang baru diwajibkan mengikuti CSRD (baik perusahaan tercatat maupun besar)

- Perusahaan tercatat, perusahaan besar tidak tercatat, dan induk dari grup besar
- Besar didefinisikan memiliki setidaknya dua hal berikut: total aset lebih dari €20 juta, omset lebih dari €40 juta, lebih dari 250 karyawan

2027 (atas dasar pelaporan 2026)

UKM tercatat

- Usaha kecil dan menengah (UKM) tercatat memiliki opsi untuk menunda penerapan selama dua tahun.
- Usaha kecil dan menengah tercatat didefinisikan secara terpisah sebagai "usaha kecil" dan "usaha menengah" tetapi secara kolektif, entitas ini memenuhi dua dari tiga kriteria: total aset lebih dari €350.000 tetapi kurang dari €20 juta, omset lebih dari €700.000 tetapi kurang dari €40 juta, dan memiliki rata-rata lebih dari 10 karyawan tetapi kurang dari 250 karyawan

2029 (atas dasar pelaporan 2028)

Kelompok Non-UE

- Perusahaan dari yurisdiksi non-UE dengan setidaknya satu anak perusahaan atau cabang Eropa yang memenuhi kriteria tertentu dan omset gabungan melebihi €150 juta di UE selama dua tahun buku terakhir

Standar pelaporan apa yang akan diterapkan oleh perusahaan yang sesuai dengan lingkupnya?

Seiring dengan kompleksitas di atas, tidak semua perusahaan yang termasuk dalam lingkup CSRD akan menerapkan standar yang sama. Standar mana yang perlu diterapkan dari tiga jenis standar pelaporan bergantung pada keadaan:

ESRS: 12 standar telah diajukan ke Komisi Eropa dan diperkirakan mulai digunakan pada Juni 2023.

Standar khusus non-UE: Standar-standar khusus yang harus diterapkan pada tingkat konsolidasi global oleh perusahaan tertentu dalam lingkup yurisdiksi di luar UE.

Standar yang disederhanakan: Standar-standar untuk penggunaan oleh UKM tertentu, lembaga kecil dan nonkompleks, dan usaha *captive insurance*, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan UE.

Versi awal kertas kerja untuk standar yang disederhanakan dibahas pada rapat dewan pelaporan keberlanjutan EFRAG bulan Maret 2023. Standar khusus non-UE belum dikembangkan, dan waktunya masih belum pasti. Mengingat luasnya potensi pengungkapan, kami menyarankan perusahaan untuk tidak menunda tetapi memulai penilaian sekarang dengan mengacu pada ESRS yang diusulkan.

CSRD tidak hanya memengaruhi perusahaan tercatat di UE atau perusahaan besar. CSRD juga memberlakukan persyaratan pelaporan dan *assurance* keberlanjutan terhadap banyak perusahaan yang berbasis di luar Eropa.

Perusahaan disarankan untuk menilai lingkup dan penerapan CSRD sejak dini agar dapat memulai perencanaan yang tepat.

Nawala Pelaporan Keberlanjutan UE

Silakan menyimak Nawala PwC yang diterbitkan pada Juni 2023 yang menyajikan informasi terbaru seputar perkembangan pelaporan keberlanjutan di kawasan UE.

(2) ISSB

Menanggapi permintaan mendesak untuk pengungkapan keberlanjutan terkait keuangan yang transparan oleh perusahaan, Para Pengawas Yayasan IFRS mengumumkan pembentukan ISSB pada pertemuan ke-26 Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, yang diadakan di Glasgow (COP26) pada November 2021. Penggabungan Climate Disclosure Standards Board (CDSB) dan Value Reporting Foundation (VRF) ke dalam Yayasan IFRS selesai pada 2022. ISSB bekerja erat dengan organisasi dan yurisdiksi internasional lainnya untuk meningkatkan kesesuaian antara pekerjaan ISSB dan inisiatif yurisdiksi yang sedang berlangsung terkait dengan pengungkapan keberlanjutan.

ISSB bertujuan untuk mengembangkan *baseline* global yang komprehensif dari pengungkapan keberlanjutan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna utama laporan keuangan tujuan umum (GPFR)[1]. Pada 31 Maret 2022, ISSB menerbitkan dua *exposure draft* (ED) untuk konsultasi publik – IFRS S1 Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan (IFRS S1) dan IFRS S2 Pengungkapan Terkait Iklim (IFRS S2). Pada 26 Juni 2023, ISSB menerbitkan standar pelaporan pertamanya, dengan IFRS S1 dan IFRS S2 awal berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperbolehkan tetapi hanya jika entitas menerapkan IFRS S1 dan IFRS S2 sekaligus.

ISSB: Rencana, lingkup, dan waktu

Para Pengawas Yayasan IFRS telah mencapai pandangan berikut tentang arah strategis dewan baru:

- Para Pengawas menetapkan ISSB dalam struktur tata kelola Yayasan IFRS
  - Berfokus pada informasi yang signifikan bagi keputusan pengguna utama
  - Lingkup ESG/keberlanjutan (memprioritaskan iklim)
  - Melanjutkan pengembangan standar dan kerangka kerja yang sudah ada (mis. TCFD, GRI, *Sustainability Accounting Standards Board*/SASB)
  - Membangun pendekatan blok (bekerja sama dengan yurisdiksi utama) untuk mencapai *baseline* yang konsisten secara global
- Para pengawas bermusyawarah untuk mengubah Anggaran Dasar Yayasan untuk ISSB guna menetapkan standar-standar keberlanjutan (komentar tentang *exposure draft* harus disampaikan paling lambat pada 29 Juli 2022)
- Pembentukan ISSB diumumkan pada COP26 bulan November 2021, termasuk penggabungan VRF dan CDSB
- Semua standar didasarkan pada pendekatan 4 pilar TCFD

Arah strategis dan pertimbangan utama ISSB:

- Berfokus pada pemenuhan kebutuhan informasi pengguna utama dan pengungkapan yang memengaruhi keputusan investor
- Mengembangkan pekerjaan yang sudah ada
- Menciptakan *baseline* global yang memungkinkan investor untuk mendapatkan akses ke informasi umum di seluruh dunia yang oleh yurisdiksi dapat digunakan dan digabungkan dengan persyaratan hukum dan regulasinya secara spesifik
- Mengawalinya dengan iklim dan memperluas cakupan hingga menjangkau hal-hal di luar iklim seperti permasalahan lingkungan, sosial, dan tata kelola lainnya

[1] Investor yang ada dan calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya

Struktur Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS Secara Keseluruhan

Fokus pada audiens investor

Benang merah – konten inti diambil dari struktur TCFD

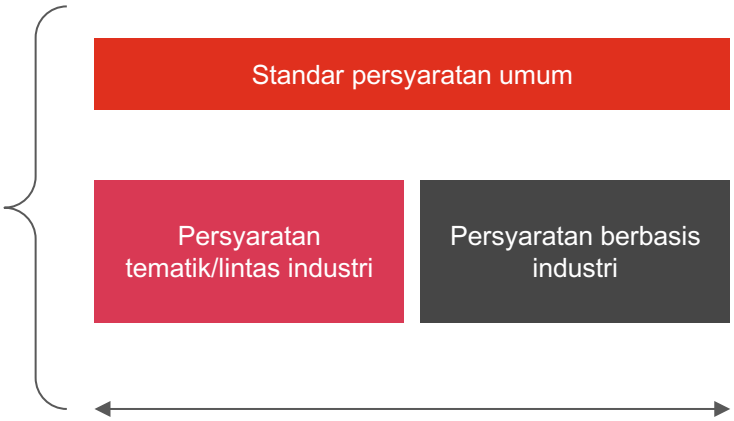

Konten inti yang digunakan di seluruh Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS

Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi material tentang SEMUA risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan yang secara wajar diharapkan dapat memengaruhi prospek entitas.

Risiko dan peluang entitas terkait keberlanjutan muncul dari interaksi antara entitas dan pemangku kepentingannya, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan alam di seluruh rantai nilai entitas. Misalnya, kualitas, ketersediaan, dan keterjangkauan air atau sumber daya manusia.

IFRS Sustainability Disclosure Standards - IFRS S1 and IFRS S2

Pada 26 Juni 2023, ISSB menerbitkan dua Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS, yaitu IFRS S1 Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan dan IFRS S2 Pengungkapan Terkait Iklim. Pindai kode QR berikut untuk informasi lebih lanjut.

IFRS S1 Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan

Ikhtisar poin-poin penting IFRS S1 dapat dilihat di halaman ini. Harap diperhatikan bahwa ringkasan ini bukan informasi lengkap. Lihat Standar IFRS S1 dan detail dokumen ini untuk detail yang lebih komprehensif.

Tujuan

Mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang bermanfaat bagi pengguna utama[1] dari laporan keuangan tujuan umum dalam mengambil keputusan penyediaan sumber daya bagi entitas.

[1] Investor yang ada dan calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya

Mengapa bermanfaat?

Diakui bahwa kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas dalam jangka pendek, menengah, dan panjang terkait erat dengan pemangku kepentingan, masyarakat, ekonomi dan lingkungan alam yang ada di seluruh rantai nilainya. Informasi tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan bermanfaat bagi pengguna utama.

Apa saja yang harus diungkapkan?

Semua risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan yang secara wajar diperkirakan dapat memengaruhi prospek entitas[2]. Perlu mengungkap "Informasi Signifikan" yang diperkirakan akan memengaruhi prospek.

[2] Arus kas, aksesnya ke pembiayaan atau biaya modal selama jangka pendek, menengah atau panjang

Landasan konseptual

Materialitas

Informasi bersifat signifikan jika menghilangkan, salah menyatakan atau menutupi informasi tersebut secara wajar diperkirakan dapat memengaruhi keputusan pengguna utama

Pernyataan wajar

Informasi yang:
1. Dapat dibandingkan
2. Dapat diverifikasi
3. Tepat waktu
4. Dapat dipahami

Entitas pelapor

Harus untuk entitas entitas pelapor yang sama dengan laporan keuangan terkait

Informasi terhubung

Menghubungkan antara:
- Masing-masing risiko atau peluang terkait keberlanjutan
- Pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan (G,S,R,MT)
- Pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan dan GPFR lainnya.

Konten inti

Tata Kelola (*Governance*/G)

- Badan tata kelola:
- Tanggung jawab dalam hal referensi
- Kemampuan dan kompetensi
- Pembaruan dan frekuensi
- Risiko dan peluang terkait keberlanjutan vs strategi
- Penetapan target dan penyertaan metrik-metrik terkait ke dalam remunerasi
- Peran Manajemen

Strategi (S)

- Strategi dan pengambilan keputusan
- Pengaruh saat ini dan yang diantisipasi terhadap model bisnis dan rantai nilai, posisi keuangan, kinerja, arus kas, jangka pendek, menengah, dan panjang
- Mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif
- Kapasitas untuk menyesuaikan dengan ketidakpastian (ketangguhan)
- **Menangani proporsionalitas dan memfasilitasi penerapan pada perkiraan dampak keuangan**:
  - Tanpa biaya atau upaya yang tidak wajar
  - Keterampilan, kemampuan, dan sumber daya
  - Tidak dapat diidentifikasi terpisah
  - Ketidakpastian pengukuran

(Menjelaskan alasan dan pengungkapan kualitatif)

Manajemen Risiko (R)

- Proses manajemen risiko atas risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan integrasi dalam keseluruhan proses manajemen risiko
- Input dan parameter
- Analisis skenario/ Asesmen Ketangguhan
- Sifat, kemungkinan, besaran
- Proses untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau

Metrik dan Target (MT)

- Metrik yang disyaratkan oleh standar pengungkapan IFRS (mis. IFRS S2 untuk iklim)
- **Jika tidak ada Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS:**
  - **harus** mengacu ke dan mempertimbangkan SASB
  - **dapat** mengacu ke dan mempertimbangkan CDSB, badan penyusun standar lainnya, entitas pembanding yang sesuai, serta GRI dan ESRS3

Cara mengidentifikasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan

Sumber panduan

- **Harus** menerapkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS
- Selain itu – **Harus** mengacu ke dan mempertimbangkan SASB
- **Dapat** mengacu ke dan mempertimbangkan:
  - Pedoman Penerapan Kerangka Kerja CDSB untuk Pengungkapan terkait Air dan Pedoman Penerapan Kerangka Kerja CDSB untuk Pengungkapan terkait Keanekaragaman Hayati
  - Persyaratan badan pembuat standar lainnya (dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan tujuan umum)
  - Risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang diidentifikasi oleh entitas serupa (industri, geografi)

Sumber panduan lainnya[4]

- Proses manajemen risiko
- Pengalaman industri dan kelompok setara
- Peringkat eksternal, laporan, statistik

Keringanan terkait proporsionalitas

Semua informasi yang wajar dan terdukung (untuk mengidentifikasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan serta ruang lingkup rantai nilai) tersedia pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya yang tidak wajar

Catatan penting lainnya

- Lokasi pengungkapan
- Waktu pelaporan
- Pernyataan kepatuhan
- Penilaian, ketidakpastian, dan kesalahan
- Informasi yang sensitif secara komersial
- Pembanding – Metrik dan kesalahan
- Tanggal efektif – 1 Januari 2024

Keringanan transisi (tahun pertama)
- Setelah laporan keuangan terbit (tetapi setelah tahun di mana persyaratan berlaku)
- Informasi tentang risiko dan peluang terkait iklim saja[5]
- Tidak perlu pembanding

[3] Acuan ke GRI dan ESRS hanya diizinkan untuk mengidentifikasi informasi yang akan diberikan setelah entitas mengidentifikasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan

[4] Sumber panduan ini dapat digunakan sebagai bagian dari mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung

[5] Lihat detail lebih lanjut di halaman 14

IFRS S2 Pengungkapan Terkait Iklim

Ikhtisar poin-poin penting IFRS S1 dapat dilihat di halaman sebelumnya. Harap diperhatikan bahwa ringkasan ini bukan informasi lengkap. Lihat Standar IFRS S1 dan detail dokumen ini untuk detail yang lebih komprehensif.

IFRS S1 menetapkan ketentuan payung sedangkan IFRS S2 menetapkan persyaratan tambahan yang berkaitan secara lebih spesifik pada **risiko dan peluang terkait iklim**. Pada bagian ini, kami menyoroti persyaratan tambahan yang spesifik untuk IFRS S2.

Landasan konseptual dan konten inti dari S1

Hindari duplikasi yang tidak perlu jika risiko dan peluang terkait keberlanjutan & risiko dan peluang terkait iklim dikelola secara terintegrasi

Strategi

- Informasi tentang rencana transisi terkait iklim
- Menjelaskan apakah risiko terkait iklim yang teridentifikasi adalah risiko fisik atau transisi
- Mengacu pada dan mempertimbangkan topik pengungkapan berbasis industri dalam **Panduan Berbasis Industri tentang Implementasi IFRS S2***
- Rencana untuk mencapai target-target terkait iklim
- Analisis skenario diperlukan untuk ketahanan iklim dengan menggunakan pendekatan yang sepadan dengan keadaan entitas

Metrik dan target

Metrik:

- Emisi GHG Lingkup 1 dan Lingkup 2 bruto absolut (berbasis lokasi) yang dipisahkan antara grup yang dikonsolidasikan dan *investee* lain
- Mengukur emisi GHG sesuai dengan *Greenhouse Gas Protocol* kecuali jika menggunakan metode yang berbeda berdasarkan ketentuan yurisdiksi
- Emisi GHG Lingkup 3 bruto absolut menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya yang tidak wajar
- Menerapkan kerangka pengukuran Lingkup 3 - Pemrioritasan input dan asumsi menggunakan data yang didasarkan pada pengukuran langsung, dari aktivitas spesifik, tepat waktu, dan data yang terverifikasi
- Pengungkapan tambahan untuk emisi yang dibiayai oleh manajemen aset, perbankan komersial, perusahaan asuransi
- Jumlah dan % aset/aktivitas bisnis yang rentan/sejajar dengan risiko/peluang terkait iklim
- Pemanfaatan modal
- Harga karbon internal
- % dari remunerasi eksekutif terkait dengan pertimbangan terkait iklim
- Metrik berbasis industri dalam **Panduan Berbasis Industri tentang Implementasi IFRS S2***

Target:

- Bagaimana kesepakatan internasional terbaru tentang perubahan iklim telah menginformasikan target
- Pendekatan untuk menetapkan dan meninjau target
- Untuk target emisi GHG:
  - GHG mana yang dicakup?
  - Emisi GHG Lingkup 1, 2, atau 3 GHG yang dicakup?
  - Target GHG bruto/bruto dan neto
  - Pendekatan dekarbonisasi sektoral yang digunakan?
  - Rencana penggunaan kredit karbon termasuk tingkat penggunaan, yang diverifikasi/disertifikasi oleh skema pihak ketiga, jenis (berbasis alam/berbasis teknologi, pengurangan/penghapusan)
- Lihat dan pertimbangkan topik-topik pengungkapan berbasis industri dalam **Panduan Berbasis Indutsri tentang Implementasi IFRS S2***

Catatan lainnya

Keringanan transisi (tahun pertama)

- Metode pengukuran selain *Greenhouse Gas Protocol* dapat digunakan untuk tahun pertama
- Tidak perlu mengungkapkan emisi GHG Lingkup 3

Konsekuensinya, keringanan dapat terus digunakan pada saat penyajian komparatif pada periode laporan berikutnya

* *Panduan Berbasis Industri tentang Implementasi IFRS 2* adalah turunan dari persyaratan berbasis industri dalam standar SASB.

IFRS S1 dan S2 yang telah difinalisasi berisi fitur utama atau persyaratan yang secara luas konsisten dengan keputusan tentatif yang dibuat dalam beberapa bulan terakhir, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang berikut:

Sumber panduan dalam mengidentifikasi pengungkapan tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan

- GRI dan ESRS dapat dirujuk dalam mengidentifikasi pengungkapan tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan jika tidak ada Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS yang relevan

Pengungkapan emisi Lingkup 1, 2, dan 3

- Perusahaan pelapor diwajibkan untuk mengungkapkan emisi Lingkup 3
- Pengungkapan emisi Lingkup 2 perlu dilakukan dengan menggunakan metode berbasis lokasi

Analisis skenario perubahan iklim

- Perusahaan diharuskan menggunakan analisis skenario terkait iklim untuk menilai ketahanan iklim menggunakan pendekatan yang sepadan dengan keadaan entitas
- IFRS S2 dikembangkan dari panduan TCFD dan memberikan dukungan penerapan

Memodifikasi istilah khusus untuk memperjelas konsep penting

- ISSB menegaskan bahwa ketentuannya akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan informasi pengguna utama.
- Istilah "*enterprise value*" tidak lagi digunakan sebagai tujuan penilaian. Konsep *enterprise value* telah dihapus demi hubungan erat antara nilai yang diciptakan, dipertahankan, atau dikikis entitas untuk pihak lain dan kemampuan entitas sendiri untuk sukses dan mencapai tujuannya.

Proportionalitas

- Mekanisme untuk mengatasi tantangan proporsionalitas diperkenalkan dengan menggunakan konsep 'informasi yang wajar dan terdukung tanpa biaya atau upaya yang tidak wajar' dan pertimbangan keterampilan, kemampuan, dan sumber daya.

Keringanan transisi

- Keringanan yang tersedia dalam periode pelaporan tahunan pertama di mana entitas menerapkan IFRS S1 dan S2:
  - Keringanan transisi dalam IFRS S1 yang akan memungkinkan entitas untuk melaporkan risiko dan peluang terkait iklim saja pada tahun pertama penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 oleh entitas tersebut. Untuk perusahaan yang menerapkan keringanan transisi satu tahun ini, ketentuan IFRS S1 hanya akan berlaku sejauh terkait dengan pengungkapan informasi terkait iklim.
  - Keringanan waktu pelaporan
  - Keringanan *Greenhouse Gas* (GHG) *Protocol*
  - Keringanan pengungkapan emisi Lingkup 3
  - Pengungkapan informasi komparatif

Menentukan prioritas agenda/proyek ke depan

- Mendukung konektivitas dan operabilitas dengan GRI dan EFRAG
- Mengembangkan taksonomi digital yang dapat dibaca mesin untuk memfasilitasi pelaporan digital
- Menerbitkan permintaan informasi tentang prioritas agenda pada Mei 2023 untuk membantu memandu prioritas agendanya selama 2 tahun ke depan. Keempat proyek baru yang potensial meliputi Keanekaragaman Hayati, Ekosistem dan Jasa Ekosistem, Sumber Daya Manusia, Hak Asasi Manusia, dan Kerangka Kerja Pelaporan Terpadu (IR). Konsultasi terbuka untuk komentar hingga 1 September 2023. Informasi selengkapnya dapat dilihat di PwC In brief.
- Menerbitkan draf paparan tentang metodologi untuk meningkatkan penerapan standar SASB secara internasional dan pembaruan taksonomi standar SASB pada Mei 2023, dengan komentar paling lambat 9 Agustus 2023. Informasi selengkapnya dapat dilihat di PwC In brief.

Baseline global yang konsisten akan membantu meningkatkan kegunaan dan keterbandingan informasi bagi investor dan memfasilitasi timbal balik di antara standar pelaporan keberlanjutan. Mengingat Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS telah diterbitkan, perusahaan harus mempersiapkan diri dengan memahami ketentuan standar tersebut sejak dini.

Perusahaan harus memantau dengan cermat yurisdiksi mana yang mengadopsi standar ISSB dan mengevaluasi implikasinya terhadap operasional usahanya di yurisdiksi tersebut. Berbeda dengan CSRD dan US SEC yang dapat ditegakkan masing-masing berdasarkan peraturan UE dan AS, standar ISSB tunduk pada penggunaan atau penyertaan oleh tiap-tiap yurisdiksi. Singapura, Hong Kong SAR, Jepang, Filipina, dan Afrika adalah contoh yurisdiksi/wilayah yang telah menunjukkan niatnya untuk menggunakan atau menyertakan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS. Perencanaan yang cermat seperti mengembangkan *roadmap*, mengidentifikasi kendala kapasitas sejak dini, dan membuat rencana untuk mengatasi kesenjangan akan memastikan kesiapan perusahaan pada saat diwajibkan mematuhi standar tersebut.

(3) US SEC

- Pada 21 Maret 2022, US SEC mengeluarkan usulan persyaratan pengungkapan baru untuk memenuhi kebutuhan entitas untuk menjelaskan risiko dan dampak perubahan iklim. Sebagaimana diusulkan, aturan baru akan mensyaratkan pengungkapan dalam pernyataan pendaftaran dan laporan berkala. Beberapa pengungkapan yang diusulkan didasarkan pada kerangka pengungkapan yang dikembangkan oleh TCFD.

- Perusahaan juga akan diminta untuk mengungkapkan informasi tentang emisi karbon. Berdasarkan aturan yang diusulkan, perusahaan akan diminta untuk mengungkapkan emisi GHG Lingkup 1 dan 2, dan informasi ini akan tunduk pada syarat *assurance* bertahap. Emisi Lingkup 3 perlu diungkapkan jika signifikan atau jika perusahaan telah menetapkan target emisi Lingkup 3.

- Selain itu, pendaftar akan diminta untuk memasukkan matriks laporan keuangan terkait iklim tertentu dan pengungkapan terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan akan mencakup dampak keuangan dari peristiwa cuaca buruk dan kondisi alam lainnya serta risiko terkait iklim yang teridentifikasi pada laporan keuangan konsolidasian. Pengungkapan tidak akan diperlukan jika dampak agregat kurang dari 1% dari total *line item* untuk tahun buku yang relevan.

- Hampir semua perusahaan publik AS dan emiten swasta asing akan berada dalam lingkup peraturan US SEC, dengan pengungkapan khusus dan persyaratan *assurance* yang mungkin berbeda tergantung pada status pengajuan atau keadaan (misalnya, perusahaan pelapor yang lebih kecil tidak akan diminta untuk memberikan informasi tentang Lingkup 3 emisi GHG).

Berdasarkan proposal iklim US SEC yang dirilis pada Maret 2022, dinyatakan bahwa jika aturan tersebut akan efektif pada Desember 2022, penerapannya adalah sebagai berikut untuk perusahaan dengan tahun buku yang berakhir pada Desember:

Jenis pendaftar	Semua pengungkapan yang diusulkan, termasuk metrik emisi GHG: Lingkup 1, Lingkup 2, dan metrik intensitas terkait			Metrik emisi GHG: Lingkup 3 dan metrik intensitas terkait
	Pengungkapan	***Limited assurance* (GHG Lingkup 1 dan 2)**	***Reasonable assurance* (GHG Lingkup 1 dan 2)**	**Pengungkapan**
Besar terakselerasi	Tahun buku 2023 (dilaporkan pada 2024)	Tahun buku 2024 (dilaporkan pada 2025)	Tahun buku 2026 (dilaporkan pada 2027)	Tahun buku 2024 (dilaporkan pada 2025)
Terakselerasi	Tahun buku 2024 (dilaporkan pada 2025)	Tahun buku 2025 (dilaporkan pada 2026)	Tahun buku 2027 (dilaporkan pada 2028)	Tahun buku 2025 (dilaporkan pada 2026)
Nonakselerasi	Tahun buku 2024 (dilaporkan pada 2025)	Dikecualikan		Tahun buku 2025 (dilaporkan pada 2026)
Perusahaan pelapor yang lebih kecil	Tahun buku 2025 (dilaporkan pada 2026)			Dikecualikan

Finalisasi: Per Mei 2023, persyaratan proposal iklim US SEC belum difinalisasi.

Secara khusus, proposal tersebut mencakup pengungkapan catatan kaki yang akan tunduk pada audit laporan keuangan dan pengendalian internal manajemen atas pelaporan keuangan serta pengungkapan di luar laporan keuangan, termasuk syarat atestasi gas rumah kaca untuk perusahaan pelapor terakselerasi dan besar terakselerasi.

Mempertimbangkan bahwa persyaratan yang diajukan bersifat ekspansif termasuk syarat utama untuk memasukkan pengungkapan terkait iklim dalam laporan keuangan, upaya perusahaan untuk memahami dan mulai mengoperasionalkan persyaratan tersebut akan menjadi penting. Misalnya, perusahaan yang terkena dampak proposal US SEC harus membentuk tim lintas fungsi dan mulai membedah persyaratan yang diusulkan sebelum aturan difinalisasi.

Perbandingan proposal “tiga besar”

Proposal “tiga besar” ini masing-masing akan mensyaratkan pengungkapan keberlanjutan yang ekspansif — meskipun usulan lingkupnya dan detail lainnya bervariasi. Proposal dari EFRAG, ISSB, dan US SEC menggunakan kerangka kerja TCFD pada taraf yang berbeda-beda. Terdapat juga beberapa perbedaan penting di antara ketiga proposal tersebut yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

	EFRAG (diperkirakan selesai pada akhir Juni 2023)	**ISSB** (difinalisasi pada 26 Juni 2023)	**US SEC** (akan difinalisasi)
Keberlakuan	Standar dikembangkan oleh EFRAG dan diatur oleh CSRD	Standar bergantung pada adopsi oleh yurisdiksi	Persyaratan pengungkapan wajib berdasarkan regulasi yang diusulkan oleh US SEC
Lingkup	Berbagai macam perusahaan atau grup UE yang tercatat maupun swasta, dan perusahaan atau grup non-UE dengan operasi signifikan di UE	Bergantung pada adopsi oleh yurisdiksi	Hampir semua entitas yang terdaftar di US SEC, termasuk emiten swasta asing
Topik dalam lingkup	Usulan standar mencakup berbagai macam topik lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk yang didedikasikan untuk pengungkapan iklim	Standar membahas risiko-risiko iklim dan keberlanjutan lainnya; Standar tematik tambahan diharapkan akan ada di masa mendatang	Usulan aturan membahas risiko-risiko terkait iklim; diperkirakan ada aturan yang membahas sumber daya manusia di masa mendatang
Pengungkapan spesifik industri	Standar-standar yang spesifik sektor sedang dalam pengembangan	Perusahaan disyaratkan untuk “merujuk kepada dan mempertimbangkan” (*refer to and consider*) pengaplikasian topik-topik pengungkapan di dalam Standar SASB	Pengungkapan spesifik industri tidak diharuskan
Materialitas	Berfokus pada banyak pemangku kepentingan (berdasarkan materialitas ganda)	Materialitas akan ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang dapat secara wajar diharapkan dapat mempengaruhi keputusan dari pengguna laporan yang memanfaatkan informasi tersebut	Berfokus pada investor - ambang batas satu persen yang jelas akan diterapkan untuk pengungkapan kuantitatif catatan kaki laporan keuangan
Pelaporan emisi GHG	Harus mencakup emisi Lingkup 1, 2, dan 3	Harus mencakup emisi Lingkup 1, 2, dan 3	Harus mencakup emisi Lingkup 1 dan 2. Emisi Lingkup 3 diharuskan jika signifikan atau termasuk dalam sasaran/tujuan pengurangan emisi entitas pendaftar (kecuali perusahaan pelapor yang lebih kecil)
Letak informasi	Pengungkapan akan dimasukkan ke dalam suatu bagian khusus dalam laporan manajemen	Pengungkapan akan dimasukkan sebagai bagian dari pelaporan keuangan bertujuan umum – seperti di dalam komentar dari manajemen, namun dengan lokasi yang fleksibel	Pengungkapan akan dimasukkan dalam suatu bagian terpisah dari laporan tahunan atau pernyataan pendaftaran - catatan atas laporan keuangan akan mencantumkan pengungkapan dampak cuaca buruk dan aktivitas terkait transisi
Assurance	Informasi keberlanjutan awalnya akan tunduk pada *limited assurance*, lalu bertransisi ke *reasonable assurance* pada tanggal yang belum ditentukan	Informasi keberlanjutan akan tunduk pada *assurance* berdasarkan aturan yurisdiksi yang menggunakan standar-standar tersebut	Emisi GHG Lingkup 1 dan 2 (tunduk pada *limited assurance*, diikuti dengan *reasonable assurance*); Pengungkapan catatan (tunduk pada *assurance* melalui audit laporan keuangan dan pengendalian internal atas persyaratan atestasi pelaporan)
Pengaturan waktu pengajuan	Pengaturan waktu akan dilakukan bertahap berdasarkan jenis entitas mulai tahun 2024 (pengajuan pada 2025)	Pengaturan waktu akan bergantung pada bagaimana standar-standar tersebut diimplementasikan di setiap yurisdiksi	Pengaturan waktu akan dilakukan bertahap berdasarkan jenis entitas yang mengajukan

Proposal “tiga besar” ini masing-masing akan mensyaratkan pengungkapan keberlanjutan yang ekspansif — meskipun usulan lingkupnya dan detail lainnya bervariasi. Mengingat jangkauan geografis proposal dan potensinya untuk mencakup spektrum yang luas dari para aktor di rantai nilai, sebagian besar perusahaan diperkirakan akan terkena dampaknya.

Dengan menilai penerapan dan memahami persyaratan proposal yang berbeda sejak dini, penyusun dapat bersiap untuk memenuhi berbagai persyaratan pelaporan dengan mengembangkan strategi pelaporan dan rencana tindakan yang tepat. Memahami dan mengevaluasi persyaratan pelaporan keberlanjutan tidak boleh terbatas pada proposal “tiga besar” tetapi harus mencakup persyaratan di semua yurisdiksi tempat perusahaan beroperasi.

Area-area penting yang berkembang

Masalah materialitas

Tiap-tiap proposal dan standar tersebut memiliki fokus materialitas yang berbeda-beda. Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS dan proposal iklim US SEC difokuskan pada keuangan, sedangkan GRI difokuskan pada dampak, dan ESRS difokuskan pada materialitas ganda (materialitas dampak dan materialitas keuangan). Definisi dan konsep ini dirangkum dalam diagram di bawah ini:

Materialitas dampak (aktual atau potensial)

Masalah keberlanjutan bersifat penting apabila:

- berkaitan dengan **dampak signifikan yang positif atau negatif** aktual atau potensial entitas **terhadap manusia atau lingkungan** (masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola),
- berlangsung selama jangka **pendek**, **menengah** atau **panjang**.

Termasuk dampak yang disebabkan atau dikontribusikan oleh entitas dan dampak yang secara langsung terkait dengan operasi, produk, dan layanan entitas melalui hubungan bisnisnya.

Contoh: emisi GHG

Masalah keberlanjutan bersifat “penting”
Apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk materialitas dampak
ATAU materialitas keuangan
ATAU keduanya

Materialitas keuangan (prospektif saja)

Masalah keberlanjutan bersifat penting jika memicu atau dapat memicu **dampak keuangan yang signifikan terhadap entitas**. Ini adalah kasus di mana:

- masalah tersebut menimbulkan atau dapat menimbulkan risiko atau peluang yang memiliki pengaruh yang signifikan (atau berkemungkinan memiliki pengaruh yang signifikan) terhadap arus kas, pengembangan, kinerja, posisi, biaya modal atau akses ke pembiayaan,
- dalam **jangka pendek, menengah, dan panjang.**

Contoh: Penilaian pengaruh emisi GHG terhadap arus kas entitas di masa mendatang, seperti dampak mekanisme harga karbon

Mengingat perbedaan materialitas, perusahaan harus mengevaluasi dampak transisi dari materialitas dampak ke materialitas finansial, sebaliknya atau keduanya, bergantung pada standar yang berlaku bagi perusahaan.

Meskipun ada perbedaan dalam definisi dan konsep materialitas, ada juga tumpang tindih di antara proposal dan standar ini, terutama mengingat bahwa proposal dan standar tersebut menilai materialitas terkait dengan dampak isu keberlanjutan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Beberapa masalah ini saling terkait – misalnya, masalah yang berdampak negatif terhadap komunitas lokal atau planet ini dapat merusak reputasi perusahaan, yang mengakibatkan dampak keuangan yang merugikan.

Interoperability adalah kunci

ISSB bekerja erat dengan organisasi dan yurisdiksi internasional lainnya untuk mendukung penggabungan *baseline* global ke dalam persyaratan yurisdiksi dan memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditujukan untuk kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas.

Beberapa inisiatif ISSB untuk mencapai *interoperability* termasuk:

- Yayasan IFRS dan GRI menandatangani Nota Kesepahaman pada Maret 2022.
- Pada April 2022, ISSB mengumumkan pembentukan kelompok kerja perwakilan yurisdiksi yang meliputi Komisi Eropa, EFRAG, US SEC, UK *Financial Conduct Authority*, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Rakyat Tiongkok, dan *Financial Services Agency* (FSA) Jepang.
- Pada November 2022, ISSB mengumumkan pada pertemuan ke-27 Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, yang diselenggarakan di Mesir (COP27) bahwa pihaknya bekerja bersama dengan Komisi Eropa dan EFRAG untuk mencapai tujuan bersama yaitu memaksimalkan *interoperability* standar-standarnya dan menyelaraskan pengungkapan iklim penting.
- ISSB juga telah menegaskan syarat bahwa perusahaan harus mempertimbangkan standar-standar SASB. Perusahaan dapat mempertimbangkan materi CDSB sebagai acuan yang bermanfaat.

Seiring IFRS S1, IFRS S2, dan ESRS semakin mendekati finalisasi, ISSB dan EFRAG mempertajam fokusnya pada terminologi terperinci dalam standar-standar tersebut, untuk diselesaikan bersamaan dengan finalisasi kedua rangkaian standar tersebut.

Pada Mei 2023, hal-hal inilah yang merupakan komitmen atau intensi untuk mencapai interoperabilitas untuk berbagai standar berbeda.

Memastikan *interoperability* standar pelaporan keberlanjutan adalah kunci untuk mencapai konsistensi dan keterbandingan di antara standar. Perusahaan yang memiliki eksposur terhadap lebih dari satu standar (termasuk GRI) harus terus mengikuti perkembangan seputar *interoperability* di antara standar-standar ini. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menyusun *roadmap* yang tepat untuk strategi dan operasionalisasi pelaporan keberlanjutan.

ISSB dengan GRI dan ESRS

Dalam rapat ISSB tanggal 16 Februari 2023, Dewan mengusulkan untuk merujuk GRI dan ESRS dalam sumber pedomannya dalam salah satu lampiran IFRS S1 untuk mengidentifikasi metrik dan pengungkapan jika memenuhi kebutuhan informasi investor, apabila tidak ada Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS yang spesifik.

GRI dengan ESRS

GRI berkomitmen untuk bekerja bersama dengan EFRAG untuk memberikan pedoman teknis tentang bagaimana pelapor saat ini dapat menggunakan praktik dan proses pelaporannya yang berbasis GRI untuk mematuhi ESRS.

ISSB dengan TNFD

Pada Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa, pertemuan ke-15 dari Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP15), ISSB mengisyaratkan niatnya untuk menggunakan pendekatan manajemen risiko dan pengungkapan TNFD yang berkaitan dengan alam.

Assurance atas pelaporan keberlanjutan

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) saat ini sedang bekerja untuk mengembangkan standar payung baru untuk *assurance* atas pelaporan keberlanjutan – Usulan *International Standard on Sustainability Assurance* ISSA 5000, Persyaratan Umum untuk Perikatan *Assurance* Keberlanjutan.

Usulan standar tersebut akan didasarkan pada prinsip sehingga sesuai untuk semua topik keberlanjutan, informasi yang diungkapkan tentang topik-topik tersebut, dan kerangka kerja pelaporan. Standar tersebut akan membahas *limited assurance* maupun *reasonable assurance*. Standar tersebut akan melanjutkan standar dan panduan IAASB yang sudah ada. *Exposure draft* diperkirakan rilis pada 2023, sementara persetujuan final atas standar tersebut diperkirakan keluar pada 2024.

Berdasarkan *The State of Play: Sustainability Disclosure & Assurance*[1], sebuah laporan dari International Federation of Accountants (IFAC) yang dirilis pada Februari 2023, 95% perusahaan yang ditinjau melaporkan informasi keberlanjutan pada taraf tertentu. Terdapat tren peningkatan pada persentase perusahaan yang memperoleh *assurance* atas pelaporan ESG-nya dari 51% pada 2019 menjadi 64% pada 2021. Dalam hal tingkat *assurance*, 80% laporan tersebut disusun berdasarkan *limited assurance* pada 2021.

Ringkasan temuan penting dari laporan IFAC:

Temuan penting: 2019 | 2020 | 2021

91% 92% 95%	63% 61% 57%	88% 94% 95%
melaporkan informasi ESG pada taraf tertentu	penugasan *assurance* yang dilakukan oleh perusahaan	dari perusahaan menerapkan ISAE 3000 (Revisi)*
51% 58% 64%	83% 82% 80%	34% 39% 38%
memperoleh *assurance* pada taraf tertentu	dari *assurance* bersifat terbatas	dari pemberi jasa lainnya menerapkan ISAE 3000 (Revisi)

Sumber: Disarikan dari laporan IFAC tentang *The State of Play: Sustainability Disclosure & Assurance* yang dipublikasikan pada Februari 2023

* Termasuk standar penjaminan nasional seperti standar pengesahan AICPA yang setidaknya sekuat ISAE 3000 (Revisi), persentase Perusahaan yang menerapkan ISAE 3000 (Revisi), atau standar nasional terkait, adalah 96% pada 2019, 96% pada 2020, dan 99% pada 2021.

Temuan laporan IFAC di atas didasarkan pada hasil rata-rata dari 1.350 perusahaan di 21 yurisdiksi secara global. Dari studi yang dilakukan untuk yurisdiksi Asia Pasifik di Bagian 4 yang didasarkan pada laporan terbaru yang tersedia hingga Januari 2023, kami mengamati bahwa 49% perusahaan dalam studi telah melakukan *external assurance*, yang masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global.

[1]https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/state-play-sustainability-assurance

Pentingnya informasi ESG bagi investor dan pemangku kepentingan membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Untuk membangun tingkat kredibilitas yang tinggi, *external assurance* harus dilakukan atas laporan keberlanjutan. Menurut Survei Investor Global 20222 PwC, sebagian besar (87%) investor yang disurvei merasa bahwa laporan perusahaan tentang kinerja keberlanjutan mengandung *greenwashing*. Tiga perempat responden mengatakan tingkat kepercayaan mereka terhadap pelaporan keberlanjutan akan mendapatkan dorongan terbesar jika mendapatkan tingkat *assurance* yang sama dengan laporan keuangan perusahaan (yaitu *reasonable assurance*).

Agar efektif, pelaporan haruslah relevan dan andal. Meningkatkan keandalan informasi keberlanjutan yang dilaporkan sangatlah penting dan perusahaan harus melacak dan melaporkan kinerja keberlanjutan dengan ketelitian dan kualitas data yang sama dengan kinerja keuangan. Dengan adanya *external assurance*, keyakinan dan kepercayaan terhadap laporan keberlanjutan dapat ditingkatkan.

[2]https://www.pwc.com/gx/en/issues/esg/global-investor-survey-2022.html

Pandangan dari para pemimpin: Bukan sekadar laporan keberlanjutan

Pelaporan keberlanjutan lebih dari sekadar melaporkan kinerja ESG operasional. Ia juga merupakan alat penilaian strategis dan platform komunikasi dengan investor dan berbagai pemangku kepentingan. Karena ada banyak standar pelaporan, peringkat, dan tolok ukur, perusahaan harus menerapkan standar dan tolok ukur yang membantu menambah nilai pada kerangka pelaporannya. Proses pembuatan laporan keberlanjutan dan pelaksanaan external assurance dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan, membangun kapabilitas, menyelaraskan tujuan dan target untuk mitigasi dan adaptasi risiko di kalangan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Keselarasan adalah kunci. Penting untuk melibatkan ekosistem pemangku kepentingan yang lebih luas untuk mengidentifikasi permasalahan ESG kritis melalui studi materialitas yang kuat dan teratur untuk memastikan keselarasannya dengan area fokus strategis ESG perusahaan. City Developments Limited (CDL) mulai melakukan studi materialitas tahunan sejak 2014 dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Hal ini memungkinkan kami untuk memusatkan sumber daya kami pada permasalahan ESG utama dan memetakan strategi dan tindakan untuk mengubah risiko menjadi peluang. Hal ini tidak hanya membantu kami meningkatkan kinerja ESG tetapi juga meningkatkan kesiapan kami di masa depan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dan memenuhi ekspektasi semakin tinggi dari regulator, investor, pemodal, dan pemangku kepentingan utama.

Pelaporan keberlanjutan dapat diumpamakan seperti pemeriksaan 'kesehatan' tahunan terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan agar perusahaan dapat melakukan peningkatan yang berkesinambungan guna memberikan hasil yang akan menguntungkan bisnis dan pemangku kepentingannya. Pengungkapan ESG dan pelaporan keberlanjutan yang kuat dapat membantu perusahaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan para investornya dan menyalurkan modal untuk pengambilan tindakan dalam rangka membangun ketahanan dan pertumbuhan.

Untuk pengungkapan ESG dan pelaporan keberlanjutan, data sangat penting karena investor dan pemangku kepentingan lebih yakin dengan hasil terukur yang konsisten, dapat dibandingkan, dan diaudit. Selain data, laporan yang baik harus memberikan artikulasi yang jelas tentang integrasi strategis ESG ke dalam budaya perusahaan, kebijakan, tata kelola, operasi, dan yang paling penting, strategi pertumbuhannya..

Untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas data, external assurance atas laporan keberlanjutan sangatlah penting. Perusahaan yang baru memulai perjalanan pelaporannya dapat memanfaatkan audit internal untuk mendapatkan dukungan serupa.

Kita hidup di masa di mana semua negara, ekonomi, dan bisnis harus berupaya lebih baik dalam perlombaan global menuju emisi nol bersih demi mengatasi keadaan darurat iklim. Patokan bersama demi planet yang berkelanjutan adalah *Net Zero* (emisi nol bersih), dan hal ini melampaui batas negara dan sektor. Meningkatkan praktik ESG terbaik dan pelaporan keberlanjutan akan membantu perusahaan tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai target yang ditetapkan; karena hal-hal yang terukur dapat dikelola.

Ke depan, tren-tren utama ESG yang akan menjadi lebih penting termasuk:

- Merangkul solusi-solusi berbasis alam untuk mengatasi kondisi keanekaragaman hayati dunia yang memburuk dengan cepat
- Keragaman, kesetaraan, dan inklusi untuk menanggapi perhatian yang semakin besar seputar kesetaraan, tidak hanya terkait gender tetapi juga ras dan usia
- Manajemen rantai pasokan untuk memastikan transisi yang wajar dan adil bagi para pemasok dan vendor UKM untuk mengejar ketertinggalan dalam persaingan usaha

Perusahaan harus melihat keberlanjutan sebagai sebuah perjalanan yang membantu menggali peluang bisnis dan meningkatkan peluang pertumbuhan untuk mempertajam keunggulan bisnis. Ketersediaan teknologi dan solusi kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Perusahaan perlu menunjukkan rekam jejak ESG yang kuat agar dapat memanfaatkan pembiayaan dan investasi berkelanjutan yang semakin meningkat dan melakukan lompatan kuantum yang diperlukan untuk ketahanan dan pertumbuhan jangka panjang.

Esther An
Chief Sustainability Officer
City Developments Limited

Perkembangan standar dan kerangka kerja keberlanjutan lainnya

Revisi Standar GRI (berlaku untuk laporan yang dipublikasikan pada atau setelah 1 Januari 2023)

GRI didirikan pada tahun 1997. Tujuannya adalah untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas pertama untuk memastikan agar perusahaan mematuhi prinsip-prinsip perilaku lingkungan yang bertanggung jawab. Ini kemudian diperluas sehingga mencakup permasalahan sosial, ekonomi, dan tata kelola. Pada tahun 2000, versi pertama GRI diluncurkan untuk menyediakan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan global pertama. Pada tahun 2016, GRI beralih dari menyediakan panduan menjadi menetapkan standar global perdana untuk pelaporan keberlanjutan dengan banyak pemangku kepentingan sebagai audiensnya, yaitu Standar GRI.

Untuk memenuhi permintaan akan transparansi yang terus meningkat dari pemangku kepentingan, GRI merevisi Standar Universalnya pada tahun 2021. Standar Universal yang direvisi merupakan pembaruan paling signifikan sejak GRI beralih dari menyediakan panduan menjadi menetapkan standar pada tahun 2016. Standar GRI yang baru akan berlaku efektif untuk laporan yang dipublikasikan pada atau setelah 1 Januari 2023. Perubahan utama termasuk revisi untuk mengatasi integrasi hak asasi manusia, pendekatan materialitas yang direvisi dengan panduan baru untuk menentukan topik-topik penting dan penghapusan opsi inti dan komprehensif untuk pelaporan sesuai dengan Standar GRI.

Standar GRI yang diperbarui terdiri dari tiga seri Standar:

- Standar Universal - berlaku untuk semua organisasi
- Standar Sektoral - berlaku untuk sektor-sektor khusus; dan
- Standar Topik - memuat pengungkapan bagi organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampaknya terkait dengan topik-topik tertentu.

Standar GRI 2016 mendefinisikan topik penting sebagai topik yang mencerminkan setidaknya satu dari dimensi berikut – (i) dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan atau (ii) pengaruh substantifnya terhadap penilaian dan keputusan pemangku kepentingan. Namun, pendekatan ini dapat menghasilkan penilaian materialitas yang sangat rentan terhadap bias berdasarkan pemilihan pemangku kepentingan. **Standar yang direvisi tahun 2021 mengatasi masalah ini dan berfokus pada dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia**. Dalam standar yang direvisi, “topik penting” didefinisikan sebagai topik yang mencerminkan dampak organisasi yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia. Selain itu, jika Standar Sektoral tersedia dan berlaku untuk organisasi, organisasi harus meninjau setiap topik yang dijelaskan dalam Standar Sektoral yang berlaku dan menentukan apakah topik itu merupakan topik penting.

Lebih dari 10.000 perusahaan di seluruh dunia menggunakan GRI untuk pelaporan keberlanjutannya, di mana 73% dari 250 perusahaan terbesar di dunia menyusun laporan keberlanjutannya menggunakan GRI[3]. Perusahaan yang menggunakan GRI untuk pelaporan keberlanjutannya harus menilai dampak dari perubahan yang timbul dari revisi standar GRI 2021, terutama dengan fokus pada materialitas dampak.

Mengingat bahwa standar GRI digunakan secara luas, jika suatu perusahaan diharuskan untuk melaporkan berdasarkan standar lain di masa mendatang (misalnya ESRS, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS dan proposal iklim US SEC), perusahaan perlu berfokus **pada *interoperability* dan menyusun *roadmap* pelaporan keberlanjutan dan rencana operasionalisasi.**

[3]https://www.globalreporting.org/media/wmxlklns/about-gri-brochure-2022.pdf

TNFD

TNFD mengembangkan pekerjaan TCFD lebih lanjut dan diharapkan akan disajikan sebagai kerangka pelaporan pada September 2023. Para Menteri Lingkungan Hidup negara-negara anggota G20 dan G7 mendukung peluncuran TNFD.

Tujuan TFND adalah untuk menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk melaporkan dan bertindak atas risiko yang berkembang terkait alam, untuk mendukung pergeseran arus keuangan global dari hasil yang negatif-alam menuju ke arah hasil yang positif-alam.

Meskipun kerangka kerja TNFD akan menggunakan kerangka kerja empat pilar yang sama dengan TCFD, TNFD akan memasukkan definisi yang lebih luas tentang “risiko dan peluang terkait alam” ke dalam setiap pilar.

Pekerjaan TNFD akan dibangun di atas tujuh prinsip: kegunaan pasar, berbasis sains, risiko terkait alam, penggerakan ke arah tujuan, terintegrasi & adaptif, hubungan iklim-alam, dan inklusif secara global.

Finalisasi: Rekomendasi final diperkirakan akan dipublikasikan pada September 2023.

Pada COP15 yang diadakan pada bulan Desember 2022, ISSB mengumumkan akan memasukkan alam dan keanekaragaman hayati ke dalam pengembangan standar masa depan yang terkait dengan kebutuhan informasi investor, dengan fokus awal untuk membangun tautan dengan draf standar iklim ISSB (termasuk pertimbangan pekerjaan TNFD, *knowledge partner* ISSB saat ini).

TNFD bertujuan untuk membangun kerangka manajemen risiko dan pengungkapan yang dapat digunakan oleh organisasi dari semua ukuran di semua yurisdiksi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengungkapkan ketergantungan, dampak, risiko, dan peluang terkait alam. Diperkirakan akan ada lebih banyak perusahaan dan investor keuangan yang akan menempatkan alam dan keanekaragaman hayati sebagai bagian terpadu dari investasi, penilaian risiko, dan perencanaan strategisnya, mengingat bahwa risiko jika tidak melakukan hal itu mungkin lebih besar daripada biayanya.

Peran PwC dalam mewujudkan dunia yang positif-alam

Istilah “positif-alam” menjadi seruan untuk mengambil tindakan bagi masyarakat maupun dunia usaha. Kami berkomitmen untuk menjalankan peran kami dalam mewujudkan dunia yang positif-alam. Pindai kode QR untuk informasi lebih lanjut.

Ringkasan *roadmap* perkembangan pelaporan dan *assurance*

Tahun ini diharapkan menjadi tahun yang menarik dalam standar-standar terkait keberlanjutan. Dalam *roadmap* di bawah ini, kami telah merangkum beberapa perkembangan penting saat ini dan yang akan datang dalam hal standar dan kerangka pelaporan keberlanjutan internasional, termasuk perkembangan yurisdiksional. Sejumlah standar utama, kerangka kerja, dan rekomendasi diharapkan dapat diselesaikan dan diterbitkan pada tahun 2023. Beberapa di antaranya memiliki persyaratan *assurance* wajib. Perusahaan perlu bersiap dan memahami bagaimana dampaknya terhadap perusahaan.

Perkembangan yang menonjol termasuk tetapi tidak terbatas pada yang berikut ini:

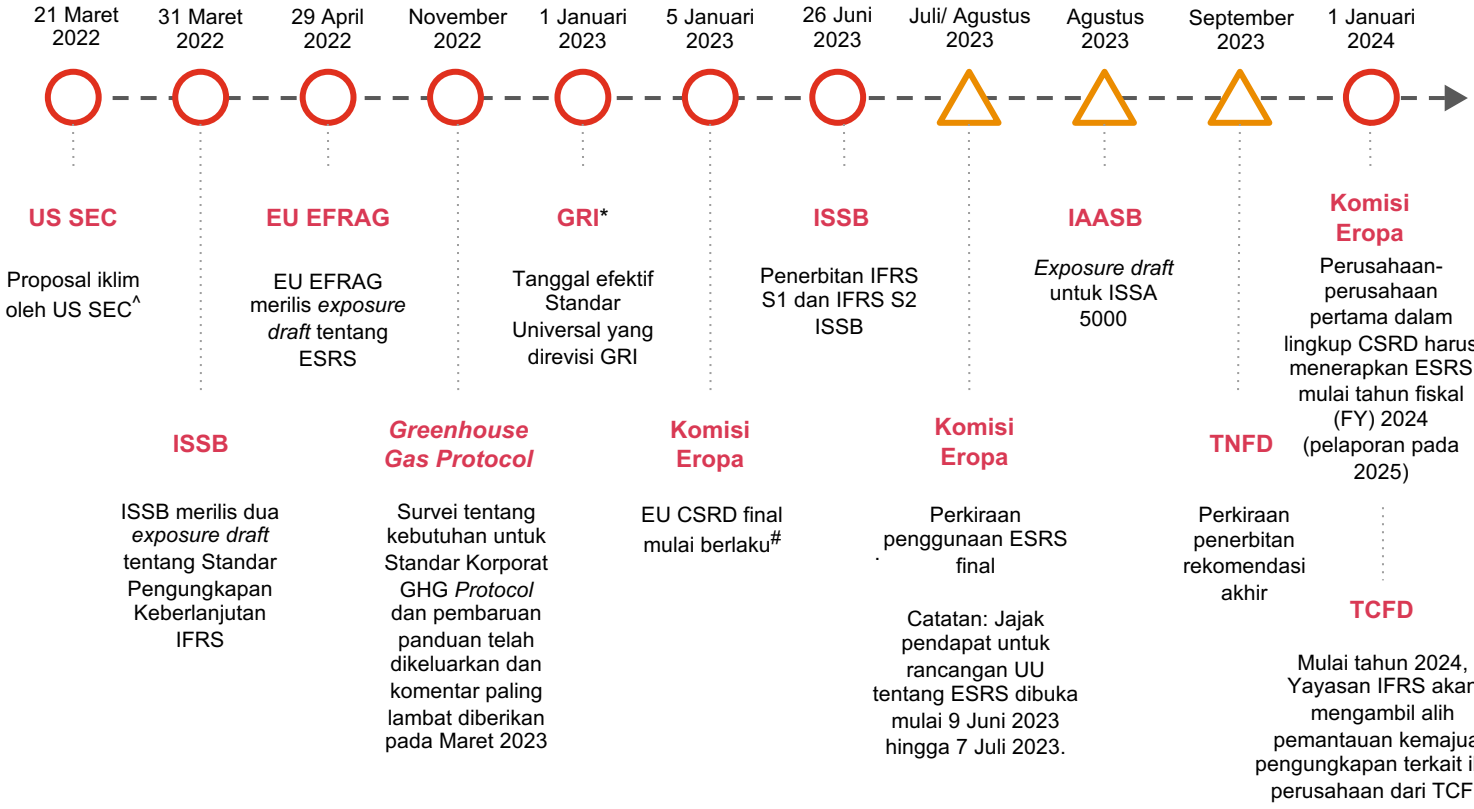

Proposal “tiga besar”:

- Proposal Iklim US SEC
- Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS
- ESRS

Keterangan:

Telah diterbitkan atau diimplementasikan

Perkiraan waktu penerbitan atau implementasi

Catatan:

^ Berdasarkan proposal iklim oleh US SEC, emisi GHG Lingkup 1 dan Lingkup 2 wajib memiliki *limited assurance* pada tahun kedua dan ketiga bagi pelapor besar terakselerasi dan pelapor terakselerasi, bertransisi ke *reasonable assurance* mulai tahun keempat. Pengungkapan catatan kaki dalam laporan keuangan akan diwajibkan memiliki *assurance* melalui audit laporan keuangan dan pengendalian internal atas persyaratan atestasi pelaporan keuangan.

* Terdapat perkembangan lain yang sedang berlangsung pada topik GRI dan standar sektor seperti proyek standar topik untuk keanekaragaman hayati dan proyek standar sektor untuk pertambangan. Lihat situs web GRI untuk detail lebih lanjut.

\# Berdasarkan CSRD, terdapat persyaratan wajib *assurance* atas laporan keberlanjutan entitas, awalnya *limited assurance* dan kemudian bertransisi ke *reasonable assurance*.

03

Pelaporan keberlanjutan dan persyaratan *assurance* di seluruh Asia Pasifik

Di tengah lanskap pelaporan keberlanjutan dan perkembangan *assurance* yang bergerak cepat dan senantiasa berubah, serta komitmen publik untuk mencapai netralitas karbon, persyaratan pelaporan keberlanjutan semakin ditingkatkan oleh regulator di setiap yurisdiksi di Asia Pasifik. Perusahaan harus memastikan agar terus mendapatkan pembaruan informasi seputar persyaratan lokal maupun standar global. Tabel berikut memberikan ikhtisar dan ringkasan persyaratan terkait pelaporan keberlanjutan di Asia Pasifik.

	Net zero/ netral karbon	Badan utama penggerak/ pendorong pelaporan keberlanjutan	Persyaratan pelaporan keberlanjutan*	Pelaporan TCFD*	Persyaratan *Assurance* wajib? (Ya/Tidak)*	Taksonomi terkait iklim
Australia	2050	Australian Securities Exchange (ASX)	Prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan untuk perusahaan tercatat dengan mengikuti pendekatan '*comply or explain*'	Pada bulan Juni 2023, *Australian Treasury* meluncurkan sebuah konsultasi tentang panduan untuk pengungkapan risiko-risiko dan peluang iklim yang berdasarkan TCFD. Periode konsultasi berakhir pada 21 Juni 2023.	Tidak	Mengembangkan Taksonomi Hijau
Tiongkok	2060	China Securities Regulatory Commission (CSRC) / Kemenkeu RRT	Wajib untuk perusahaan tercatat (dikategorikan sebagai unit emisi polutan utama)	Direncanakan untuk diwajibkan (perusahaan tercatat)	Tidak	Menerbitkan Katalog Proyek Berjaminan Obligasi Hijau
Hong Kong SAR	2050	Hong Kong Stock Exchange (HKEX) / Hong Kong Institute of Certified Public Accountants	Wajib bagi perusahaan tercatat mulai tahun 2016 dengan dasar pendekatan '*comply or explain*'	HKEX meluncurkan konsultasi tentang peningkatan persyaratan pengungkapan iklim pada April 2023. Periode konsultasi diperkirakan selesai pada 14 Juli 2023.	Tidak	Berencana mengembangkan kerangka klasifikasi hijau lokal
India	2070	Securities and Exchange Board of India (SEBI)	Wajib mulai FY 2022-2023, berlaku untuk 1.000 perusahaan tercatat teratas berdasarkan kapitalisasi pasar	Tidak wajib	Ya	Mengembangkan taksonomi keuangan berkelanjutan
Indonesia	2060	Otoritas Jasa Keuangan	Wajib bagi perusahaan perbankan (mulai tahun 2019) dan perusahaan tercatat (mulai tahun 2020) dengan pendekatan bertahap	Tidak wajib	Tidak	Menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia
Jepang	2050	Financial Services Agency	Syarat berdasarkan undang-undang sekuritas Jepang (dalam Laporan Sekuritas Tahunan, yang merupakan laporan wajib yang harus disampaikan)	Wajib mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Maret 2023 atau setelahnya (perusahaan tercatat)	Tidak	Menerbitkan Pedoman Dasar tentang Keuangan Transisi Iklim
Malaysia	Paling cepat 2050	Bursa Malaysia (BM) dan Bank Negara Malaysia (BNM)	Wajib bagi perusahaan tercatat sejak tahun 2016	Wajib mulai tahun 2025 untuk perusahaan tercatat dan tahun 2024 untuk Lembaga Keuangan (LK)	Tidak	Menerbitkan Taksonomi Berbasis Perubahan dan Prinsip Iklim untuk LK dan Taksonomi Investasi Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab untuk Pasar Modal
Selandia Baru	2050	New Zealand Stock Exchange (NZSX), Pemerintah Selandia Baru	Panduan untuk perusahaan tercatat melalui aturan tata kelola perusahaan, catatan panduan ESG, pengungkapan terkait iklim wajib untuk perusahaan besar dan LK mulai tahun 2023	Wajib bagi perusahaan besar tercatat dan LK mulai tahun 2023	Ya (*Limited assurance* atas emisi GHG) bagi perusahaan besar tercatat dan LK mulai Oktober 2024	Tidak ada

* Lihat Lampiran untuk perincian tentang persyaratan pelaporan keberlanjutan dan *assurance*.

	Net zero/ netral karbon	Badan utama penggerak/ pendorong pelaporan keberlanjutan	Persyaratan pelaporan keberlanjutan*	Pelaporan TCFD*	Persyaratan *Assurance* wajib? (Ya/Tidak)*	Taksonomi terkait iklim
Filipina	**	Securities and Exchange Commission (SEC) Filipina	Wajib bagi perusahaan tercatat mulai periode pelaporan tahun 2019 dengan dasar pendekatan '*comply or explain*' (wajib untuk dipatuhi mulai periode pelaporan tahun 2022)	Tidak wajib	Tidak	Pengembangan taksonomi keuangan berkelanjutan (inisiatif sudah masuk dalam rencana)
Singapura	2050	Singapore Exchange (SGX), Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)	Wajib bagi perusahaan tercatat mulai tahun 2017 dengan dasar pendekatan '*comply or explain*'. Pelaporan wajib tentang iklim dan keberagaman untuk perusahaan tercatat mulai tahun 2022. Semua LK wajib memiliki pengungkapan Manajemen Risiko Lingkungan (efektif Juni 2022).	Pelaporan iklim diselaraskan dengan kerangka kerja TCFD dan diwajibkan mulai tahun 2022 (perusahaan tercatat) dengan dasar pendekatan '*comply or explain*'; wajib mulai tahun 2023-2024 untuk industri tertentu ACRA dan SGX RegCo meluncurkan sebuah konsultasi untuk mengusulkan pelaporan wajib untuk pengungkapan terkait iklim oleh perusahaan tercatat dan perusahaan besar tidak tercatat. Periode konsultasi berakhir pada 30 September 2023.	Perusahaan yang tercatat di SGX diwajibkan untuk tunduk pada proses pelaporan keberlanjutan yang melibatkan tinjauan internal. *External assurance* dianjurkan.	Mempublikasikan makalah konsultasi ketiga tentang Taksonomi dan Transisi Hijau
Korea Selatan	2050	Komisi Jasa Keuangan	Laporan tata kelola diwajibkan bagi perusahaan tercatat mulai tahun 2019. Laporan keberlanjutan diwajibkan bagi perusahaan tercatat mulai tahun 2025.	Tidak wajib	Tidak	Menerbitkan *K-Taxonomy*
Taiwan	2050	Komisi Pengawas Keuangan, Taiwan Stock Exchange (TWSE), dan Taipei Exchange	Persyaratan wajib bagi perusahaan tercatat dan *over the counter* (OTC) diterapkan secara bertahap	Wajib bagi perusahaan tercatat dan OTC untuk mengungkapkan informasi terkait iklim dalam bab khusus. Merupakan persyaratan pengungkapan tambahan bagi jasa keuangan.	Wajib untuk industri terkait makanan, kimia, dan jasa keuangan	Menerbitkan tahap ke-1 (termasuk industri manufaktur, konstruksi, dan transportasi) Mengembangkan Taksonomi Keberlanjutan tahap ke-2
Thailand	Netral karbon pada 2050 dan *net zero* pada 2065	Stock Exchange of Thailand (SET), SEC Thailand	Wajib bagi perusahaan tercatat mulai tahun 2022	Tidak wajib	Tidak	Mengembangkan Taksonomi Hijau
Vietnam	2050	Kemenkeu Vietnam	Perusahaan publik diwajibkan untuk mengungkapkan informasi ESG dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan tersendiri (informasi tertentu tidak wajib bagi LK)	Tidak wajib	Tidak	Mengembangkan Taksonomi Hijau

* Lihat Lampiran untuk detail persyaratan pelaporan dan *assurance* keberlanjutan.
** Filipina belum menetapkan komitmen/target *net zero* atau netral karbon meskipun telah membuat janji pengurangan tertentu.

04

Kondisi pelaporan keberlanjutan di Asia Pasifik: Hal-hal penting

Ikhtisar

Untuk tahun kedua, PwC bekerja sama dengan National University of Singapore (NUS), Centre for Governance and Sustainability (CGS) untuk mengumpulkan wawasan tentang kondisi pelaporan keberlanjutan di Asia Pasifik. Wawasan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pemangku kepentingan untuk mengantisipasi laporan keberlanjutan yang diterbitkan pada tahun 2023.

Karena batas akhir analisis kami adalah Januari 2023, analisis kami mungkin tidak mencakup hasil pelaporan keberlanjutan yang mungkin timbul dari peraturan yurisdiksi. Misalnya, pelaporan iklim wajib Singapura bagi perusahaan tercatat, syarat Hong Kong SAR bagi perusahaan tercatat untuk memasukkan risiko terkait ESG ke dalam penilaian manajemen risiko perusahaan, dan Aturan Tata Kelola Perusahaan Jepang yang direvisi juga mewajibkan perusahaan yang tercatat di Pasar Perdana untuk memenuhi persyaratan TCFD.

Namun, analisis di bawah ini menyajikan wawasan tentang arah perjalanan sehubungan dengan kemajuan pelaporan keberlanjutan.

10 tren yang menonjol dari analisis kami

Dari analisis yang dilakukan, kami mencatat tren-tren berikut:

1. **TCFD dan risiko dan peluang iklim** – Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, telah terjadi peningkatan momentum dalam penggunaan kerangka kerja TCFD, termasuk pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim, dan penggunaan analisis skenario iklim, termasuk jalur normatif dan eksplorasi.

   Namun, hampir sama dengan tahun sebelumnya, meskipun perusahaan telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam memulai kerangka kerja TCFD dan analisis skenario iklim, masih ada kebutuhan untuk pertimbangan yang lebih baik atas pengelolaan risiko/peluang terkait iklim, integrasi ke dalam manajemen risiko secara keseluruhan, dan pengungkapan target risiko dan peluang terkait iklim.

2. **Fokus pada emisi Lingkup 3** – Meskipun pengukuran emisi Lingkup 1 dan 2 telah mencapai kematangan, perusahaan perlu lebih berupaya dalam mengestimasikan emisi Lingkup 3. Yurisdiksi seperti Jepang menunjukkan kinerja yang baik dalam pengungkapan emisi Lingkup 1, 2, dan 3.

   Perusahaan yang lebih besar dapat bekerja dengan para pemasoknya, yang mungkin merupakan perusahaan-perusahaan berskala lebih kecil hingga menengah untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar melakukan praktik yang lebih berkelanjutan dan juga demi mencapai transparansi dan akurasi emisi Lingkup 3 yang lebih baik.

3. **Kondisi *assurance*** – Kecuali untuk Korea Selatan dan Taiwan, tingkat *external assurance* keberlanjutan masih rendah. Selain itu, jumlah perusahaan pelapor yang meminta *reasonable assurance* dan *internal assurance* masih sangat sedikit.

   Karena data terkait keberlanjutan menjadi semakin penting bagi pemangku kepentingan, sangat penting bagi perusahaan untuk mendapatkan *external assurance* dan *internal assurance* yang sejalan dengan pelaporan keuangan. Kepercayaan dan transparansi atas data terkait keberlanjutan dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

4. **Penetapan target ESG** – Perusahaan di seluruh Asia Pasifik menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menetapkan target jangka menengah dan panjang, dibandingkan tahun sebelumnya.

5. **Penetapan target *net zero*** – Sebagian besar yurisdiksi menunjukkan kinerja yang baik dalam menetapkan target ESG, tetapi target *net zero* seringkali menghadirkan tantangan. Ini mencakup penetapan target berbasis sains, termasuk yang divalidasi oleh SBTi.

6. **Peningkatan kemampuan direksi dan manajemen** – Aspek ini masih rendah di sebagian besar yurisdiksi. Peningkatan keterampilan di tingkat pimpinan penting bagi para pemimpin untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mengelola isu-isu keberlanjutan yang signifikan, yang meliputi strategi dan manajemen risiko.

7. **Keterkaitan antara remunerasi dan kinerja keberlanjutan** – Mengingat pentingnya isu keberlanjutan, kami mencatat bahwa sebagian besar yurisdiksi memiliki skema insentif keberlanjutan yang rendah bagi para eksekutif. Namun, kami mencatat bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan di Jepang, Malaysia, Singapura, dan Taiwan, dengan Australia sebagai yurisdiksi terdepan dalam aspek ini.

8. **Standar pelaporan keberlanjutan yang dominan** – GRI masih menjadi standar pelaporan keberlanjutan yang dominan. Namun, perusahaan perlu memantau dengan cermat bagaimana yurisdiksi akan menggunakan standar pelaporan keberlanjutan yang baru seperti ISSB.

9. **Penggunaan SASB** – Dibandingkan tahun sebelumnya, penerapan standar SASB nampaknya meningkat karena adanya Australia dan India.

10. **Memberi respons kepada pemangku kepentingan** – Meskipun perusahaan sudah melibatkan para pemangku kepentingan utamanya, perusahaan dapat meningkatkan bagaimana ia menanggapi isu-isu yang menjadi perhatian dan kebutuhan mereka. Hal ini konsisten dengan temuan tahun sebelumnya.

Ikhtisar studi pelaporan keberlanjutan

- 50 perusahaan tercatat terbesar yang teratas dari setiap yurisdiksi yang dipilih (14 dalam lingkup)
- Dianalisis terhadap atribut pelaporan keberlanjutan umum berdasarkan prinsip GRI dan TCFD
- Berdasarkan laporan keberlanjutan terbaru dan laporan tahunan yang tersedia hingga Januari 2023
- Memberikan wawasan tentang status untuk mengantisipasi laporan keberlanjutan yang akan datang

Metodologi

Lingkup studi

Studi ini berfokus pada 50 perusahaan tercatat yang teratas berdasarkan kapitalisasi pasar di 14 yurisdiksi terpilih di Asia Pasifik, yaitu Australia, Tiongkok, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Vietnam. Sebanyak 700 perusahaan tercatat dikaji, yang mencakup 11 industri: layanan komunikasi, diskresi konsumen, bahan kebutuhan pokok, energi, keuangan, perawatan kesehatan, industri, teknologi informasi, material, real estat, dan utilitas.

Perusahaan-perusahaan tersebut diidentifikasi sebagai perusahaan yang tercatat di bursa saham dunia, yaitu ASX, *Bombay Stock Exchange* (BSE), BM, *Ho Chi Minh Stock Exchange* (HOSE), HKEX, Bursa Efek Indonesia (IDX), *Korea Stock Exchange* (KRX), NZSX, *The Philippine Stock Exchange* (PSE), *Shanghai Stock Exchange* (SSE), *Shenzhen Stock Exchange* (SZSE), SGX, SET, TWSE, *Tokyo Stock Exchange* (TSE).

Informasi yang ditinjau adalah berdasarkan laporan keberlanjutan terbaru dan laporan tahunan yang tersedia hingga Januari 2023. Yang disertakan dalam studi hanyalah perusahaan yang laporan keberlanjutannya disampaikan dalam bahasa Inggris.

Kerangka kerja penelitian

Kerangka penilaian yang digunakan dalam studi ini dikembangkan dengan mengacu pada GRI dan TCFD. GRI dijadikan referensi karena masih banyak digunakan. TCFD dijadikan referensi karena adanya peningkatan fokus yang semakin penting pada perubahan iklim. Laporan keberlanjutan kemudian dianalisis terhadap atribut-atribut ini yang meliputi 5 area dan 20 subarea:

Area	Sub Area
Materialitas dan pelibatan pemangku kepentingan	1. Identifikasi faktor-faktor ESG penting 2. Pengungkapan tentang kanal pelibatan pemangku kepentingan dan respons terhadap isu-isu yang menjadi perhatian pemangku kepentingan
Target keberlanjutan	3. Pengungkapan target 4. *Pengungkapan target *net zero* 5. *Pengungkapan target *net zero* berdasarkan dan diverifikasi oleh SBTi
Perubahan iklim serta pengelolaan risikonya	6. Identifikasi risiko/peluang terkait iklim 7. *Pengungkapan tentang proses pengelolaan risiko/peluang terkait iklim 8. Pengungkapan tentang integrasi risiko terkait iklim ke dalam manajemen risiko secara keseluruhan 9. Pengungkapan tentang target dan/atau pelacakan risiko dan peluang terkait iklim 10. *Pengungkapan tentang analisis skenario iklim 11. *Pengungkapan tentang Emisi GHG Lingkup 1, Lingkup 2, dan Lingkup 3 12. *Tingkat pengungkapan emisi GHG Lingkup 3
Tata kelola dan tanggung jawab	13. Pengungkapan tentang tanggung jawab Direksi (*Board of Directors*/BOD) terhadap keberlanjutan 14. Pengungkapan tentang struktur tata kelola keberlanjutan 15. Pengungkapan tentang Direksi/manajemen dengan pelatihan keberlanjutan 16. Pengungkapan tentang remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja keberlanjutan 17. *Pengungkapan tentang aspek keberagaman Direksi
Membangun kepercayaan	18. Pengungkapan tentang lingkup pelaporan 19. Pengungkapan tentang *assurance* atas area-area utama pelaporan keberlanjutan 20. *Pengungkapan tentang tingkat *external assurance* dan kerangka kerja yang digunakan untuk *external assurance*

*Tahun ini kami memasukkan lebih banyak subarea setelah menerima umpan balik bahwa seluruh sub area ini juga akan menarik bagi para pemangku kepentingan.
Di halaman-halaman berikut, kami menganalisis situasi pelaporan keberlanjutan dari tiap-tiap yurisdiksi (berdasarkan 50 perusahaan tercatat yang teratas) terhadap atribut-atribut ini.

Kondisi standar dan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang digunakan

GRI dan SDG adalah standar dan kerangka kerja yang paling umum digunakan untuk pelaporan keberlanjutan di sebagian besar yurisdiksi, diikuti oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) dan TCFD. Pengungkapan terkait iklim menjadi lebih populer dan diharapkan diamanatkan sebagai bagian dari peraturan pelaporan keberlanjutan. Penggunaan TCFD oleh perusahaan diperkirakan akan semakin lazim.

	GRI	SDG	ISO	TCFD	SASB	UNGC	CDP	IIRC
Keseluruhan (2021)	*75%*	*76%*	*66%*	*36%*	*18%*	*23%*	*17%*	*20%*
Keseluruhan (2022)	81%	78%	69%	57%	36%	28%	20%	20%
Australia	80%	80%	56%	86%	48%	34%	12%	8%
Hong Kong SAR	80%	76%	86%	66%	28%	30%	22%	4%
India	84%	86%	64%	58%	50%	60%	50%	66%
Indonesia	80%	86%	78%	10%	18%	12%	12%	4%
Jepang	80%	88%	88%	90%	44%	36%	20%	70%
Tiongkok	76%	60%	70%	36%	8%	18%	8%	0%
Malaysia	84%	92%	78%	60%	18%	12%	22%	24%
Selandia Baru	44%	50%	48%	56%	12%	2%	30%	18%
Filipina	90%	94%	60%	36%	52%	18%	12%	16%
Singapura	98%	78%	74%	64%	34%	44%	10%	10%
South Korea	100%	82%	66%	92%	88%	48%	34%	20%
Taiwan	96%	92%	76%	90%	84%	36%	32%	20%
Thailand	86%	90%	68%	60%	22%	36%	22%	12%
Vietnam	50%	32%	54%	0%	2%	0%	0%	10%

0 hingga 25% perusahaan | **25% hingga 50% perusahaan** | **50% hingga 75% perusahaan** | **>75% perusahaan**

Di halaman-halaman berikut, kami menganalisis status pelaporan keberlanjutan di 14 yurisdiksi terpilih (berdasarkan 50 perusahaan tercatat yang teratas) terhadap atribut-atribut di atas. **Perlu dicatat bahwa, sampai taraf tertentu, hasil yang diperoleh mungkin didorong oleh waktu dan lingkup penerapan peraturan pelaporan keberlanjutan di yurisdiksi tiap-tiap perusahaan, termasuk sifat dan fokus persyaratan dan rekomendasi pelaporan keberlanjutan.**

Materialitas dan pelibatan pemangku kepentingan

Bagan 1: Identifikasi faktor-faktor ESG penting

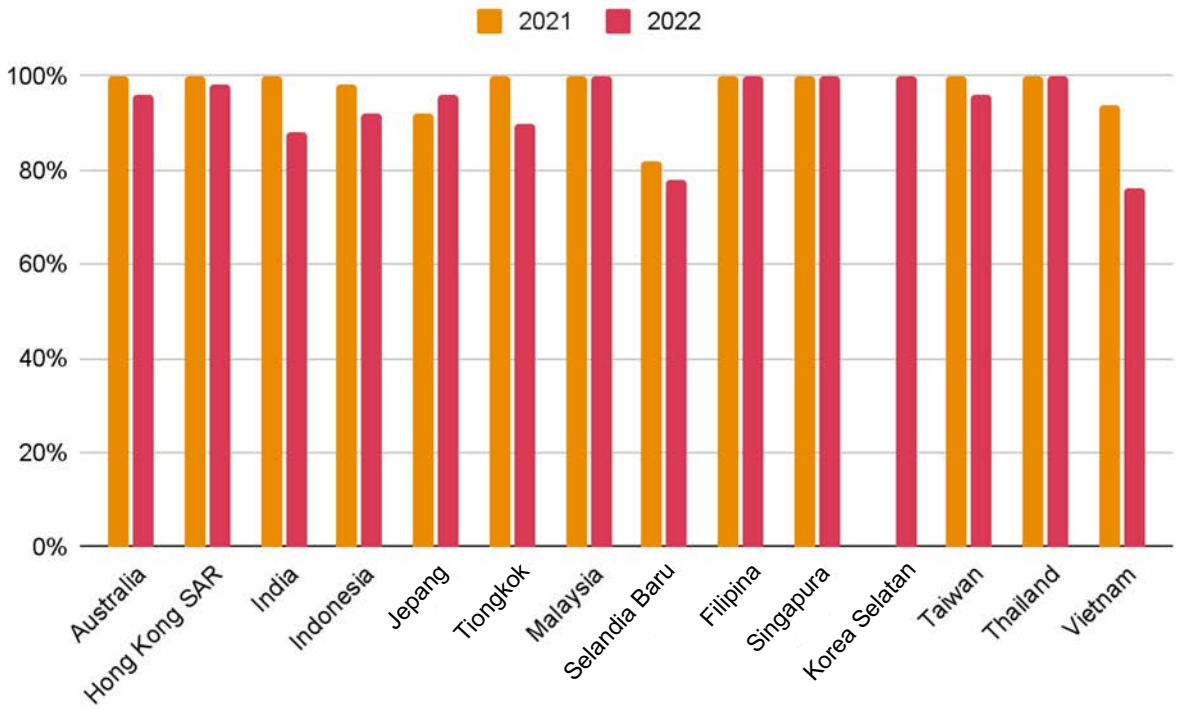

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia.

Mengapa ini penting

Identifikasi topik-topik ESG yang penting bagi strategi inti organisasi dan penciptaan nilai jangka panjang membantu organisasi dalam memprioritaskan dan menyalurkan upayanya dalam mengelola risiko dan menyuburkan peluang terkait dengan topik-topik ESG penting tersebut. Pengungkapan faktor-faktor ESG penting menunjukkan bahwa organisasi memahami isu-isu keberlanjutan utama yang paling relevan bagi para pemangku kepentingan. Pengungkapan tersebut juga membantu para investor memahami faktor-faktor yang penting bagi risiko dan peluang investasinya.

Praktik terkini

- 94% perusahaan yang dikaji mengungkapkan faktor-faktor ESG penting di seluruh Asia Pasifik.
- Patut disoroti bahwa tingkat pengungkapan untuk perusahaan tercatat di Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand adalah 100%.
- Dibandingkan dengan tahun 2021, selain Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, terdapat sedikit penurunan persentase perusahaan yang mengidentifikasi faktor-faktor ESG penting.
- 5 faktor ESG umum penting yang teratas pada tahun 2022 adalah: Kesehatan dan keselamatan kerja, Komunitas lokal, Pelatihan dan pendidikan, Energi, dan Perubahan iklim. Hal ini secara umum masih konsisten dengan tahun 2021 kecuali perubahan iklim, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin memperhatikan perubahan iklim.

Bagan 2: Pengungkapan tentang kanal pelibatan pemangku kepentingan dan respons terhadap perhatian pemangku kepentingan

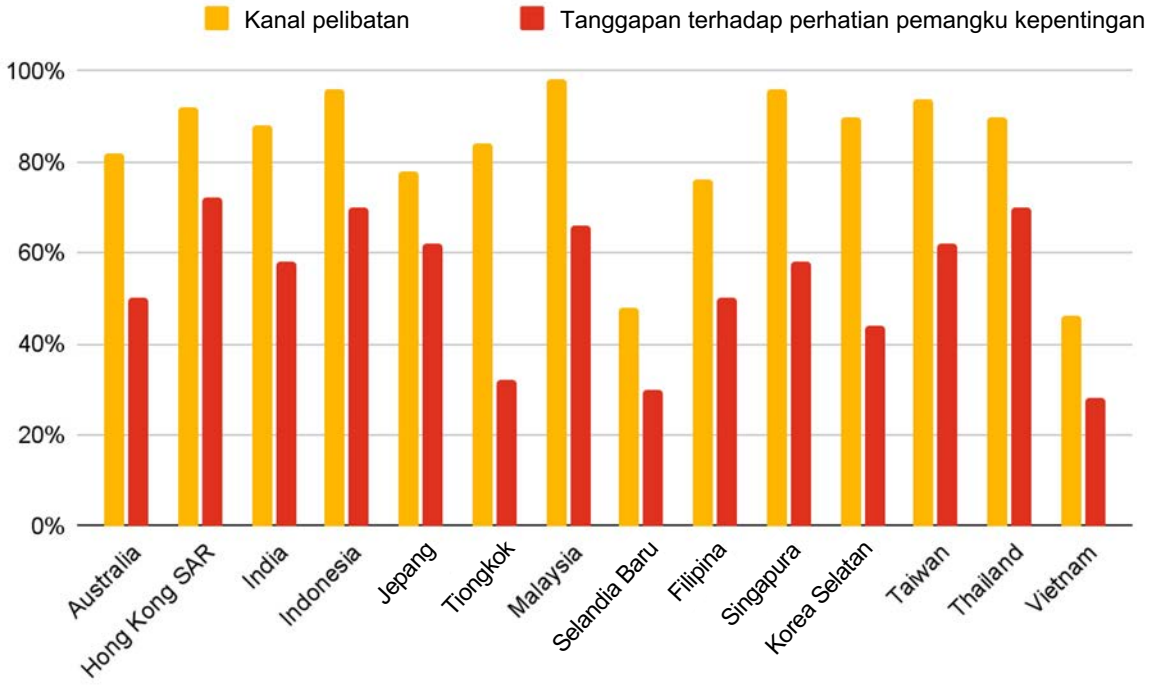

Mengapa ini penting

Keterlibatan pemangku kepentingan dapat memberi organisasi pokok-pokok pertimbangan keberlanjutan terbaru dan paling relevan di seluruh rantai nilainya. Penggunaan kanal pelibatan yang tepat bersama dengan respons yang tepat waktu terhadap masalah memberikan pemahaman tentang seberapa luas dan kuat pemangku kepentingan terlibat termasuk peran mereka dalam mengidentifikasi dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia yang selanjutnya akan digunakan dalam menentukan topik ESG yang paling penting bagi suatu organisasi.

Praktik terkini

- 83% perusahaan yang dikaji mengungkapkan kanal pelibatan pemangku kepentingan.
- Hanya 54% perusahaan yang mengungkapkan penanganan isu-isu yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, di mana persentase tertinggi ditemukan di Hong Kong SAR (72%), Indonesia (70%), dan Thailand (70%).

Strategi dan target

Bagan 3: Pengungkapan target ESG dalam kerangka waktu yang berbeda

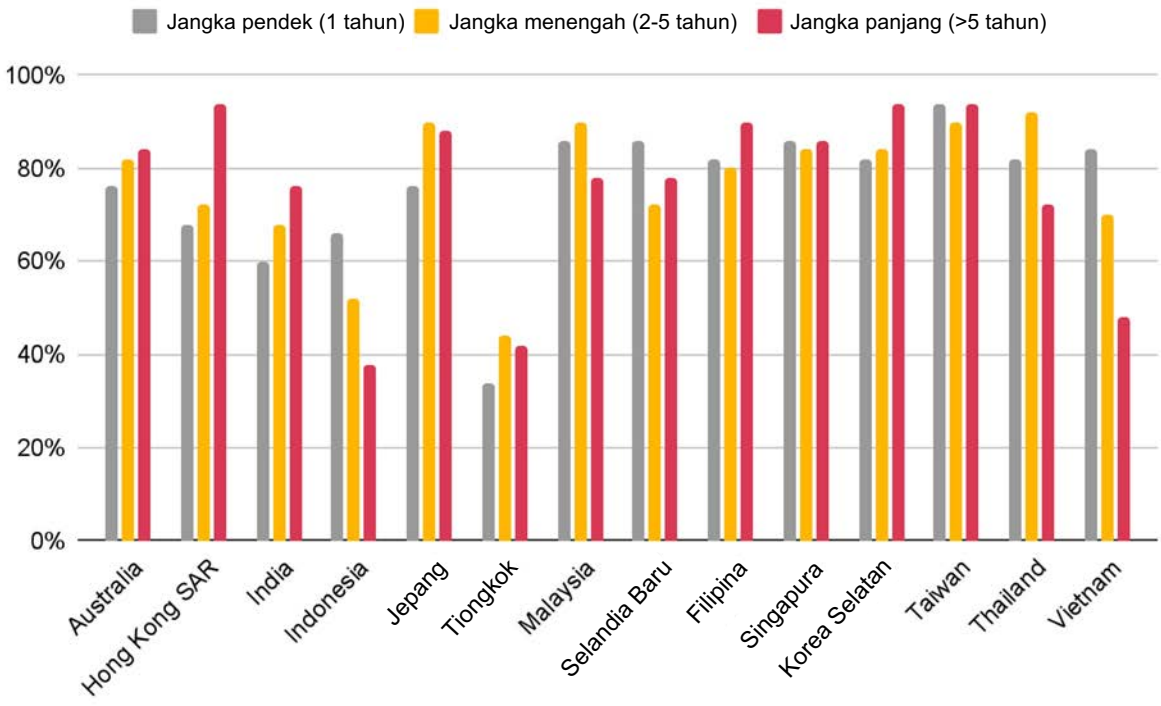

Mengapa ini penting

Penetapan target sangat penting bagi perusahaan untuk memantau kemajuannya dalam menanggapi faktor-faktor ESG penting yang ditentukan dan menyesuaikan strateginya untuk melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan.

Praktik terkini

- 92% perusahaan yang dikaji mengungkapkan target keberlanjutan untuk memandu pengembangannya di masa depan.
- Target-target ESG umum yang diungkapkan meliputi pemanfaatan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, pengurangan limbah, peningkatan persentase karyawan perempuan, peningkatan jam pelatihan, dan peningkatan praktik ketenagakerjaan.

Bagan 3a: Pengungkapan target ESG jangka pendek (1 tahun)

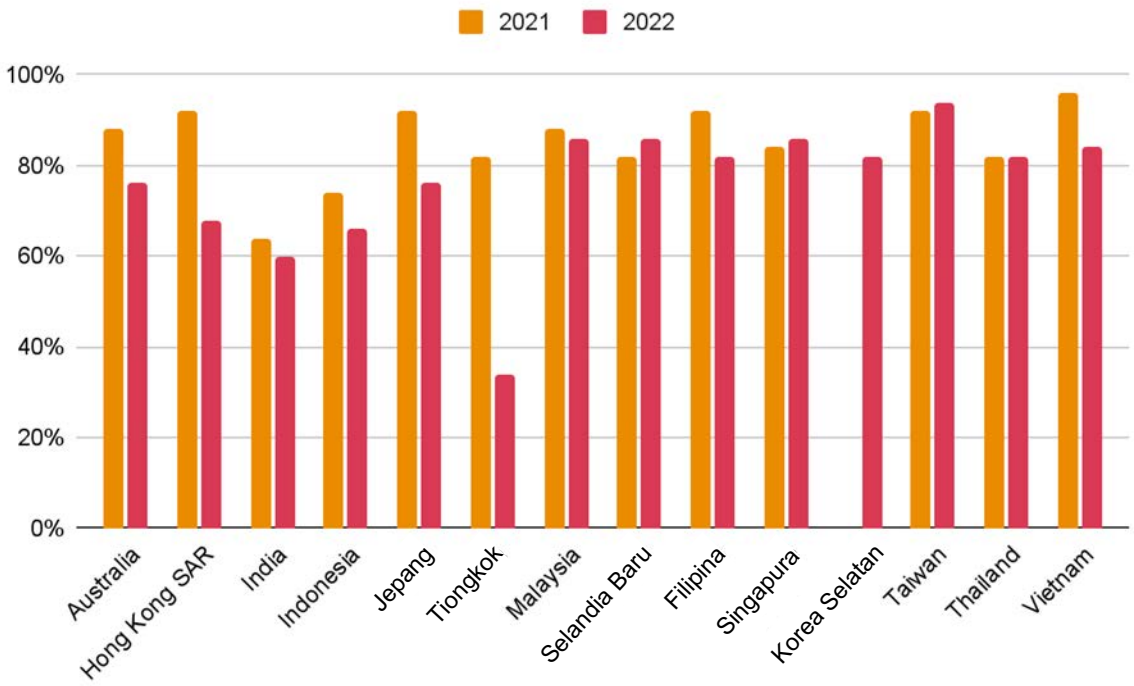

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia.

Gambar 3b: Pengungkapan target ESG jangka menengah (2-5 tahun)

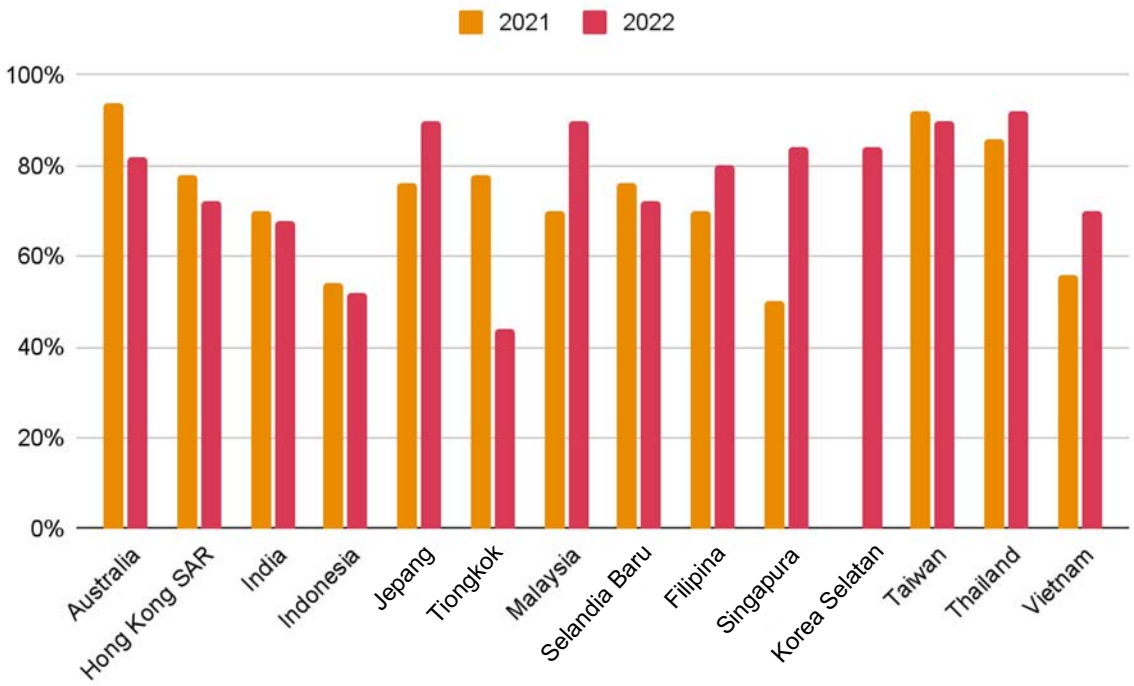

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia.

Bagan 3c: Pengungkapan target ESG jangka panjang (>5 tahun)

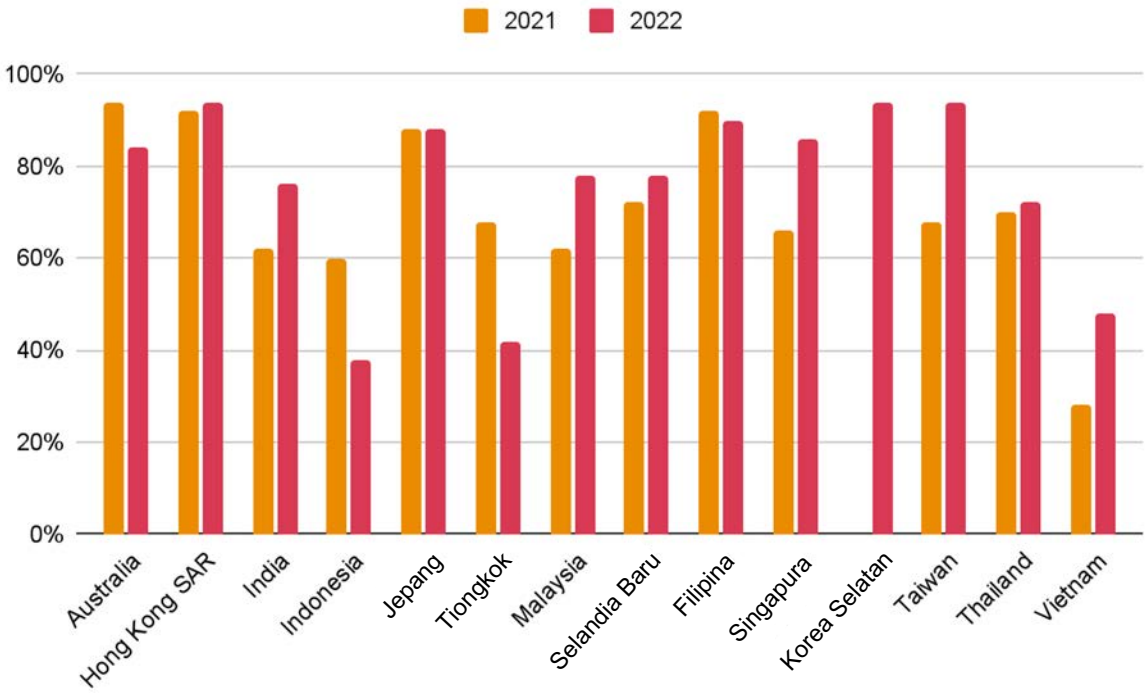

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia.

Mengapa ini penting

Target ESG harus dapat diukur, dan terikat waktu untuk mendorong akuntabilitas dan memungkinkan pelacakan kinerja. Baik target jangka pendek maupun jangka panjang dapat membantu memastikan peningkatan pada area-area ESG seperti emisi, air, kesehatan dan keselamatan, yang sifatnya penting bagi suatu organisasi.

Praktik terkini

- Pengungkapan target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang memiliki persentase yang serupa – sekitar 76% untuk perusahaan yang dikaji di seluruh Asia Pasifik.
- Terjadi penurunan pengungkapan target jangka pendek sebesar 9%, dari 85% pada tahun 2021 untuk 13 yurisdiksi (650 perusahaan) yang dinilai tahun lalu menjadi 76% pada tahun 2022 untuk 14 yurisdiksi (700 perusahaan) yang dinilai pada tahun 2022.
- Seiring semakin banyaknya yurisdiksi yang berjanji untuk mencapai target emisi karbonnya pada paruh kedua abad ini, semakin banyak perusahaan yang mengungkapkan target jangka menengah (naik 3%) dan jangka panjang (naik 5%) yang berkontribusi terhadap target emisi karbon nasional. Ini merupakan peningkatan yang mencolok dibandingkan dengan tahun lalu di sebagian besar yurisdiksi.
- Dari semua target jangka panjang yang diungkapkan, target-target yang umumnya disebut adalah bersih (nol) emisi karbon, netralitas karbon, pemanfaatan energi terbarukan 100%, dan peningkatan persentase karyawan perempuan.

Bagan 4: Pengungkapan target *net zero*

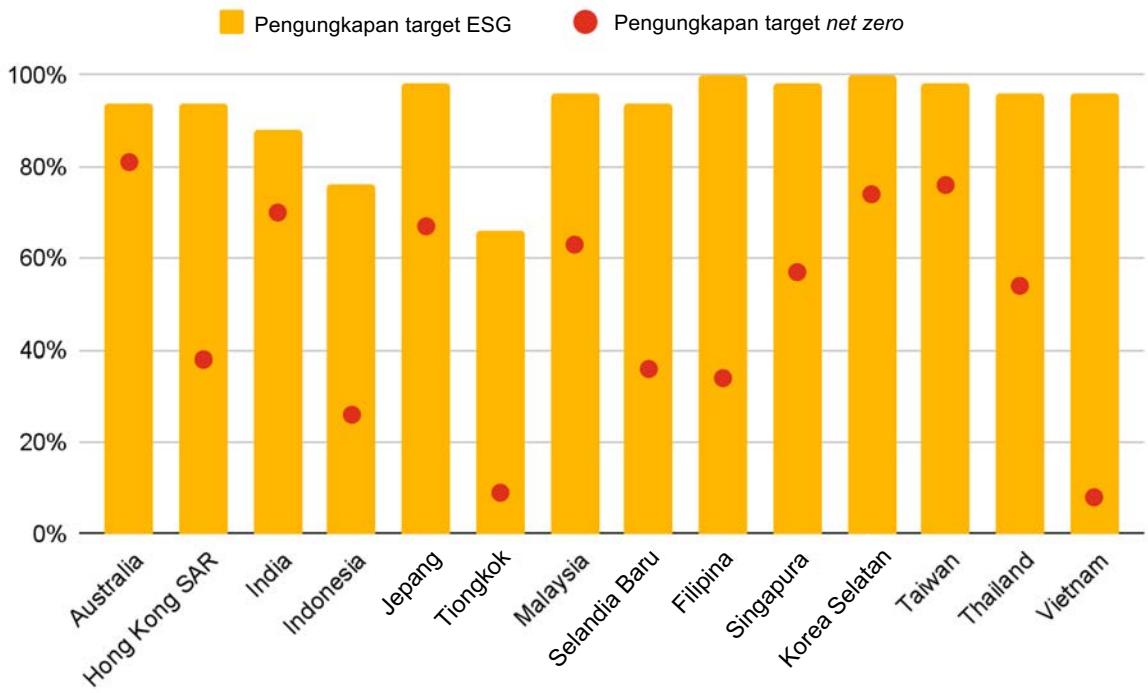

Catatan: Basis untuk "pengungkapan target" adalah semua perusahaan; basis untuk "pengungkapan target *net zero*" adalah perusahaan yang mengungkapkan target keberlanjutan.

Komitmen *net zero* atau netral karbon berdasarkan yurisdiksi:

Australia	Hong Kong SAR	India	Indonesia	Jepang	Tiongkok	Malaysia	Selandia Baru	Filipina	Singapura	Korea Selatan	Taiwan	Thailand	Vietnam
2050	2050	2070	2060	2050	2060	Paling cepat 2050	2050	**	2050	2050	2050	Netral karbon pada 2050 dan *net zero* pada 2065	2050

** Filipina belum menetapkan komitmen/target *net zero* atau netral karbon meskipun telah membuat janji pengurangan tertentu.

Mengapa ini penting

Net zero mengacu pada target pengurangan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global menjadi nol bersih (*net zero*), yang mengharuskan adanya penurunan emisi yang signifikan di semua sektor ekonomi. Untuk mencapai *net zero*, perusahaan harus memiliki pengukuran lengkap atas emisi gas rumah kacanya dan setelah itu menerapkan rencana dekarbonisasi pada operasional atau portofolio usahanya. Dalam mengembangkan rencana dekarbonisasi, perusahaan juga harus mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko dan peluang iklimnya yang ditimbulkan oleh kenaikan suhu, kebijakan terkait iklim, dan teknologi baru.

Pada tahun 2018, *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyatakan bahwa dunia perlu mencapai *net zero* sekitar tahun 2050 agar dapat memenuhi target Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C. Organisasi pun semakin mempercepat pemenuhan komitmen *net zero* masing-masing guna berkontribusi langsung dalam mencapai target dalam Perjanjian Paris tersebut.

Praktik terkini

- Di antara perusahaan-perusahaan yang sudah mengungkapkan target keberlanjutan, sebanyak 51% perusahaan sudah mengungkapkan target *net zero*.
- Menurut temuan studi, perusahaan-perusahaan tercatat di Australia (81%), Taiwan (76%), Korea Selatan (74%) dan India (70%) menunjukkan tingkat pengungkapan target *net zero* yang tinggi. Australia, Taiwan, dan Korea Selatan telah berjanji untuk mencapai *net zero* pada tahun 2050, sementara India menargetkan untuk mencapai *net zero* pada tahun 2070.

Bagan 5: Pengungkapan target *net zero* berdasarkan dan diverifikasi oleh SBTi

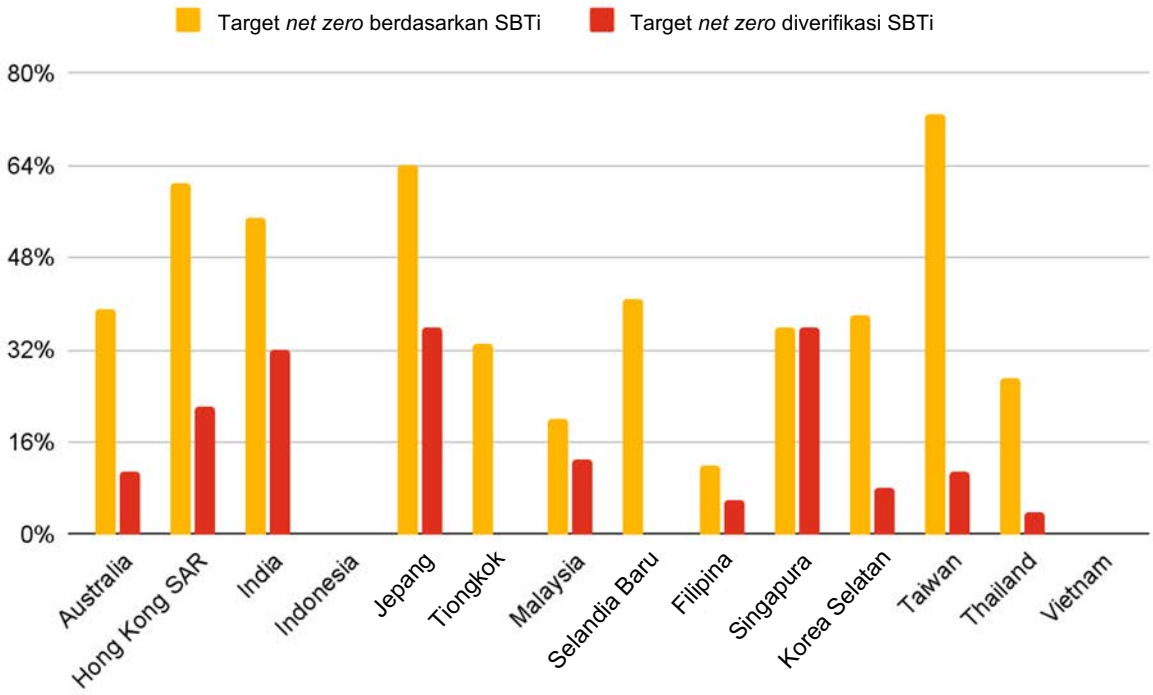

Catatan: Basis untuk "target *net zero* berdasarkan SBTi" dan "target *net zero* yang diverifikasi oleh SBTi" adalah perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan target *net zero*.

Mengapa ini penting

Semakin banyak perusahaan yang menetapkan target *net zero*. Meskipun jumlah entitas yang berkomitmen untuk mencapai emisi *net zero* bertambah dengan pesat, tidak semua target *net zero* berbasis sains. Dua kerangka kerja terkemuka yang direkomendasikan dalam lanskap penetapan target terkait perubahan iklim adalah kerangka kerja *Science-Based Targets initiative* (SBTi) dan *Task Force for Climate-related Financial Disclosures* (TCFD).

Melalui penggunaan kerangka kerja ini, perusahaan lintas sektor dan yurisdiksi dapat menetapkan target iklim berbasis sains dengan tepat. Target iklim berbasis sains memberi jalur bagi organisasi untuk mengurangi emisinya dan memitigasi perubahan iklim. Target tersebut dibuat berdasarkan sains iklim terbaru dan membahas tujuan yang ditetapkan oleh Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang dianggap perlu untuk memenuhi tujuan perjanjian Paris. Target iklim berbasis sains penting untuk memastikan agar perusahaan konsisten membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 °C.

Selain itu, verifikasi target tersebut oleh SBTi meningkatkan konsistensinya di seluruh organisasi dan juga keandalannya karena para pakar teknis SBTi memberikan umpan balik yang terperinci dan bantuan. Komitmen target organisasi dipublikasikan di website SBTi, sehingga semakin mendorong organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Praktik terkini

- 42% perusahaan yang dikaji menetapkan target *net zero* berdasarkan SBTi, sementara hanya 16% dari target ini yang diverifikasi oleh SBTi. Masih ada ruang untuk peningkatan dalam menetapkan target berbasis SBTi dan memperoleh verifikasi SBTi.
- Perlu dicatat bahwa tingkat verifikasi SBTi tertinggi berasal dari Jepang dan Singapura (36%), diikuti oleh India (32%).

Perubahan iklim serta pengelolaan risikonya

Bagan 6: Identifikasi risiko/peluang terkait iklim

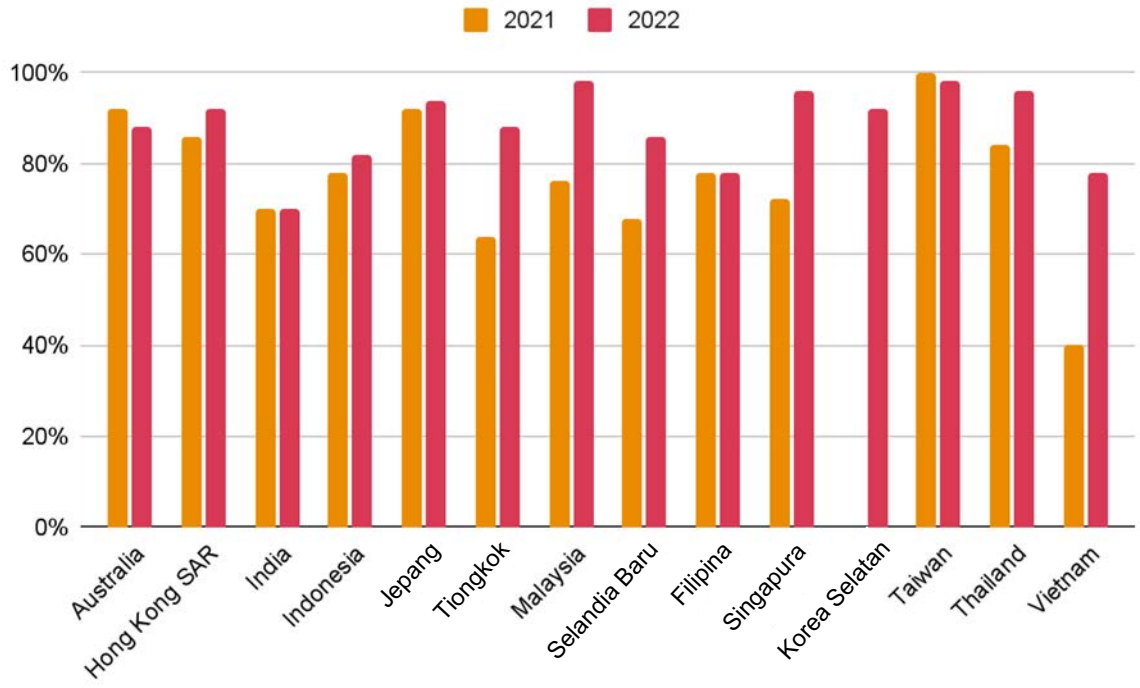

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia

Mengapa ini penting

Asia Pasifik menyumbang hampir setengah emisi gas rumah kaca global. Sebanyak 78% dari yurisdiksi di wilayah ini telah menyampaikan komitmen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*/NDC) yang telah diperbarui, tetapi laporan terbaru PBB menunjukkan bahwa secara kolektif wilayah ini masih tertinggal dalam upayanya untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5°C. Sebagai salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, perusahaan di Asia Pasifik memiliki peran penting dalam mendukung tujuan keberlanjutan emisi nasional dan regional.

TCFD membagi risiko terkait iklim ke dalam dua kategori utama: 1) risiko transisi – risiko yang terkait dengan perubahan kebijakan, hukum, teknologi, dan pasar secara luas ketika bertransisi ke perekonomian rendah karbon; dan 2) risiko fisik – risiko yang terkait dengan dampak fisik perubahan iklim. Meskipun perubahan iklim membawa tantangan, adaptasi perubahan iklim dan upaya mitigasi juga membawa peluang terkait iklim bagi perusahaan yang menyambut perubahan tersebut. Mengidentifikasi risiko dan peluang terkait iklim penting dalam memprioritaskan aksi iklim serta investasi dalam langkah-langkah adaptasi.

Pengungkapan terkait perubahan iklim telah menjadi bagian yang semakin penting dalam pelaporan keberlanjutan dan upaya untuk menanggulangi risiko transisi terkait iklim maupun risiko fisik. Perusahaan akan menghadapi baik tantangan maupun peluang ketika menyesuaikan strategi dan model bisnisnya untuk mencerminkan ketentuan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin meningkat.

Praktik terkini

- Pada 2022, 88% perusahaan yang dikaji mengidentifikasi risiko dan/atau peluang terkait iklim. Tingkat pengungkapan untuk 13 yurisdiksi (kecuali Korea Selatan) adalah 88% pada 2022, naik 11% dari 77% pada 2021.

- Peningkatan lebih signifikan yang diamati mungkin timbul akibat pengumuman regulator dan/atau pemerintah pada 2021 sebagai berikut:

    - **Tiongkok**
      Pada Mei 2021, Tiongkok membentuk China Climate Change Commission yang baru untuk melakukan koordinasi tingkat tinggi terkait strategi iklim. Komisi ini juga menetapkan kerangka kerja kebijakan iklim 1+N yang menyoroti area-area utama yang didukung oleh pemerintah untuk netralitas karbon.

    - **Malaysia**
      Pada September 2021, pemerintah mengumumkan melalui *12th Malaysia Plan* bahwa legislasi tentang perubahan iklim akan dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas aksi perubahan iklim.

    - **Singapura**
      Pada Desember 2021, Singapore Exchange mengumumkan kewajiban bagi emiten untuk menyampaikan pelaporan terkait iklim berdasarkan rekomendasi TCFD.

    - **Vietnam**
      Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengumumkan rencana untuk mencapai emisi *net zero* sebelum 2050 pada COP26. Pidato tersebut mengindikasikan kemungkinan peluang bagi perusahaan, yang dapat menghasilkan peningkatan pengungkapan peluang terkait iklim.

- Lima yurisdiksi teratas dari segi perusahaan yang mengidentifikasi risiko dan/atau terkait iklim adalah Malaysia (98%), Taiwan (98%), Singapura (96%) Thailand (96%), dan Jepang (94%).

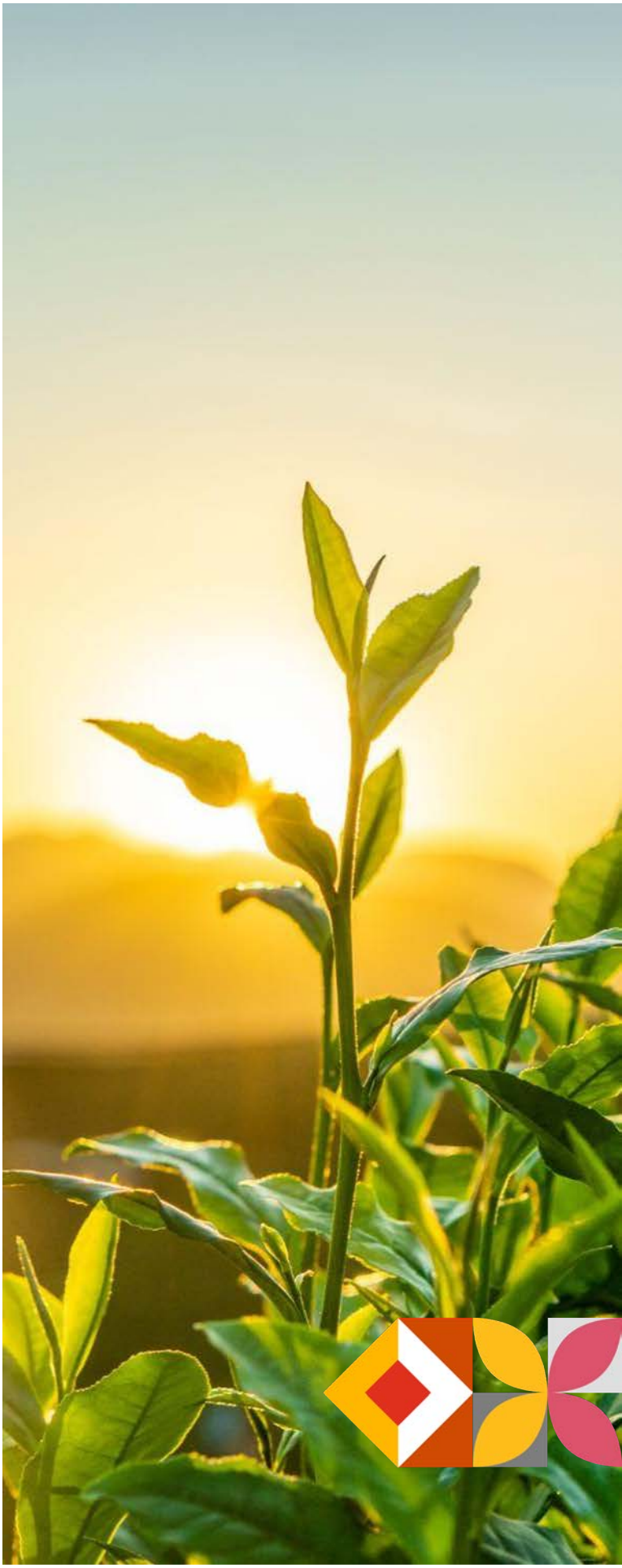

Bagan 7: Pengungkapan proses manajemen risiko/peluang terkait iklim

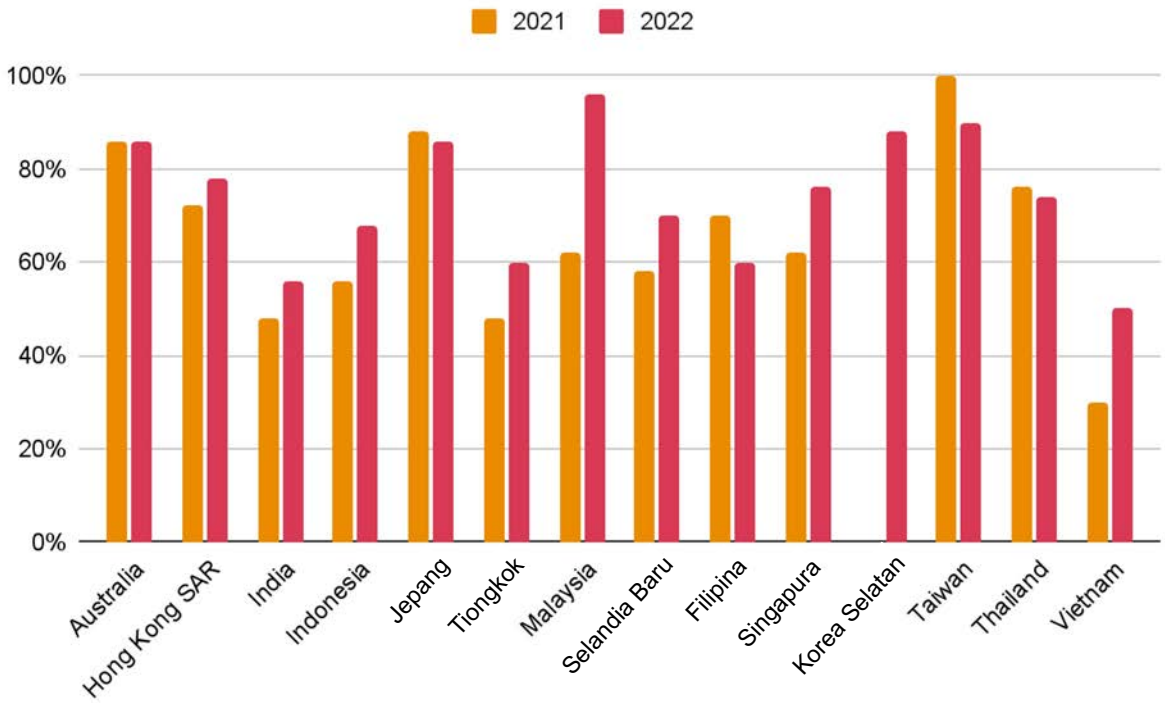

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia.

Mengapa ini penting

Secara umum, perusahaan yang telah mengidentifikasi perubahan iklim sebagai topik penting juga telah mengungkapkan detail risiko atau peluang terkait iklim yang dimilikinya, dan telah mengungkapkan proses manajemen risikonya terkait iklim. Investor dan para pemangku kepentingan lain perlu memahami bagaimana risiko terkait iklim suatu organisasi diidentifikasi, dinilai, dan dikelola, dan apakah proses tersebut terintegrasi di seluruh sistem manajemen risiko yang ada. Australia, Jepang, dan Taiwan menonjol sebagai yurisdiksi yang memiliki porsi yang lebih tinggi dalam hal perusahaan yang telah mengungkapkan baik risiko/peluang terkait iklim maupun proses yang terkait untuk mengelola risiko terkait iklim.

Praktik terkini

- Pada 2022, 74% perusahaan yang dikaji telah mengungkapkan proses manajemen risiko dan/atau peluang terkait iklim yang dimilikinya. Tingkat pengungkapan untuk 13 yurisdiksi (kecuali Korea Selatan) adalah 73% pada 2022, naik 7% dari 66% pada 2021.
- Peningkatan lebih signifikan yang diamati di Malaysia sejalan dengan peningkatan (dari 28% pada 2021 menjadi 60% pada 2022) yang diamati pada organisasi yang menggunakan kerangka kerja TCFD dalam pelaporannya. Lima yurisdiksi teratas dari segi perusahaan yang mengungkapkan proses manajemen risiko dan/atau peluang terkait iklim yang dimilikinya adalah Malaysia (96%), Taiwan (90%), Korea Selatan (88%), Australia (86%), dan Jepang (86%). Hal ini secara umum selaras dengan yurisdiksi yang memiliki tingkat pengungkapan identifikasi risiko dan/atau peluang terkait iklim yang lebih tinggi.

Bagan 8: Pengungkapan integrasi risiko terkait iklim ke dalam keseluruhan manajemen risiko

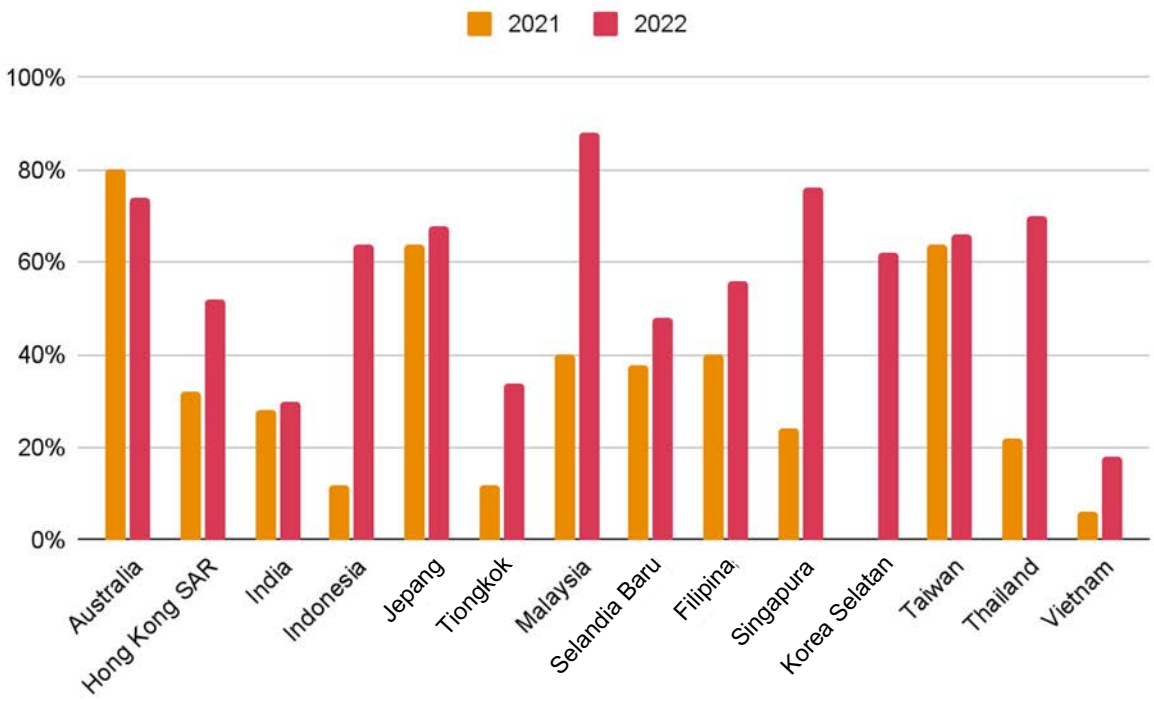

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia.

Mengapa ini penting

Mengintegrasikan risiko terkait iklim ke dalam manajemen risiko penting dalam mengelola risiko tersebut, baik yang melibatkan langkah adaptasi maupun mitigasi. Pengungkapan tersebut membantu pengguna pengungkapan keuangan terkait iklim untuk mengevaluasi profil risiko dan kegiatan manajemen risiko organisasi secara keseluruhan.

Praktik terkini

- Pada 2022, meskipun lebih dari 70% perusahaan telah mengungkapkan proses manajemen risiko terkait iklim, hanya 58% perusahaan yang mengungkapkan bagaimana risiko terkait iklim diintegrasikan ke dalam manajemen risiko secara keseluruhan.
- Temuan lain yang menggembirakan adalah bahwa tingkat pengungkapan integrasi risiko terkait iklim ke dalam keseluruhan manajemen risiko secara umum telah meningkat dari 36% pada 2021 menjadi 58% pada 2022 di 13 yurisdiksi (kecuali Korea Selatan).
- Pengungkapan integrasi risiko terkait iklim ke dalam keseluruhan manajemen risiko adalah salah satu komponen pelaporan berdasarkan kerangka kerja TCFD. Kenaikan tingkat pengungkapan mungkin dihasilkan dari penerapan kerangka kerja TCFD yang meningkat.
- Khususnya di Indonesia dan Thailand, pengguna kerangka kerja TCFD meningkat dari 4% pada 2021 menjadi 10% pada 2022 serta dari 24% pada 2021 menjadi 60% pada 2022, berturut-turut.
- Mengikuti tren ini, diperkirakan bahwa semakin banyak perusahaan akan mengintegrasikan risiko terkait iklim, termasuk risiko transisi dan risiko fisik, ke dalam manajemen risikonya secara keseluruhan.

Bagan 9: Pengungkapan target dan/atau pemantauan risiko dan peluang terkait iklim

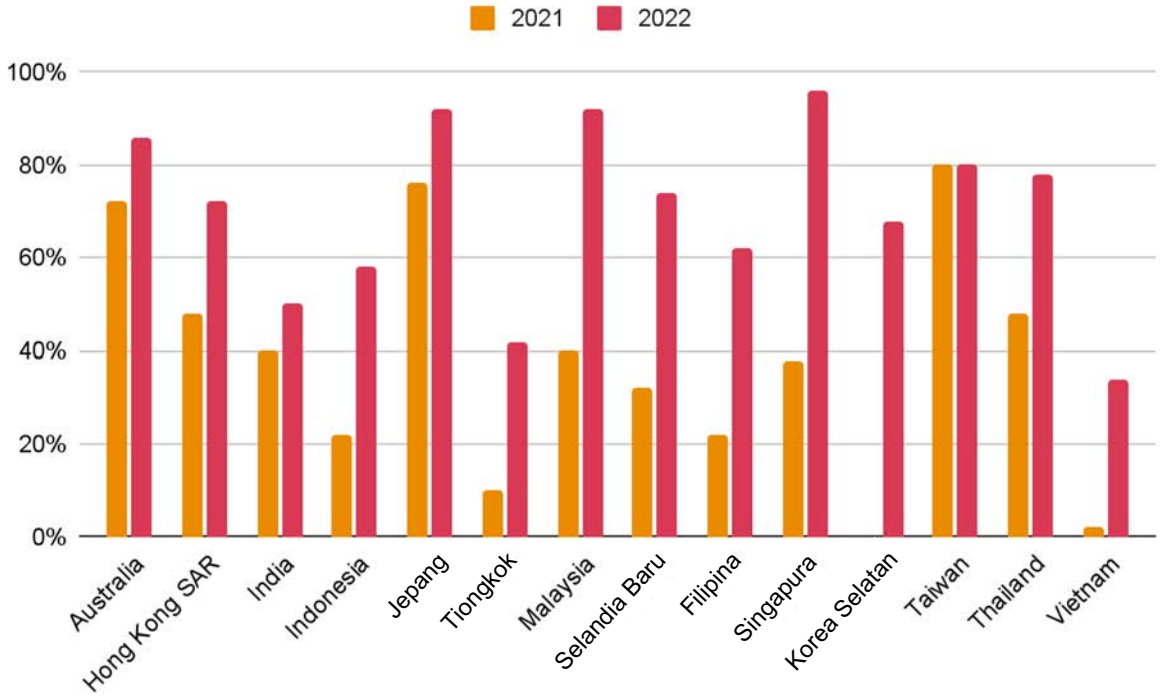

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia.

Mengapa ini penting

Target adalah faktor penting untuk memantau peningkatan dan kemajuan dalam mencapai suatu tujuan, seperti pengurangan intensitas karbon atau emisi yang dibiayai. Dengan adanya target, perusahaan juga dapat mengatasi kekurangan yang diidentifikasi secara tepat waktu dan memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengungkapan target juga membantu memastikan pertanggungjawaban.

Praktik terkini

- Di Asia Pasifik, 70% perusahaan yang dikaji telah mengungkapkan target yang digunakan untuk mengelola risiko dan peluang terkait iklim serta kinerja terhadap target, naik 29% dari 2021.
- 5 yurisdiksi teratas dengan perusahaan yang telah melakukan itu adalah Singapura (96%), Jepang (92%), Malaysia (92%), Australia (86%), dan Taiwan (80%).
- Malaysia dan Singapura mengalami kenaikan lebih dari 50% dari segi perusahaan yang mengungkapkan target yang digunakan untuk mengelola risiko dan peluang terkait iklim serta kinerja terhadap target, dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan ini mungkin berkat penggunaan kerangka kerja TCFD yang meningkat.
- Selain target *net zero*, target terkait iklim yang sering disebutkan termasuk pemanfaatan energi terbarukan 100%, pengurangan penggunaan energi, investasi hijau, pengembangan produk rendah karbon.

Bagan 10: Pengungkapan analisis skenario iklim

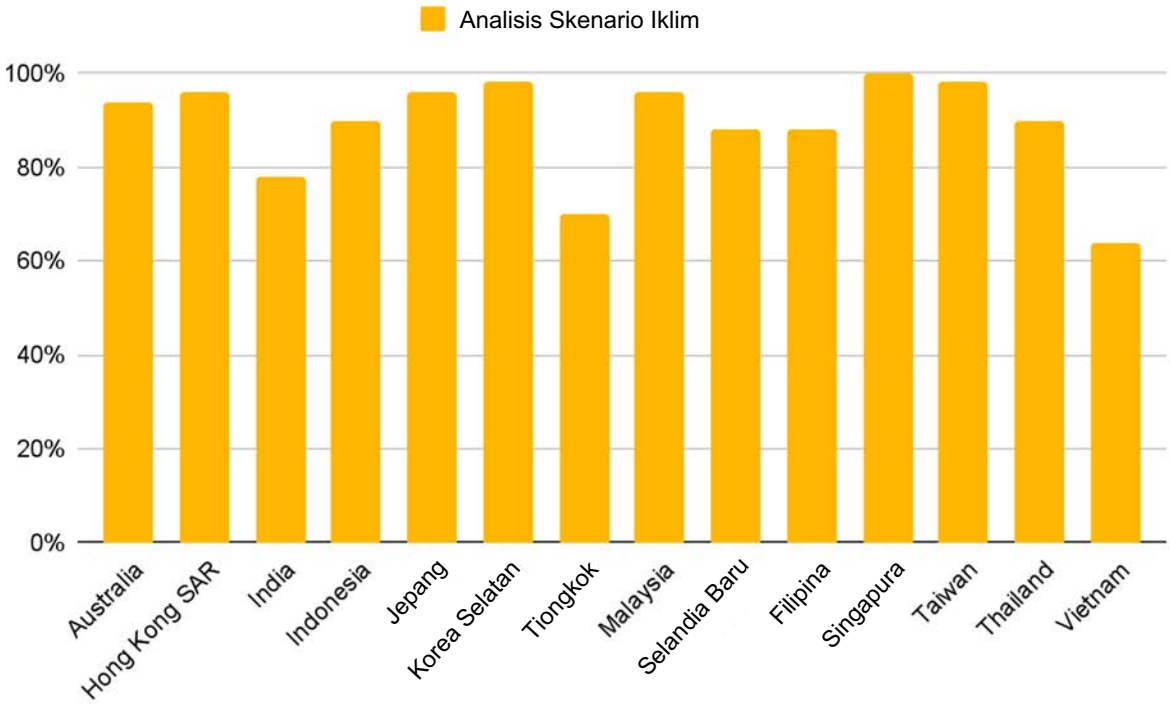

Mengapa ini penting

Skala pengaruh perubahan iklim tidak pasti, sehingga menghadirkan tantangan bagi perusahaan untuk memahami bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi bisnis, strategi, dan kinerja keuangannya. Oleh sebab itu, TCFD merekomendasikan penggunaan analisis skenario iklim untuk mengembangkan rencana strategis yang lebih fleksibel dan kokoh berdasarkan serangkaian *future state* yang mungkin terjadi. Meskipun masih baru, analisis skenario iklim semakin berguna dalam membantu perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk memahami bagaimana potensi risiko dan peluang iklim berkembang dan berdampak terhadap bisnisnya. Skenario-skenario ini bergantung pada estimasi tingkat populasi, kegiatan ekonomi, struktur pemerintahan, nilai-nilai sosial, dan perubahan teknologi di masa depan.

Praktik terkini

- Di Asia Pasifik, 89% perusahaan yang dikaji telah melakukan analisis skenario iklim.
- 100% perusahaan tercatat di Singapura telah melakukan analisis skenario iklim, diikuti oleh perusahaan tercatat di Korea Selatan (98%) dan Taiwan (98%).
- Seiring risiko terkait iklim menjadi komponen penting dalam keseluruhan manajemen risiko perusahaan, diperkirakan bahwa semakin banyak perusahaan akan melakukan analisis skenario iklim untuk memahami risiko iklim dengan lebih baik serta dampaknya terhadap bisnis.

Bagan 11: Pengungkapan emisi GHG Lingkup 1 dan Lingkup 2

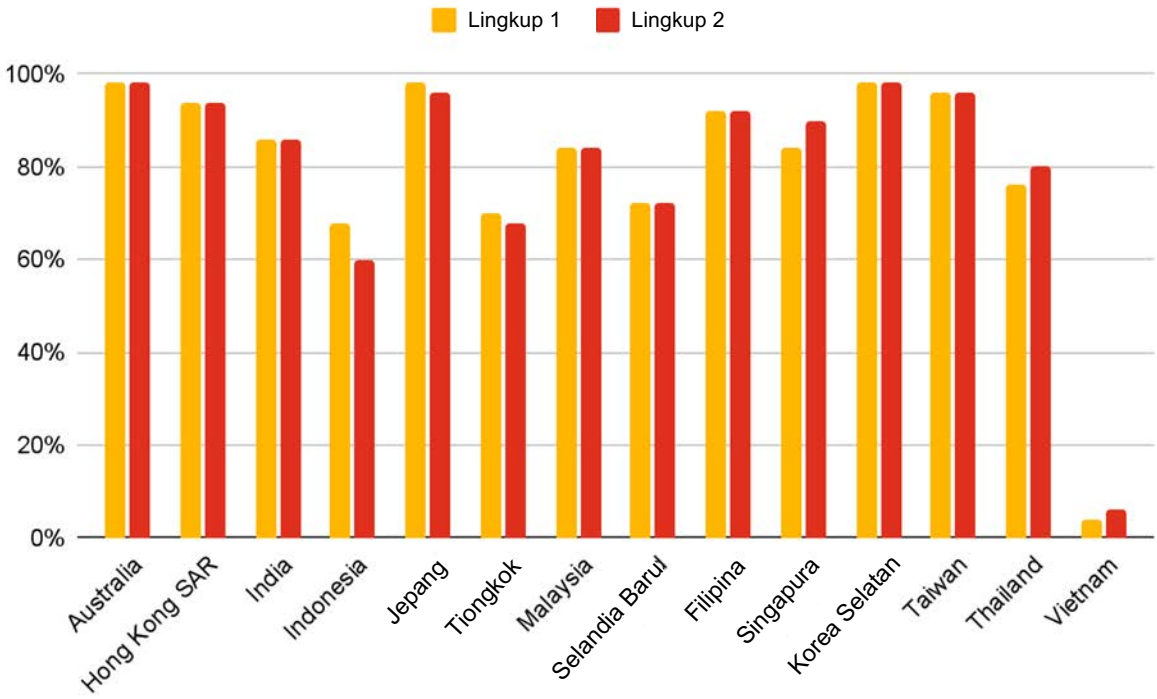

Mengapa ini penting

TCFD telah merekomendasikan pengungkapan emisi gas rumah kaca Lingkup 1, Lingkup 2, dan jika sesuai, Lingkup 3, serta risiko yang terkait. Lingkup 1 mencakup emisi langsung dari perusahaan; Lingkup 2 mencakup emisi tidak langsung dari listrik yang dibeli dan digunakan; dan Lingkup 3 mencakup semua emisi tidak langsung lainnya dari rantai nilai. Emisi Lingkup 3 menghadirkan peluang bagi organisasi untuk mempengaruhi pengurangan GHG dalam rantai nilainya, dan hal ini mungkin merupakan sumber emisi terbesar. Emisi GHG perlu dihitung sesuai dengan metodologi Protokol Gas Rumah Kaca untuk memungkinkan agregasi dan perbandingan antar organisasi dan yurisdiksi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang emisi GHG, organisasi dapat mengarahkan fokusnya pada langkah-langkah penting untuk membantu transisinya menuju *net zero*.

Praktik terkini

- 80% perusahaan yang dikaji mengungkapkan emisi GHG Lingkup 1 dan 2, sementara 50% perusahaan mengungkapkan emisi GHG Lingkup 3. Hal ini konsisten dengan rekomendasi TCFD.
- Lebih dari 50% perusahaan yang dikaji, yang tercatat di Jepang (88%), Korea Selatan (78%), Australia (76%), Taiwan (74%), Selandia Baru (64%), India (62%), dan Thailand (60%) mengungkapkan emisi GHG Lingkup 3.
- Jika dibandingkan antar industri, lebih dari 50% perusahaan yang dinilai dari industri Jasa Komunikasi, (51%), Teknologi Informasi (52%), dan Utilitas (53%) mengungkapkan emisi GHG Lingkup 3.
- Diperkirakan akan terjadi peningkatan pengungkapan emisi GHG Lingkup 3 dengan standar ISSB baru yang diusulkan agar perusahaan mengungkapkan emisi GHG Lingkup 1, Lingkup 2, dan Lingkup 3.

Bagan 12: Tingkat pengungkapan emisi GHG Lingkup 3

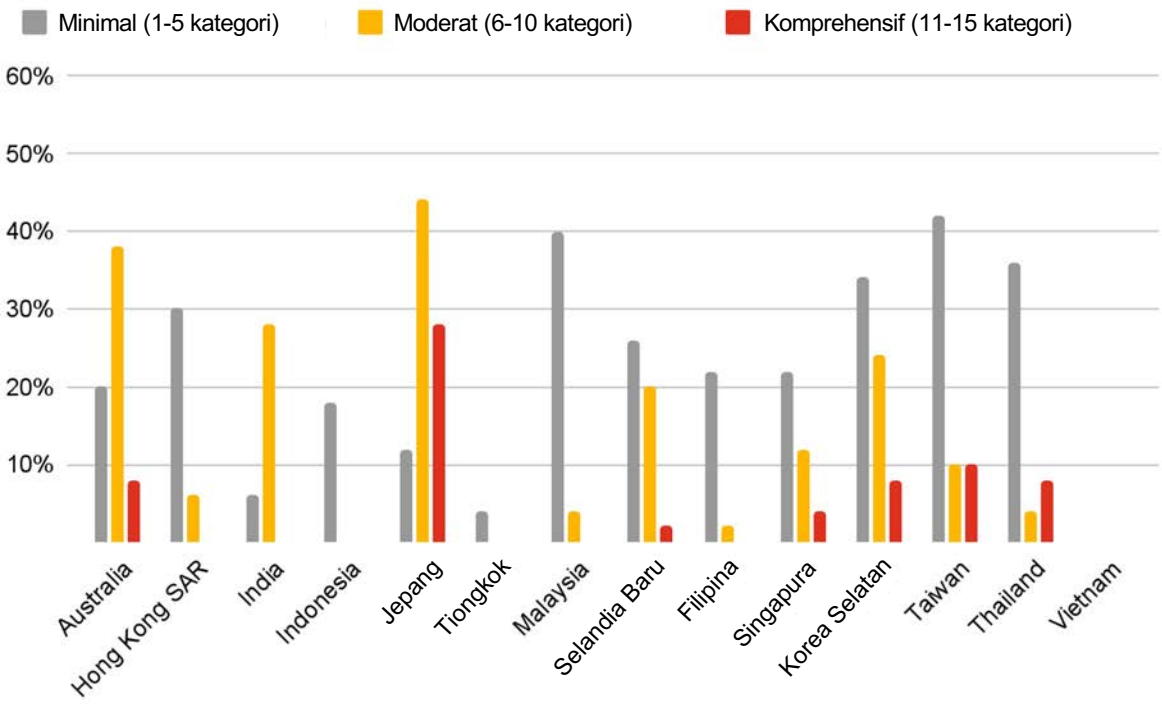

Catatan: Basis untuk "tingkat pengungkapan emisi GHG Lingkup 3" adalah perusahaan yang mengungkapkan GHG Lingkup 3.

Mengapa ini penting

Pada Oktober 2022, ISSB telah mengambil suara secara bulat untuk mewajibkan perusahaan memasukkan pengungkapan emisi GHG Lingkup 3 saat menyempurnakan usulan standar pengungkapan terkait keberlanjutan. Standar baru ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024 dan penerapan lebih awal diperbolehkan. Terdapat keringanan sementara selama satu tahun untuk pelaporan Lingkup 3. Protokol GHG menetapkan 15 kategori emisi Lingkup 3, dengan sumber yang mencakup emisi dari kegiatan hulu dan hilir organisasi. Untuk memenuhi standar Protokol, perusahaan wajib melaporkan emisi dari semua kategori Lingkup 3 yang relevan.

Praktik terkini

- Di antara perusahaan yang mengungkapkan emisi GHG Lingkup 3, 22% menyampaikan pengungkapan tingkat minimal atas perhitungan emisi GHG Lingkup 3; 14 menyampaikan pengungkapan tingkat moderat, dan 5% menyampaikan pengungkapan tingkat komprehensif.
- 18% perusahaan tidak mengungkapkan kategori yang berkontribusi terhadap emisi GHG Lingkup 3, meskipun perusahaan-perusahaan ini mengungkapkan emisi GHG Lingkup 3 secara keseluruhan.
- Pada industri dengan lebih dari 50% perusahaan yang mengungkapkan emisi GHG Lingkup 3 – yaitu industri Layanan Komunikasi, Informasi Teknologi, dan Utilitas – tingkat pengungkapan umumnya minimal.

Tata kelola dan tanggung jawab

Bagan 13: Pengungkapan tanggung jawab Direksi atas keberlanjutan

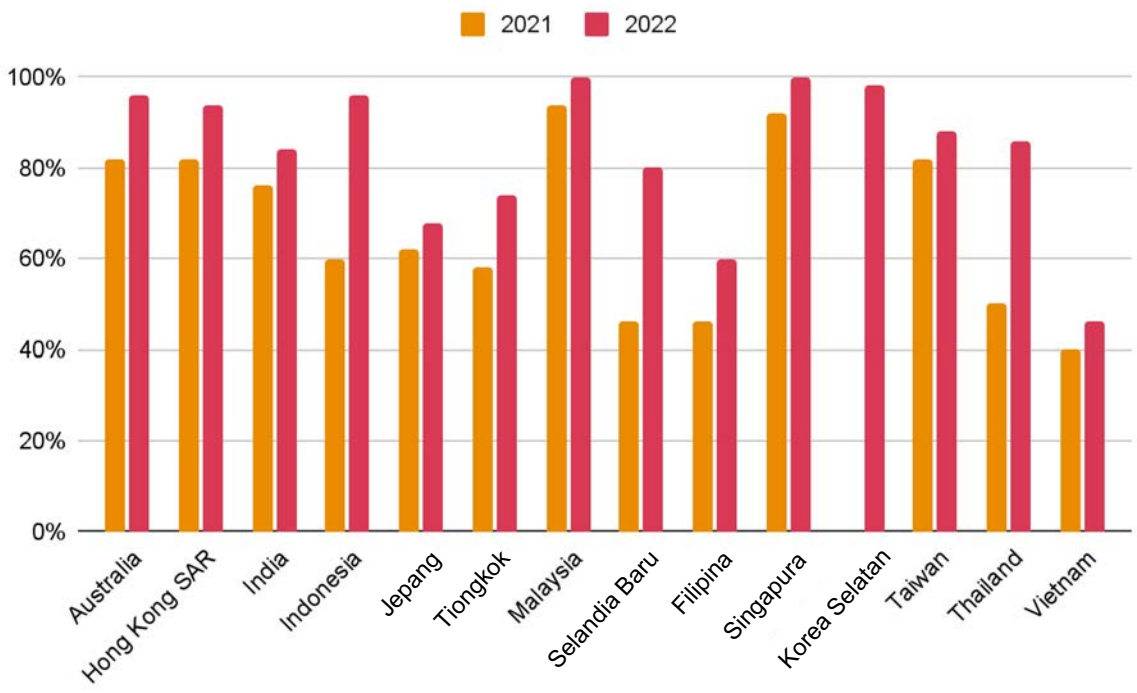

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia.

Bagan 14: Pengungkapan struktur tata kelola keberlanjutan

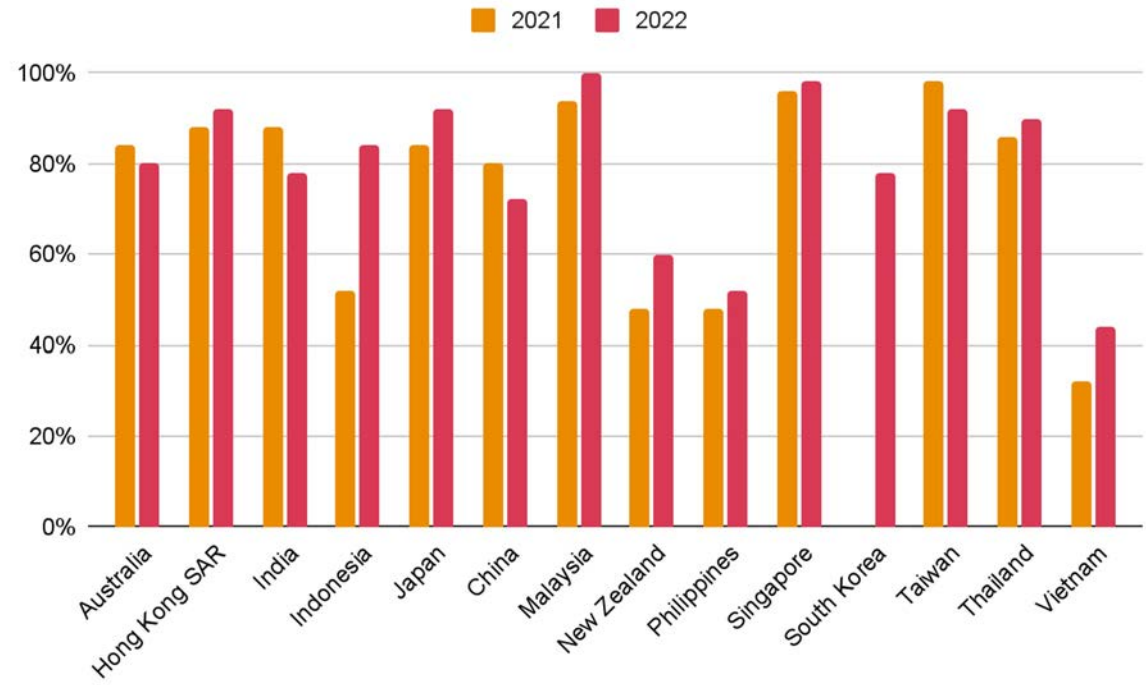

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia.

Mengapa ini penting

Direksi adalah kunci untuk memastikan pengawasan terhadap faktor-faktor ESG dan menanamkan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan dan strategi pertumbuhan jangka panjang sebuah organisasi. Ini memberikan keyakinan bahwa sumber daya yang diperlukan akan dialokasikan untuk memastikan pertimbangan ESG diprioritaskan di seluruh organisasi. Struktur tata kelola keberlanjutan yang sesuai juga merupakan kunci untuk mendukung Manajemen dalam perannya mengawasi tujuan dan strategi keberlanjutan organisasi.

Praktik terkini

- Pada 2022, 84% perusahaan yang dikaji telah mengungkapkan tanggung jawab Direksi atas keberlanjutan. Tingkat pengungkapan untuk 13 yurisdiksi (kecuali Korea Selatan) adalah 82% pada 2022, naik 15% dari 67% pada 2021.
- Pada 2022, 6 yurisdiksi memiliki lebih dari 90% perusahaan yang dikaji mengungkapkan tanggung jawab Direksi atas keberlanjutan: Malaysia (100%), Singapura (100%), Korea Selatan (98%), Australia (96%), Indonesia (96%), dan Hong Kong SAR (94%).
- Terdapat temuan yang menggembirakan bahwa angka pengungkapan tanggung jawab Direksi di semua yurisdiksi di Asia Pasifik mengalami kenaikan dalam periode tahun 2021 hingga 2022, dengan peningkatan yang paling nyata berasal dari Indonesia, Selandia Baru, dan Thailand. Indonesia dan Thailand baru-baru ini mewajibkan pelaporan keberlanjutan/pelaporan kinerja ESG dan mempublikasikan pedoman pelaporan keberlanjutan (2021 untuk Indonesia, 2022 untuk Thailand). Peningkatan pengungkapan oleh Selandia Baru selaras dengan peningkatan kematangan pelaporan keberlanjutannya. Meskipun peningkatan tersebut tidak dapat ditelusuri ke satu alasan karena ketentuan pelaporan keberlanjutan tidak mencakup komponen pelaporan tertentu, regulasi dan pedoman tersebut dapat memengaruhi peningkatan pengungkapan.
- Di Asia Pasifik, 79% perusahaan mengungkapkan struktur tata kelola keberlanjutannya.
- 5 yurisdiksi teratas dengan lebih dari 90% perusahaan yang dikaji mengungkapkan struktur tata kelola keberlanjutan: Malaysia (100%), Singapura (98%), Hong Kong SAR (92%), Jepang (92%), dan Taiwan (92%).
- Indonesia memiliki kenaikan terbesar dalam jumlah perusahaan yang mengungkapkan struktur tata kelola keberlanjutannya, dari 52% pada 2021 menjadi 84% pada 2022; diikuti oleh Selandia Baru dan Vietnam dengan kenaikan masing-masing 12%.
- Australia, India, Tiongkok, dan Taiwan mengalami sedikit penurunan (kurang dari 10%) dalam jumlah perusahaan yang mengungkapkan struktur tata kelola keberlanjutannya.

Bagan 15: Pengungkapan Direksi/manajemen dengan pelatihan keberlanjutan

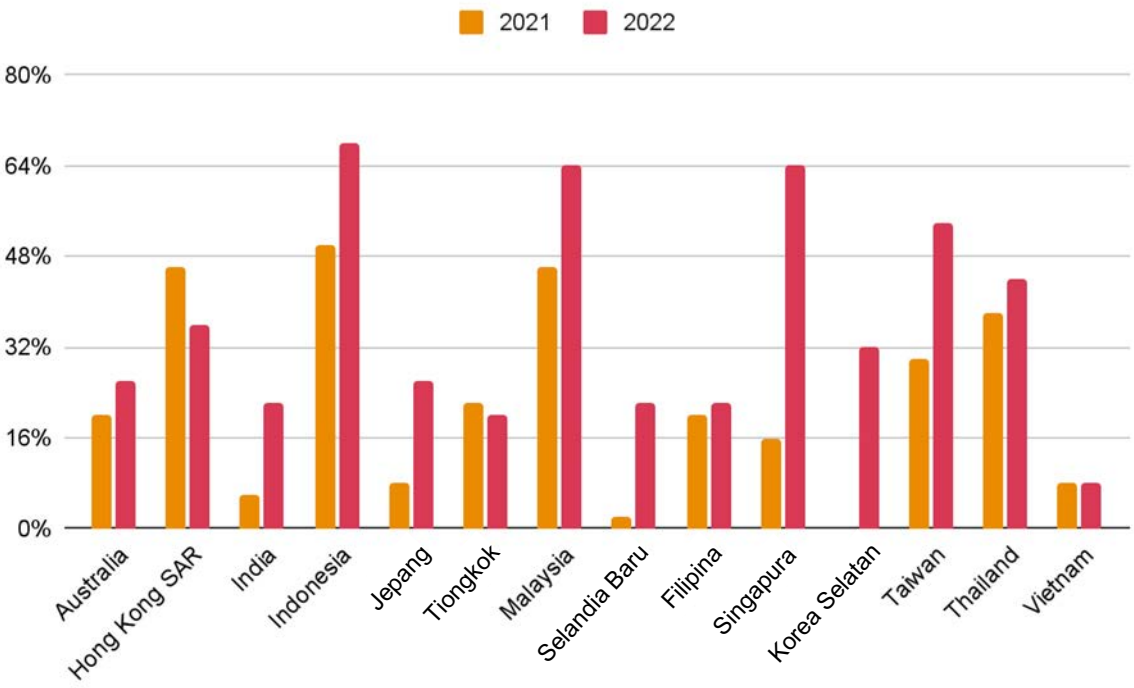

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia.

Mengapa ini penting

Peningkatan keterampilan Direksi penting bagi mereka agar dapat melaksanakan perannya secara efektif dalam mengawasi kemajuan keberlanjutan perusahaan dan mengarahkan strategi jangka panjang serta tata kelola perusahaan. Selain itu, memasukkan keberlanjutan ke dalam remunerasi terkait kinerja bagi eksekutif dapat menjadi strategi yang efektif untuk memberi insentif kepada eksekutif puncak untuk mendorong keselarasan target keberlanjutan di seluruh perusahaan.

Praktik terkini

- Pada 2022, hanya 36% dari Direksi atau manajemen perusahaan yang dikaji pernah mengikuti atau menerima pelatihan keberlanjutan. Tingkat pengungkapan untuk 13 yurisdiksi (kecuali Korea Selatan) adalah 37% pada 2022, naik 13% dari 24% pada 2021. Masih ada ruang untuk peningkatan dalam pelatihan keberlanjutan bagi Direksi atau manajemen.

- Pada 2022, Indonesia (68%), Malaysia (64%), Singapura (64%), Taiwan (54%), dan Thailand (44%) mencapai angka di atas rata-rata dalam jumlah perusahaan dengan Direksi atau manajemen yang pernah mengikuti atau menerima pelatihan tentang keberlanjutan.

- Patut dicatat bahwa terjadi peningkatan drastis – dari 16% pada 2021 menjadi 64% pada 2022 – untuk perusahaan tercatat di Singapura, dalam hal tingkat pengungkapan Direksi atau manajemen yang pernah mengikuti atau menerima pelatihan keberlanjutan. Ini mungkin terjadi akibat adanya ketentuan wajib SGX bahwa perusahaan wajib memberikan konfirmasi dalam laporan keberlanjutannya bahwa para direkturnya telah mengikuti pelatihan keberlanjutan.

Bagan 16: Pengungkapan remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja keberlanjutan

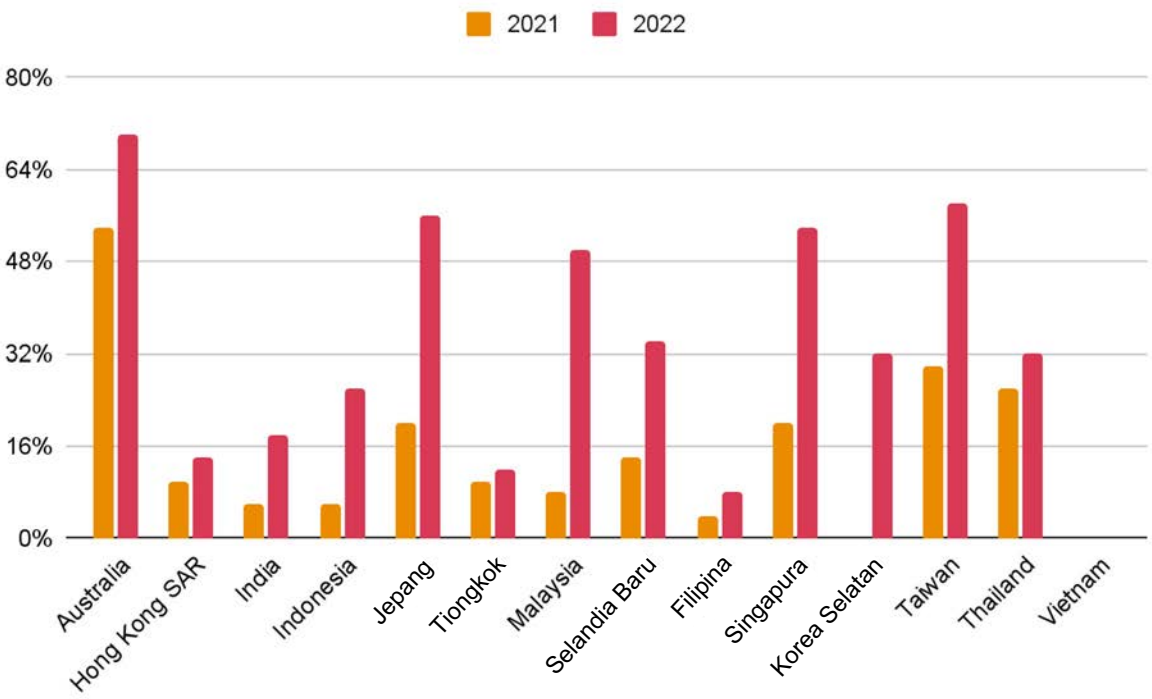

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia.

Mengapa ini penting

Keterkaitan kinerja ESG dengan remunerasi eksekutif menyelaraskan kinerja dan perilaku keberlanjutan dengan target keberlanjutan.

Praktik terkini

- Pada 2022, 33% perusahaan yang dikaji telah mengungkapkan keterkaitan remunerasi eksekutif puncak dengan kinerja keberlanjutannya. Tingkat pengungkapan untuk 13 yurisdiksi (kecuali Korea selatan) juga sebesar 33% pada 2022, naik 17% dari 16% pada 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa ada semakin banyak perusahaan yang menganggap keberlanjutan sebagai komponen penting ketika menentukan remunerasi eksekutif.
- Pada 2022, mayoritas perusahaan dari Australia (70%), Taiwan (58%), Jepang (56%), Singapura (54%), dan Malaysia (50%) telah mengaitkan kinerja keberlanjutan dengan remunerasi eksekutif puncaknya.
- Patut dicatat pula bahwa terjadi peningkatan drastis – dari 8% pada 2021 menjadi 50% pada 2022 – untuk perusahaan tercatat di Malaysia, dalam hal pengungkapan remunerasi eksekutif yang dikaitkan dengan kinerja keberlanjutan.

Bagan 17: Pengungkapan aspek keberagaman manajemen

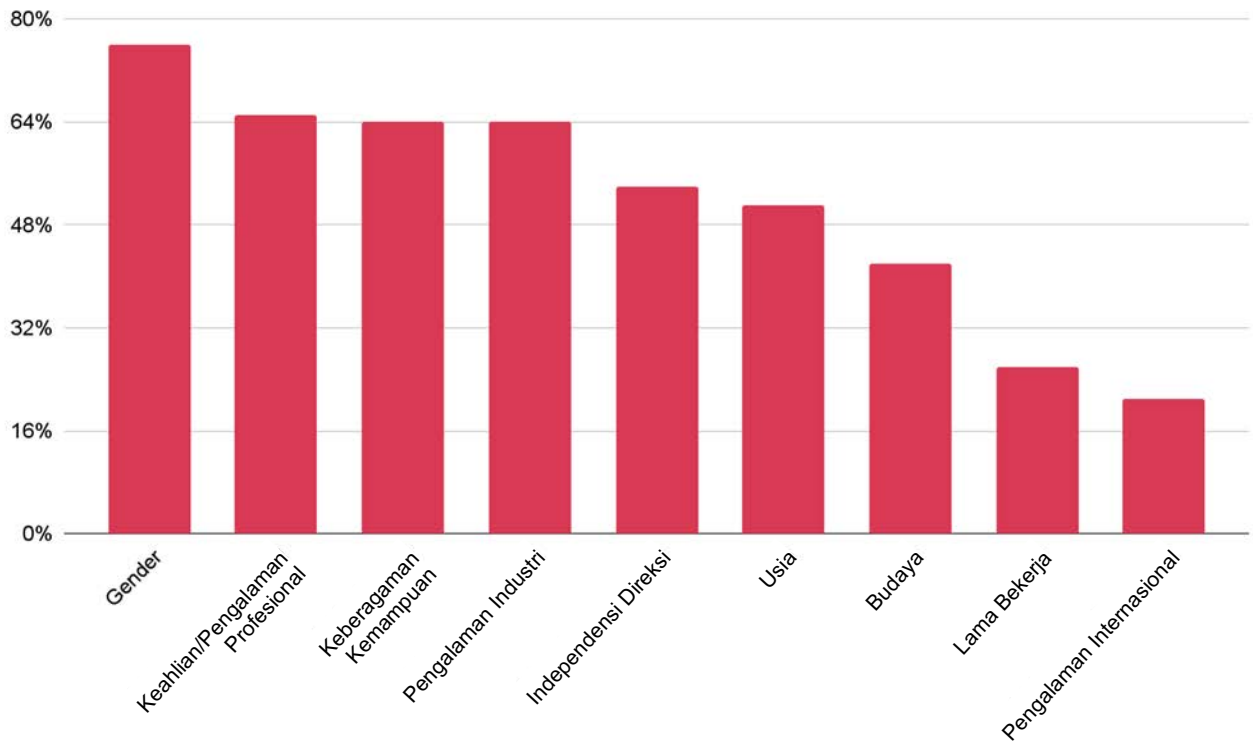

Mengapa ini penting

Komposisi manajemen yang beragam memberikan cakupan aspek demografi yang luas di dalam manajemen. Hal itu meningkatkan efisiensi manajemen secara signifikan dan mendukung perspektif yang segar dan holistik. Meskipun saat ini tidak ada kewajiban untuk meningkatkan keberagaman dalam manajemen perusahaan di Asia Pasifik, hal itu sudah lazim di yurisdiksi lain seperti Norwegia dan Prancis yang memiliki hukum yang mewajibkan perempuan mengisi minimal 40% posisi manajemen di perusahaan terbuka. Selain keberagaman gender, studi ini juga mempelajari keberagaman sosial dan keberagaman profesional, yang sama pentingnya. Keberagaman sosial mencakup gender, umur, keberagaman budaya, dan keberagaman profesional. Ini juga mencakup keahlian, pengalaman industri, independensi manajemen, masa jabatan, dan pengalaman internasional.

Praktik terkini

- Di Asia Pasifik, 78% perusahaan yang dikaji mengungkapkan bahwa mereka menjaga setidaknya satu aspek keberagaman dalam direksi.
- Komposisi keberagaman mengungkapkan bahwa keberagaman gender (76%) sangat diperhatikan dalam perusahaan-perusahaan yang dikaji, diikuti oleh keberagaman keahlian/profesional (65%), pengalaman industri (64%), dan keterampilan (64%).

Membangun kepercayaan

Bagan 18: Pengungkapan lingkup pelaporan

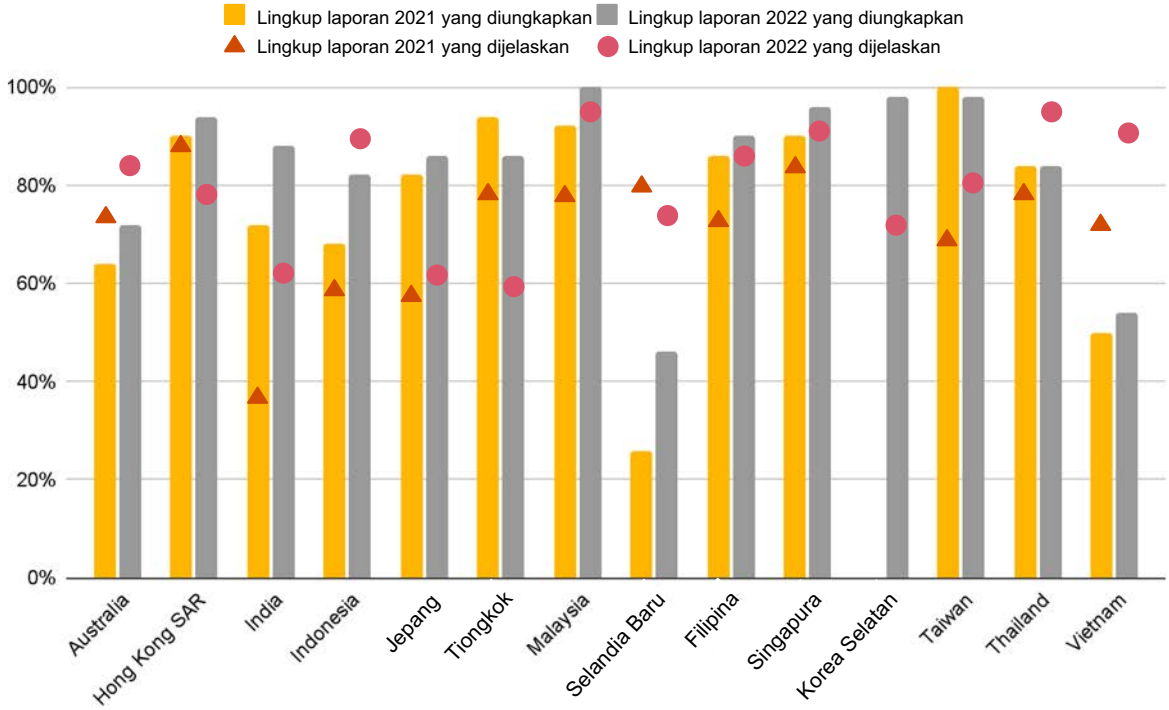

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia; basis untuk "Lingkup laporan yang diungkapkan" adalah semua perusahaan; basis untuk "Lingkup laporan yang dijelaskan" adalah perusahaan yang mengungkapkan lingkup laporan

Mengapa ini penting

Pengungkapan lingkup pelaporan memberikan transparansi tentang apa yang termasuk dalam laporan keberlanjutan dan menekankan batasannya. Hal ini mencakup apakah laporan keberlanjutan menyatakan cakupan lokasi operasional, kegiatan industri, aset industri, dan apakah laporan menjelaskan bagaimana lingkup tersebut ditentukan. Informasi tersebut penting mengingat berkembangnya kematangan pelaporan keberlanjutan dan juga untuk memberikan konteks lebih baik bagi pembaca dan pemangku kepentingan.

Praktik terkini

- Di seluruh Asia Pasifik, 84% perusahaan yang dikaji telah mengungkapkan lingkup laporannya. Sebanyak 71% perusahaan yang dikaji menjelaskan lingkup laporannya lebih lanjut.
- 5 yurisdiksi teratas dengan pengungkapan lingkup pelaporan adalah Malaysia (100%), Korea Selatan (98%), Taiwan (98%), Singapura (96%), dan Hong Kong SAR (94%).

Bagan 19: Pengungkapan *internal review/assurance*

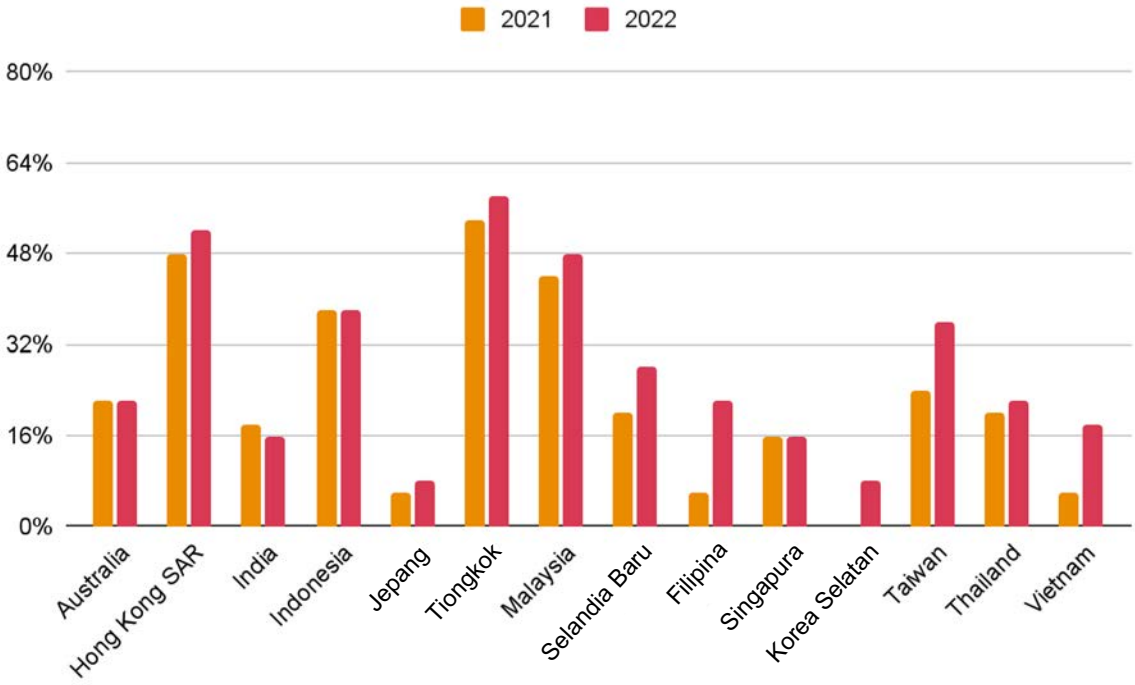

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia

Bagan 20: Pengungkapan *external assurance*

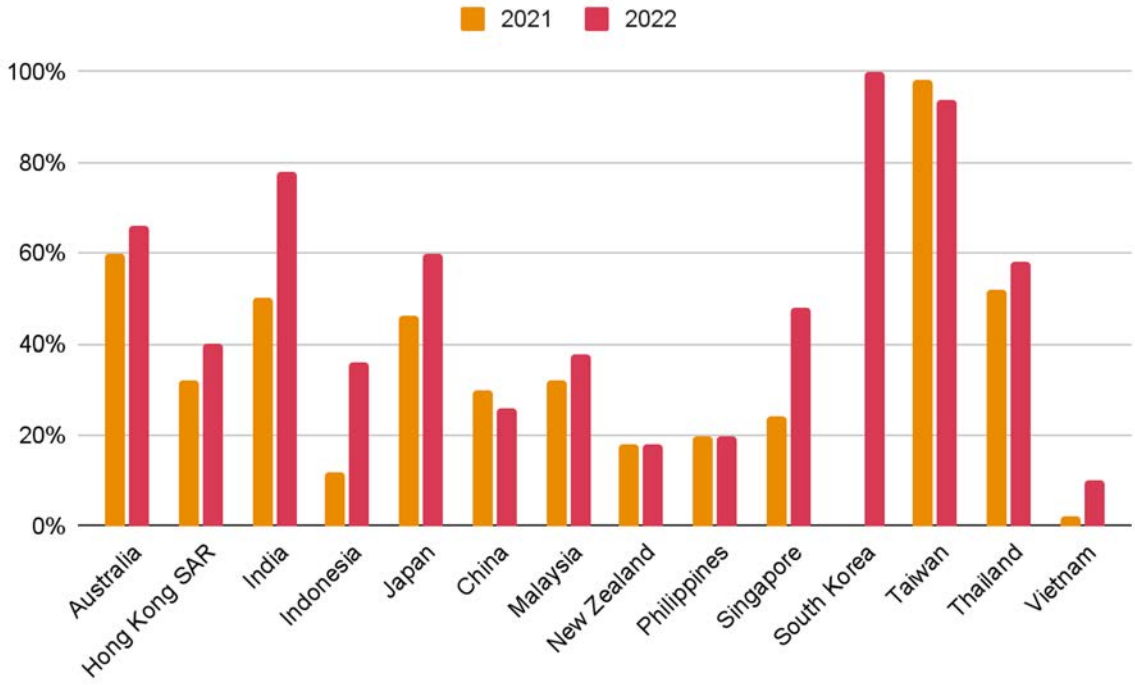

Catatan: Data tahun 2021 untuk Korea Selatan tidak tersedia

Mengapa ini penting

Assurance pelaporan keberlanjutan adalah faktor esensial untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas laporan yang dipublikasikan yang membangun kepercayaan terhadap pengungkapan ESG dan meningkatkan keyakinan antara pemangku kepentingan dan organisasi. *Assurance* juga dapat mencegah risiko yang berkaitan dengan pengungkapan yang tidak akurat, yang dapat mengakibatkan denda atau sanksi keuangan dan nonkeuangan atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengungkapan dari yurisdiksi masing-masing. *Assurance* juga memberikan keyakinan kepada manajemen dan pemangku kepentingan terhadap kinerja organisasi selama periode pelaporan.

Praktik terkini

- *Internal review/assurance* - perusahaan dianggap memiliki *internal review/assurance* jika laporannya mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah ditinjau secara internal dan disetujui oleh anggota manajemen, komite keberlanjutan perusahaan dan/atau auditor internal:
    - Pada 2022, 28% perusahaan di Asia Pasifik telah melakukan *internal assurance*, di mana Tiongkok menunjukkan tingkat *internal assurance* tertinggi (58%).
    - Tingkat *internal assurance* untuk 13 yurisdiksi (kecuali Korea Selatan) adalah 30% pada 2022, naik 5% dari 25% pada 2021.
- *External assurance* - perusahaan dianggap memiliki *external assurance* jika laporannya mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah dijamin oleh penyedia jasa *assurance* independen:
    - Pada 2022, 49% perusahaan yang dikaji telah melakukan *external assurance*, di mana tingkat *external assurance* tertinggi (100%) dicapai oleh Korea Selatan.
    - Tingkat *external assurance* untuk 13 yurisdiksi (kecuali Korea Selatan) adalah 46% pada 2022, naik 9% dari 2021 (37%), mengindikasikan bahwa semakin banyak perusahaan melakukan *external assurance* untuk membangun kredibilitasnya.
    - Meskipun ketentuan KRX mengenai pelaporan keberlanjutan untuk perusahaan berukuran tertentu baru akan berlaku mulai 2025, cukup menggembirakan untuk melihat bahwa semua perusahaan tercatat Korea Selatan dalam kajian kami melakukan upaya lebih, yaitu dengan melakukan *external assurance* terhadap laporan keberlanjutannya. Hal ini dapat dipahami dari sudut pandang konsumen dan pemangku kepentingan di mana produk dan bisnis yang berkelanjutan mendapat perhatian lebih dan perusahaan meningkatkan transparansi dan kualitas pengungkapan keberlanjutannya.

Bagan 21: Pengungkapan tingkat *external assurance* dan kerangka kerja yang digunakan untuk *external assurance*

Pengungkapan tingkat *assurance*		
Yurisdiksi	***Assurance* tingkat rendah**	***Assurance* tingkat tinggi**
Keseluruhan	69%	10%
Australia	84%	16%
Hong Kong SAR	70%	30%
India	45%	12%
Indonesia	57%	0%
Jepang	97%	0%
Tiongkok	92%	0%
Malaysia	69%	0%
Selandia Baru	57%	0%
Filipina	91%	0%
Singapura	96%	4%
Korea Selatan	60%	8%
Taiwan	57%	26%
Thailand	73%	3%
Vietnam	57%	29%

0 hingga 25% perusahaan | **25% hingga 50% perusahaan** | **50% hingga 75% perusahaan** | **>75% perusahaan**

Catatan: Basis untuk "tingkat *assurance*" adalah perusahaan yang telah mendapat *external assurance*.

Assurance tingkat rendah mencakup *limited assurance* berdasarkan *International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised), Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information* (ISAE 3000), *International Standard on Assurance Engagements 3410, Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements* (ISAE 3410) atau *ISO 14064-3:2019 Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements* (ISO 14064-3) dan *moderate assurance* berdasarkan *AA1000 Assurance Standard* (AA1000AS). Dalam hal ini, *assurance* tingkat rendah memberikan tingkat keyakinan yang lebih rendah kepada pengguna. Prosedur yang dilakukan bervariasi sifat dan waktunya, dan jangkauannya lebih kecil, dibandingkan dengan perikatan *reasonable assurance* atau *high assurance*.

Assurance tingkat tinggi mencakup *reasonable assurance* berdasarkan ISAE 3000, ISAE 3410 atau ISO 14064-3 dan *high assurance* berdasarkan AA1000AS. Dalam hal ini, *assurance* tingkat tinggi memberikan tingkat keyakinan yang relatif lebih tinggi kepada pengguna, tetapi bukan *assurance* tingkat mutlak. Tingkat ini setara dengan audit laporan keuangan. *Assurance* jenis ini memerlukan prosedur dengan sifat dan jangkauan yang berbeda, dan memerlukan pemahaman yang lebih terperinci tentang proses-proses dan pengendalian yang mendasarinya.

Mengapa ini penting

Bagi perusahaan yang memiliki *external assurance*, sebagian mungkin memilih tingkat *assurance* yang berbeda untuk aspek-aspek berbeda dari informasi ESG perusahaan. Menurut Survei Investor Global 2022 PwC, para investor menghargai *assurance* sebagai cara untuk memberikan mereka keyakinan terhadap pelaporan keberlanjutan perusahaan. Yang menempati posisi teratas dalam daftar mereka adalah *reasonable assurance*, yang memiliki tingkat yang sama dengan audit laporan keuangan. Terdapat pula ekspektasi yang semakin tinggi dari regulator, seperti di EU dan Amerika Serikat, agar organisasi mendapatkan *assurance* "tingkat tinggi".

Praktik terkini

- Di Asia Pasifik, tingkat *assurance* yang paling umum adalah *limited assurance*, diikuti oleh *moderate assurance*.
- Kerangka kerja *assurance* yang umum digunakan termasuk: ISAE 3000, ISAE 3410, AA1000AS, dan ISO 14064-3.

Pandangan para pemimpin: Melampaui aspek kepatuhan

Perjalanan pelaporan keberlanjutan di Westports dimulai dengan permintaan para investor kami. Kami memperhatikan bahwa pemangku kepentingan, termasuk investor, memainkan peran penting sebagai salah satu faktor penggerak bagi perusahaan untuk memulai langkah-langkah keberlanjutan termasuk pelaporan keberlanjutan dan iklim. Banyak perusahaan secara umum telah melakukan kegiatan terkait keberlanjutan seperti kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi kegiatan tersebut tidak dilaporkan secara formal. Oleh sebab itu, ketika Westports memulai perjalanan pelaporan keberlanjutan kami sendiri, cukup mengejutkan bahwa ternyata kami secara umum sudah selaras dengan banyak *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagai operator pelabuhan, kami sadar bahwa Westports tidak aman dari perubahan iklim. Kerangka kerja TCFD merupakan alat yang berguna untuk membantu perusahaan menganalisis risiko dan peluang iklim terhadap bisnisnya. Analisis skenario iklim mungkin rumit dan karena itulah penting bagi perusahaan untuk bersikap transparan terkait asumsi yang dimasukkan ke dalam perhitungan. Komunikasi dan narasi yang jelas adalah kunci untuk membantu pemangku kepentingan memahami bagaimana analisisnya mungkin berubah jika seperangkat asumsi yang lain diterapkan.

Dengan berbagai standar dan kerangka kerja yang tersedia, laporan keberlanjutan cenderung panjang. Seiring kemunculan tren di mana alat kecerdasan buatan (AI) kini mampu menganalisis laporan keberlanjutan, maka lebih dari sekadar membahas ketentuan GRI, kami merangkum metrik keberlanjutan yang menonjol di awal laporan keberlanjutan. Kami merasa bahwa rangkuman tersebut akan memungkinkan analisis yang lebih baik oleh alat AI dan pengguna laporan keberlanjutan.

Sementara standar pelaporan keberlanjutan bermunculan dan kian matang, lapisan perantara antara perusahaan dan pemangku kepentingan adalah lembaga pemeringkat. Kami memperhatikan bahwa secara umum terdapat pengandalan yang kuat pada peringkat ESG. Cara lembaga pemeringkat ESG menilai standar dan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan (termasuk kualitas data) dalam hal metodologi penilaiannya sangat penting, sebab investor dan para pemangku kepentingan lain dapat mengandalkan hal itu.

Pelaporan dan pemeringkatan keberlanjutan harus melampaui aspek kepatuhan – hal-hal ini harus menjadi sarana untuk meningkatkan bisnis dan operasi perusahaan secara holistik.

Shamsul Afif Bin Abdul Waris
Special Officer to the Group Managing Director

Chang Kong Meng
Head of Investor Relations
Westports Holdings

05

Menghadapi tantangan pelaporan keberlanjutan

Pandangan seorang pemimpin: Memprioritaskan pelaporan keberlanjutan dan menumbuhkan budaya yang mendukung berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait keberlanjutan lintas entitas

Pelaporan keberlanjutan bukan sekadar menyelesaikan suatu tugas dalam sebuah daftar. Dalam menilai dan memberi peringkat pada isu-isu ESG kami yang signifikan, penting untuk melibatkan para pemangku kepentingan utama kami untuk secara aktif memahami perhatian, prioritas, dan harapan mereka dalam isu-isu ESG serta pandangan mereka tentang kinerja kami. Memiliki pengungkapan yang transparan dalam laporan keberlanjutan kami berguna untuk membantu para pemangku kepentingan dalam memahami risiko keberlanjutan utama kami dan memantau kemajuan kami dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Terdapat tuntutan yang terus berkembang dari para pemangku kepentingan atas pelaporan informasi keberlanjutan perusahaan yang lebih transparan dan dapat dibandingkan. Dengan menerapkan standar dan kerangka kerja keberlanjutan seperti GRI, TCFD, dan SDGs, kami memastikan pelaporan keberlanjutan kami sejalan dengan standar dan kerangka kerja yang diakui secara internasional, dan hal ini juga membantu memfasilitasi perbandingan oleh para pemangku kepentingan. Dalam menghadapi perubahan iklim, kami menyadari pentingnya mengidentifikasi risiko dan peluang terkait iklim serta kemungkinan dampaknya terhadap perencanaan bisnis, strategi, dan keuangan kami. Kami memasukkan analisis ini ke dalam laporan TCFD pertama kami yang diterbitkan tahun ini, dengan tujuan akhir untuk menumbuhkan kemampuan menghadapi isu-isu iklim dalam jangka panjang dan meningkatkan ketahanan iklim serta mengajak semua sektor untuk bekerja sama dalam memajukan netralitas karbon.

Untuk memperkuat manajemen pembangunan berkelanjutan dan membuat tolok ukur terhadap standar internasional, Fosun juga bergabung dengan UN Global Compact pada 2014, sepenuhnya mendukung sepuluh prinsip UN Global Compact dan secara berkesinambungan mempromosikan integrasi eratnya dengan strategi ESG-nya sendiri dan secara aktif melibatkan perusahaan-perusahaan anggotanya dalam penerapan strategi ESG.

Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah perlunya mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan pelaporan yang berbeda karena kami hadir di berbagai negara/wilayah seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa. Membangun kapabilitas ESG dan meningkatkan keterampilan karyawan sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan terus mengikuti perkembangan terbaru dalam pelaporan keberlanjutan pada skala lokal maupun global. Kami menjalankan berbagai inisiatif keberlanjutan seperti meluncurkan pekan budaya ESG dan menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kemampuan ESG kami. Kami juga mengadakan sesi jaringan global ESG dengan sesama rekan industri kami yang lebih maju di Eropa dan Inggris, dan pertukaran informasi ini membantu kami untuk memahami tren pelaporan ESG terbaru secara global dan menciptakan peluang berbagi lintas entitas.

Seiring perkembangan pesat pelaporan keberlanjutan dengan kemungkinan ketentuan yang akan terus bertambah, sangat penting bagi perusahaan untuk bersiap lebih awal serta menetapkan rencana dan tindakan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Memprioritaskan ESG penting dalam menumbuhkan budaya di mana orang-orang berkomitmen terhadap upaya ESG. Kami menerapkan mekanisme *top-down* di mana Manajemen bertanggung jawab atas ESG. Kami juga telah membentuk Komite Dewan ESG dan Komite Eksekutif ESG pada tingkat tata kelola dan pengambilan keputusan secara terpisah untuk membantu Manajemen dalam memandu dan mengawasi perkembangan dan penerapan ESG oleh Grup. Penting juga untuk memastikan bahwa para anggota dewan dan direktur mengikuti tren ESG dan perkembangan pelaporan keberlanjutan secara tepat waktu. Selain itu, kami telah membentuk Komite Manajemen ESG dan Kelompok Kerja ESG untuk berbagi praktik-praktik terbaik dan membuat saluran komunikasi yang terbuka antarperusahaan di dalam Grup.

Perusahaan dapat menuai manfaat dari peluang dan komitmennya untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keberlanjutannya. Peringkat ESG merupakan pertimbangan utama bagi investor saat menilai keputusan investasinya. Kami memastikan bahwa kami memiliki pengungkapan yang sesuai dan dapat dibuktikan untuk memenuhi ekspektasi lembaga-lembaga pemeringkat ESG arus utama. *External assurance* juga dapat meningkatkan kredibilitas dan menambah kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi keberlanjutan yang dilaporkan.

Angel Sze
Company Secretary & Head of ESG Management Committee
Fosun International Limited

Tantangan pelaporan keberlanjutan

Dengan semakin besarnya tuntutan akan informasi, perusahaan senantiasa ditantang untuk mencapai pelaporan seimbang yang memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Pelaporan yang seimbang akan membekali manajemen dan pemangku kepentingan dengan informasi yang dibutuhkan untuk mengalokasikan modal dan membuat pilihan.

Tidak seperti pelaporan keuangan, yang perkembangannya telah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu, pelaporan ESG masih sangat baru. Perusahaan dihadapkan dengan lanskap pelaporan ESG yang berubah dengan cepat dengan banyak komponen pendukung seiring mulai terbentuknya standar dan kerangka kerja serta hukum dan regulasi yang melingkupinya. Bab ini akan membahas tantangan pelaporan ESG yang sering dihadapi perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat menanganinya.

Tantangan utama

Pencarian standar pelaporan yang selaras secara global dan *interoperability*

Salah satu tantangan terbesar pelaporan ESG adalah kurangnya standardisasi. Tidak ada standar atau kerangka kerja pelaporan yang diterima secara universal, dan perusahaan dapat menggunakan metrik dan indikator yang berbeda-beda untuk melaporkan kinerja ESG-nya. Kurangnya konsensus ini menghadirkan tantangan bagi perusahaan yang berupaya menyusun dan melaporkan kinerja keberlanjutannya serta bagi investor yang berupaya memahami informasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Hasilnya? Perusahaan melaporkan lebih banyak informasi, tetapi investor masih meminta ‘lebih’.

Meskipun konsolidasi kerangka kerja dan standar telah mulai dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan pelaporan akan terus berlanjut jika standar tersebut tidak memiliki *interoperability*, atau tidak dapat bekerja bersama-sama. Tanpa *interoperability*, tujuan bersama untuk dapat membandingkan kinerja organisasi lintas batas tidak akan tercapai.

Pengumpulan dan validasi data

Mengumpulkan dan memvalidasi data ESG dapat menjadi tantangan bagi perusahaan. Tidak seperti data keuangan, pengumpulan data ESG masih kurang mapan dan seringkali tidak tersedia dengan segera. Perusahaan mungkin harus mengumpulkan data tersebut dari beberapa sumber termasuk dari rantai pasok. Secara internal, data ESG sering dimiliki bukan oleh pemilik data keuangan yang lazim, dan mereka mungkin kurang akrab dengan pelaporan berkala yang rutin seperti yang dilakukan oleh pemilik data keuangan. Tantangan pelaporan internal semakin diperberat dengan tingkat kematangan pelaporan ESG yang berbeda-beda dalam ekosistem rantai pasok, satu hambatan besar yang sering dihadapi perusahaan dalam memperoleh informasi yang relevan.

Selain itu, upaya untuk memvalidasi keakuratan dan kelengkapan data tersebut bisa menjadi pekerjaan yang sulit, memakan waktu, dan membutuhkan banyak sumber daya.

Integrasi dengan strategi bisnis

Pelaporan ESG perlu diintegrasikan ke dalam strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan untuk memastikan keselarasannya dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Namun, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan integrasi ini. Hal ini acapkali merupakan akibat penetapan ‘warna’ perusahaan oleh pucuk pimpinan (*tone at the top*). Jika tidak ada kesediaan atau komitmen yang memadai dari manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pelaporan ESG mungkin akan dipandang sebagai inisiatif yang terpisah dari strategi bisnis inti.

Pendekatan PwC

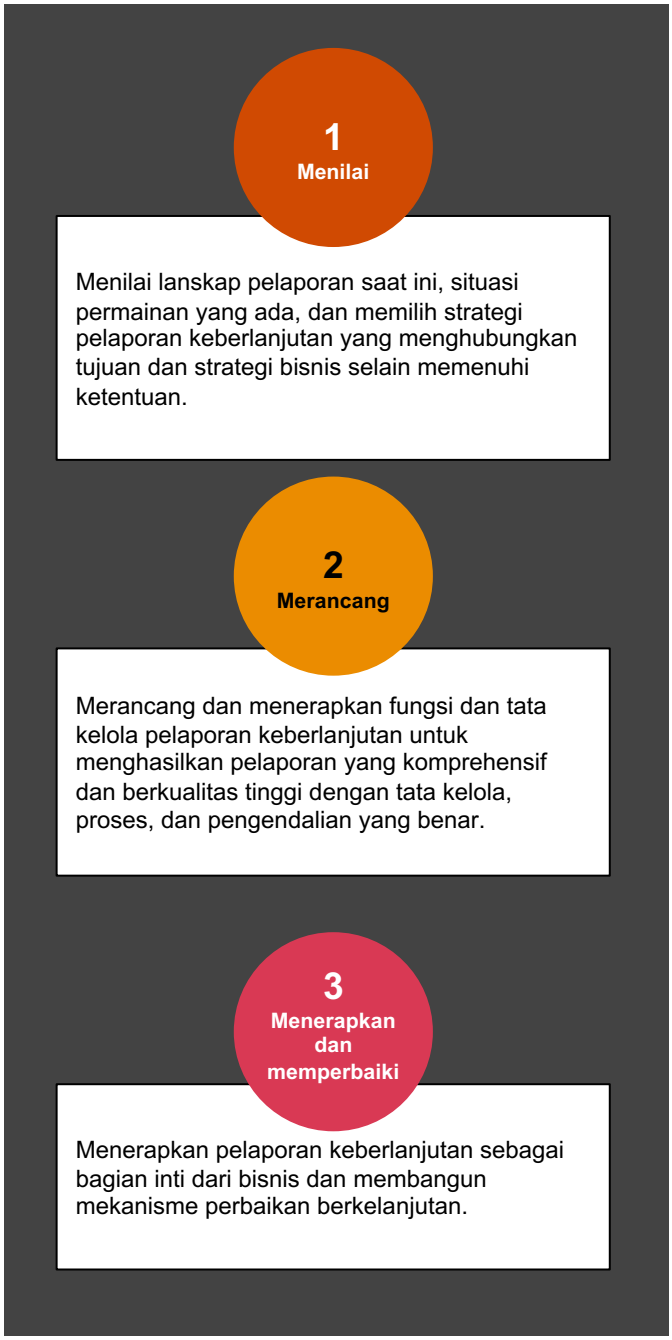

Pendekatan PwC

Kerangka kerja PwC untuk merancang atau memperbaiki fungsi pelaporan keberlanjutan dan memasukkan data, pengendalian, dan sistem yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi dan bermanfaat ke dalam bisnis.

Fase 1: Menilai		Fase 2: Merancang		Fase 3: Menerapkan dan memperbaiki	
Memahami ambisi dan ketentuan pelaporan ESG • Memahami **tujuan** perusahaan, strategi ESG yang lebih luas, dan **aspirasi pelaporan** serta interkonektivitasnya • Mengidentifikasi **ketentuan pelaporan keberlanjutan** menurut regulasi dan secara sukarela **Mengidentifikasi dan menilai dampak, risiko, dan peluang** • Mengidentifikasi **dampak, risiko, dan peluang ESG** • Melakukan **penilaian materialitas ESG** • Melakukan ***benchmarking*** • Mengidentifikasi **lembaga pemeringkat** dan **akreditasi** ESG yang paling relevan	**Menilai kematangan pelaporan ESG saat ini** • Melakukan **penilaian kematangan** pelaporan ESG saat ini, termasuk SDM, proses, teknologi, dan pengendalian **Menentukan strategi pelaporan dan *roadmap* ESG** • Menentukan **strategi pelaporan ESG** perusahaan, termasuk **metrik** dan **target** • **Mengidentifikasi kesenjangan (*gap*)** untuk mendorong **rekomendasi** dan membuat *roadmap*	**Merancang pengawasan** • Merancang **tata kelola** dan **model operasional** ESG • Menyelaraskan indikator kinerja utama (KPI) ESG dengan **insentif manajemen** dan eksekutif • **Mengintegrasi risiko ESG** ke dalam kerangka kerja manajemen risiko perusahaan	**Merancang kebijakan, proses, dan pengendalian pelaporan ESG** • Merancang dan mendokumentasikan **kebijakan dan definisi** pelaporan ESG, termasuk elemen data, sumber data, serta peran dan tanggung jawab pada tingkat topik • Merancang dan mendokumentasikan proses dan **pengendalian internal** pelaporan ESG • Merancang ***future state* arsitektur teknologi**, termasuk penilaian dan seleksi vendor	**Menerapkan** • **Menguji** desain sistem, proses, dan/atau pengendalian • Merencanakan dan memberikan **kurikulum pelatihan** untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan *self-sufficiency* • Melaporkan **kemajuan** terhadap strategi dan target ESG perusahaan yang lebih luas dan mematuhi **ketentuan regulasi yang berlaku**	**Memperbaiki pelaporan** • Merancang proses untuk **memperbaiki pelaporan** seiring dengan perubahan kebutuhan pemangku kepentingan dan perkembangan regulasi

Pertimbangan utama untuk mencapai pelaporan yang unggul

Memilih standar pelaporan keberlanjutan yang sesuai

Karena standar dan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan masih dikembangkan dan berubah dengan cepat, tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua. Kami sering melihat perusahaan mengambil satu "dasar" standar/kerangka kerja pelaporan dan menambahinya dengan pedoman atau kerangka kerja yang relevan dengan industrinya.

1. **Memahami tujuan perusahaan, strategi ESG yang lebih luas, dan aspirasi pelaporan serta interkonektivitasnya**

   Perusahaan dapat memulai dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan utamanya, baik internal maupun eksternal. Mulailah dengan apa yang perlu diketahui dari perspektif manajemen. Pelaporan seharusnya tidak hanya untuk konsumsi eksternal – pelaporan harus membantu pengambilan keputusan yang lebih baik secara internal.

2. **Mengidentifikasi ketentuan pelaporan keberlanjutan menurut regulasi**

   Perkembangan regulasi dan kebijakan merupakan pertimbangan penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena standar dan ketentuan berubah dengan cepat. Penting agar perusahaan tidak dikejutkan oleh ekspektasi yang berkembang pesat.

3. **Melakukan *benchmarking***

   Meskipun masih cukup baru, banyak perusahaan sudah memulai pelaporan ESG sejak beberapa tahun lalu. Melakukan *benchmarking* terhadap perusahaan serupa atau dalam industri Anda dapat menjadi titik awal yang baik untuk membantu perusahaan memutuskan satu atau beberapa standar atau kerangka kerja yang paling sesuai untuk digunakan.

Data – Mengurai tantangan

Data yang berkualitas baik sangat diperlukan untuk menyajikan informasi dengan cara yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk meningkatkan pengumpulan dan validasi data:

1. **Mengidentifikasi *gap* data dan menciptakan *roadmap* untuk meningkatkan pengumpulan data**

   Kerangka kerja dan standar dapat membantu perusahaan memahami informasi apa yang dicari oleh investor dan para pemangku kepentingan lain. Standar seperti GRI dan SASB dapat membantu menentukan metrik yang mungkin relevan dalam industri di mana perusahaan beroperasi.

2. **Merancang dan mendokumentasikan proses pelaporan ESG dan pengendalian internal**

   Data ESG sering berada di berbagai tempat dalam bisnis (area-area yang mungkin tidak menjalani proses dan pengendalian ketat yang sama seperti yang kita ketahui untuk pelaporan keuangan) dan sulit untuk diekstraksi dengan cara yang membantu pelaporan secara *real time*. Sebagian data mungkin dikembangkan atau dilacak secara manual, sehingga lebih sulit untuk diverifikasi.

   Perusahaan perlu memulai dari fungsi di mana data dihasilkan. Lingkungan pengendalian yang efektif, termasuk proses yang mendasari dan pengendalian internal di sekitar sumber informasi dan cara pelaporannya, memberikan kenyamanan bagi manajemen terkait keakuratan, kelengkapan, dan konsistensinya. Ketelitian pelaporan seharusnya setara dengan pelaporan keuangan dengan standar yang sesuai untuk *independent assurance.*

   Ketika perusahaan melihat lingkungan pengendalian, penting untuk membentuk struktur tata kelola. Manajemen harus memahami siapa di dalam organisasi yang bertanggung jawab meninjau informasi ESG dan seberapa sering peninjauan dilakukan. Peninjauan pengungkapan ESG biasanya hanya dilakukan selama penyusunan laporan keberlanjutan tahunan. Melakukan pengumpulan dan peninjauan data ESG berkala secara rutin akan membantu perusahaan mengidentifikasi kekurangan informasi ESG lebih awal agar perusahaan dapat mengambil data yang diperlukan.

3. **Merancang proses dari data hingga pelaporan, termasuk sistem pengumpulan data**

   Perusahaan mungkin perlu melakukan konsolidasi data lintas departemen atau pada tingkat global. Tidak seperti pelaporan keuangan, penggunaan sistem TI untuk konsolidasi data non-keuangan lebih jarang dilakukan dalam organisasi. Banyak perusahaan terutama mengandalkan konsolidasi manual menggunakan *spreadsheet* yang meningkatkan risiko pelaporan yang tidak akurat. Mengumpulkan dan memverifikasi informasi adalah pekerjaan sulit. Perusahaan perlu memikirkan sistem, bukan laporan. Untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan proses konsolidasi, sebagian organisasi mungkin memilih untuk memodifikasi sistem TI yang ada, tetapi itu membutuhkan investasi uang, waktu, dan sumber daya. Seiring semakin mapannya pelaporan ESG, perusahaan dapat mempertimbangkan penerapan sistem TI untuk membantu pengumpulan data, pemantauan, dan pelaporan. Investasi dan upaya yang dilakukan untuk pelaporan dan *assurance* keuangan bersifat signifikan, dan tingkat ketelitian dan *assurance* yang setara diharapkan untuk informasi nonkeuangan. Akan bermanfaat untuk memulai perjalanan tersebut lebih awal.

Mengintegrasikan ESG ke dalam strategi bisnis dan kerangka kerja manajemen risiko

Integrasi ESG ke dalam strategi bisnis, proses manajemen risiko, dan pengukuran kinerja melalui pelaporan yang lebih baik dapat menghemat biaya, menghasilkan penciptaan nilai jangka panjang, dan menyediakan informasi untuk keputusan investasi terkait teknologi, tenaga kerja, perencanaan, rantai pasok, serta akuisisi dan divestasi aset, dsb.

Perusahaan dapat mengambil tiga langkah berikut untuk meningkatkan integrasi:

1. **Merancang struktur tata kelola ESG, termasuk pelaporan ESG**

   Staf yang kompeten, mampu beradaptasi dan mendorong perubahan yang signifikan, akan berperan penting dalam memastikan hasil berkelanjutan yang diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan. Laporan PwC tentang *Chief Sustainability Officer* (CSO) yang berdaya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki skor peringkat ESG yaitu A- atau lebih tinggi memiliki eksekutif yang minimal memiliki tanggung jawab keberlanjutan hingga taraf tertentu.

   Perusahaan dapat memanfaatkan komite pengungkapan tingkat manajemen yang ada, yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan memiliki riwayat panjang pengelolaan dan pengawasan data (*data stewardship*). Tim lintas fungsi ini, yang biasanya beranggotakan personel dari divisi operasi, legal, audit internal, keuangan, dan kelompok bisnis lainnya, memahami pentingnya pelaporan kepada pemangku kepentingan termasuk investor. Mereka dapat membantu perusahaan menentukan apakah pengungkapan sudah akurat dan lengkap untuk menyampaikan pesan perusahaan dan benar-benar bertaraf investor. Mereka juga dapat mewujudkan integrasi pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang sesungguhnya untuk membuka wawasan yang lebih luas.

   Perusahaan perlu menanamkan disiplin dan ritme siklus pelaporan akhir periode sebagai alat pengawasan dan pemantauan kinerja, menghubungkan strategi dan pelaporan.

2. **Menyelaraskan KPI ESG dengan insentif eksekutif dan manajemen**

   Perusahaan dapat menanamkan perubahan lebih jauh dengan memberikan insentif bagi karyawannya untuk mendorong perilaku ESG. Survei investor global 2021 dari PwC menunjukkan bahwa 68% investor setuju bahwa pengukuran dan target kinerja ESG harus dimasukkan dalam pengaturan gaji eksekutif.

   Seiring upaya manajemen untuk mengintegrasikan perhatian seputar ESG ke dalam diskusi strategi perusahaan, banyak yang juga mempertimbangkan cara menciptakan insentif yang tepat untuk pencapaian tujuan ESG. Beberapa perusahaan menggunakan belasan jenis metrik ESG atau lebih dalam skema kompensasinya. Metrik mana yang tepat untuk tim eksekutif perusahaan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk hubungan antara tujuan ESG dan strategi perusahaan serta lingkup tanggung jawab untuk metrik dalam organisasi. Baca lebih lanjut tentang hal-hal yang perlu diketahui direksi dalam menyelaraskan KPI ESG dengan insentif eksekutif dan manajemen dalam laporan PwC pada Maret 2022 tentang *"Purpose driven leadership: the evolving role of ESG metrics in executive compensation plans"*.

3. **Merencanakan dan memberikan kurikulum pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan *self-sufficiency***

   Di tengah lanskap keberlanjutan yang berubah dengan cepat, perusahaan harus membangun *internal agility* untuk mengikuti perubahan. Karena ESG bersinggungan dengan sebagian besar aspek operasional sebuah organisasi, pengetahuan tentang ESG harus tersebar luas di seluruh organisasi, dimulai dari pemahaman di tingkat manajemen tentang bagaimana perusahaan dapat menghasilkan pengungkapan ESG bertaraf investor.

Pandangan para pemimpin: Pentingnya menghubungkan strategi pelaporan keberlanjutan dengan strategi bisnis, sekaligus mempertahankan keterlibatan pemangku kepentingan secara terbuka dan berkala

Penting bagi perusahaan untuk memahami harapan para pemangku kepentingan utama dan mengambil tindakan praktis untuk menghadapi kebutuhan dan perhatiannya secara tepat waktu. Bagi kami, hal ini termasuk menanamkan pertimbangan keberlanjutan dalam strategi bisnis kami dan menyeimbangkan dampak bisnis, lingkungan, dan masyarakat. Ini akan mendukung keselarasan yang lebih tepat dan kejelasan dalam menyampaikan narasi keberlanjutan perusahaan.

Dengan kepentingan investor kami yang terus berkembang dalam pengungkapan yang lebih komprehensif berdasarkan TCFD, kami mengambil tindakan untuk memasukkan rekomendasi TCFD dalam pelaporan keberlanjutan kami untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan kami. Dalam menerapkan kerangka kerja keberlanjutan seperti TCFD yang merupakan hal baru bagi kami, salah satu tantangan utamanya adalah perlunya memahami berbagai ketentuan pengungkapan, melakukan *gap analysis*, mengembangkan analisis baru, dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mematuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu yang singkat. Melibatkan orang-orang dengan keahlian dan pengalaman yang sesuai sangat penting dan telah membantu kami dalam mempercepat proses penerapannya.

Laporan keberlanjutan lebih dari sekadar laporan. Laporan ini adalah media bagi perusahaan untuk menyampaikan strategi dan kemajuannya. Merupakan hal penting untuk memperhatikan pendapat pemangku kepentingan, menjalin komunikasi yang terbuka dan berkala, dan mengambil langkah praktis untuk menjawab harapan dan perhatian mereka dengan segera. Laporan keberlanjutan yang transparan dan komprehensif membantu baik pemangku kepentingan maupun manajemen untuk mengambil keputusan bisnis yang matang. Banyak pula manfaat yang dapat dituai dari itu, seperti pendanaan baru dan penurunan biaya keuangan.

Untuk mempercepat perjalanan pelaporan keberlanjutan Anda, buatlah tolok ukur dengan pelaku atau sesama entitas secara global dan belajarlah dari negara dan perusahaan yang lebih maju. Anda tidak perlu memulai dari nol, dan ini merupakan pendekatan yang efektif untuk melacak iklim pelaporan keberlanjutan yang terus berkembang.

Dalam menangani area pelaporan yang lebih rumit, kita dapat meminta bantuan yang sesuai dari ahli yang relevan untuk membantu mempercepat prosesnya dan memastikan penerapan standar dan kerangka kerja keberlanjutan secara efektif dan tepat waktu. Memanfaatkan alat digital yang tersedia di pasar juga akan berguna.

Dengan beragam perkembangan dalam pelaporan keberlanjutan yang tengah dilakukan oleh berbagai regulator dan organisasi, keselarasan secara keseluruhan dan *interoperability* standar pelaporan keberlanjutan menjadi penting. Merupakan hal yang baik untuk memiliki seperangkat standar umum untuk membantu para penyusun laporan keberlanjutan.

Antonius Ardian Bermana,
Chief of Risk, Strategy and Sustainability
PT Semen Indonesia (Persero)

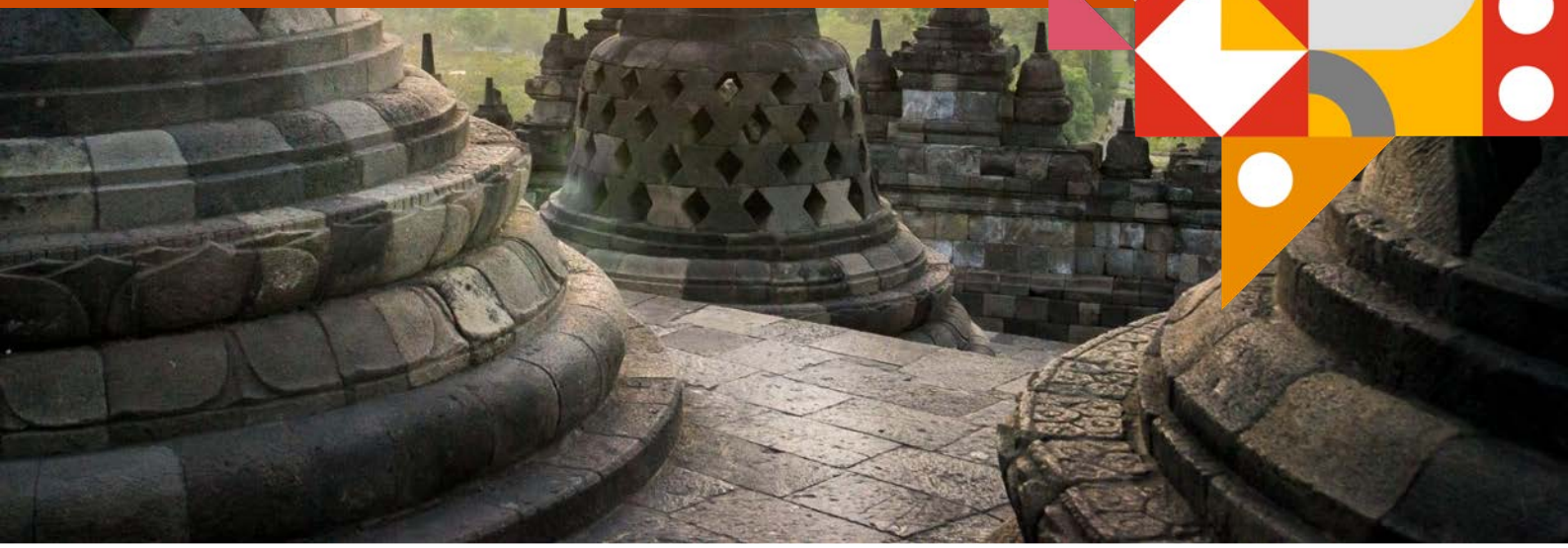

06

Lampiran

- Persyaratan pelaporan keberlanjutan di Asia Pasifik
- Glosarium istilah penting, akronim, dan singkatan
- Publikasi *thought leadership* terkait keberlanjutan PwC

Persyaratan pelaporan keberlanjutan di Asia Pasifik (kini dan mendatang)

Meskipun banyak yurisdiksi di Asia Pasifik tidak memiliki standar yang telah ditentukan untuk pelaporan keberlanjutan, kami memperhatikan bahwa banyak perusahaan saat ini menggunakan GRI untuk pelaporan keberlanjutan. Kami juga mengamati bahwa banyak yurisdiksi lebih berfokus pada isu-isu iklim dan sosial dan terdapat peningkatan penggunaan kerangka kerja TCFD untuk pelaporan iklim.

Yurisdiksi	Kini	Mendatang
Australia	• Saat ini tidak ada kewajiban pelaporan keberlanjutan. • Namun, pedoman tata kelola perusahaan merekomendasikan pengungkapan risiko lingkungan dan sosial bagi perusahaan terbuka. Landasan prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan mengikuti pendekatan 'jika tidak, mengapa tidak'. • Persyaratan hukum Australia mewajibkan entitas-entitas tertentu untuk mengungkapkan informasi nonkeuangan terkait undang-undang federal yang spesifik, seperti Undang-Undang Perbudakan Modern, Undang-Undang Kesetaraan Gender di Tempat Kerja, atau Undang-Undang Pelaporan Gas Rumah Kaca dan Energi Nasional. • Australian Sustainable Finance Initiative (didukung oleh Australian Prudential Regulation Authority/APRA) dan Australian Securities & Investments Commission/ASIC) menerbitkan *Australian Sustainable Finance Roadmap* pada tahun 2020, menyebutkan 37 rekomendasi dalam kerangka waktu yang berbeda-beda. • APRA merilis *Prudential Practice Guide CPG 229 (Climate Change Financial Risks)* finalnya untuk bank, asuransi, dan wali amanat dana pensiun dalam mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan perubahan iklim.	• Adanya perubahan yang diumumkan pada Desember 2022, untuk membentuk Environmental Protection Agency (EPA) federal dan akan memberlakukan standar yang mengikat secara hukum terhadap seluruh keputusan lingkungan. Rancangan undang-undang direncanakan selesai pada pertengahan 2023, siap untuk disosialisasikan kepada parlemen sebelum akhir tahun. • Sebuah makalah konsultasi pengungkapan keuangan terkait iklim diterbitkan pada Desember 2022, yang dapat mewajibkan entitas terbuka tertentu di mana ambang batas ukurannya saat ini masih dalam proses konsultasi, selain lembaga keuangan besar, untuk menyampaikan pengungkapan tersebut paling awal pada FY 2024-2025. Pelaporan terkait iklim akan selaras dengan kerangka kerja TCFD. • APRA sedang dalam proses memperbarui pedoman kehati-hatiannya tentang Tata Kelola Investasi untuk Dana Pensiun untuk memasukkan pertimbangan seputar ESG. • Makalah konsultasi diterbitkan pada Juni 2023 untuk mengumpulkan pandangan tentang posisi yang diajukan terkait cakupan, konten, kerangka, dan pemberlakuan atas persyaratan untuk pengungkapan risiko dan peluang keuangan terkait iklim.

Yurisdiksi	Kini	Mendatang
Tiongkok	• CSRC mengumumkan pedoman baru pada Juni 2021 untuk perusahaan tercatat agar menambahkan bagian 'Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial' dalam laporan tengah tahun dan tahunan. • CSRC mendorong perusahaan untuk melaporkan secara sukarela informasi tentang emisi karbon, langkah-langkah pengurangan karbon, dampak terhadap keberagaman hayati, risiko yang ditimbulkan isu-isu sosial, pengentasan kemiskinan, dan revitalisasi pedesaan dari bisnisnya. • Pada Desember 2021, Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok merilis regulasi "Langkah-langkah Pengelolaan Pengungkapan Informasi Lingkungan untuk Perusahaan" yang telah berlaku mulai 8 Februari 2022. Langkah-langkah tersebut berlaku terhadap sumber emisi/korporasi pencemar utama dan perusahaan yang memiliki kewajiban audit produksi bersih. • Sejumlah otoritas lokal, seperti di Shanghai dan Shenzhen, juga telah menerbitkan pedoman pengembangan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. • Diumumkan pada Januari 2022, SSE menerbitkan pedoman baru untuk perusahaan indeks Kechuang 50, mewajibkan 50 perusahaan komponen untuk menerbitkan laporan tanggung jawab sosial. • Pada Mei 2022, Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (SASAC) menerbitkan "Rencana kerja untuk meningkatkan kualitas perusahaan tercatat yang dikendalikan oleh perusahaan sentral", mewajibkan perusahaan tercatat untuk mempromosikan pembangunan yang berkualitas tinggi, mengeksplorasi dan menciptakan sistem manajemen ESG yang komprehensif.	• Kementerian Keuangan Republik Rakyat Tiongkok adalah anggota Kelompok Kerja Yurisdiksi ISSB, bersama dengan US SEC, Komisi Eropa, EFRAG, FSA Jepang, Sustainability Standards Board of Japan (SSBJ), Financial Conduct Authority (FCA) Inggris, dan Financial Reporting Council (FRC) Inggris, dan telah memberikan masukan yang signifikan terhadap proses pembuatan standar ISSB. Kementerian Keuangan Republik Rakyat Tiongkok juga merupakan anggota Sustainability Standards Advisory Group bersama pembuat standar dari yurisdiksi lainnya.

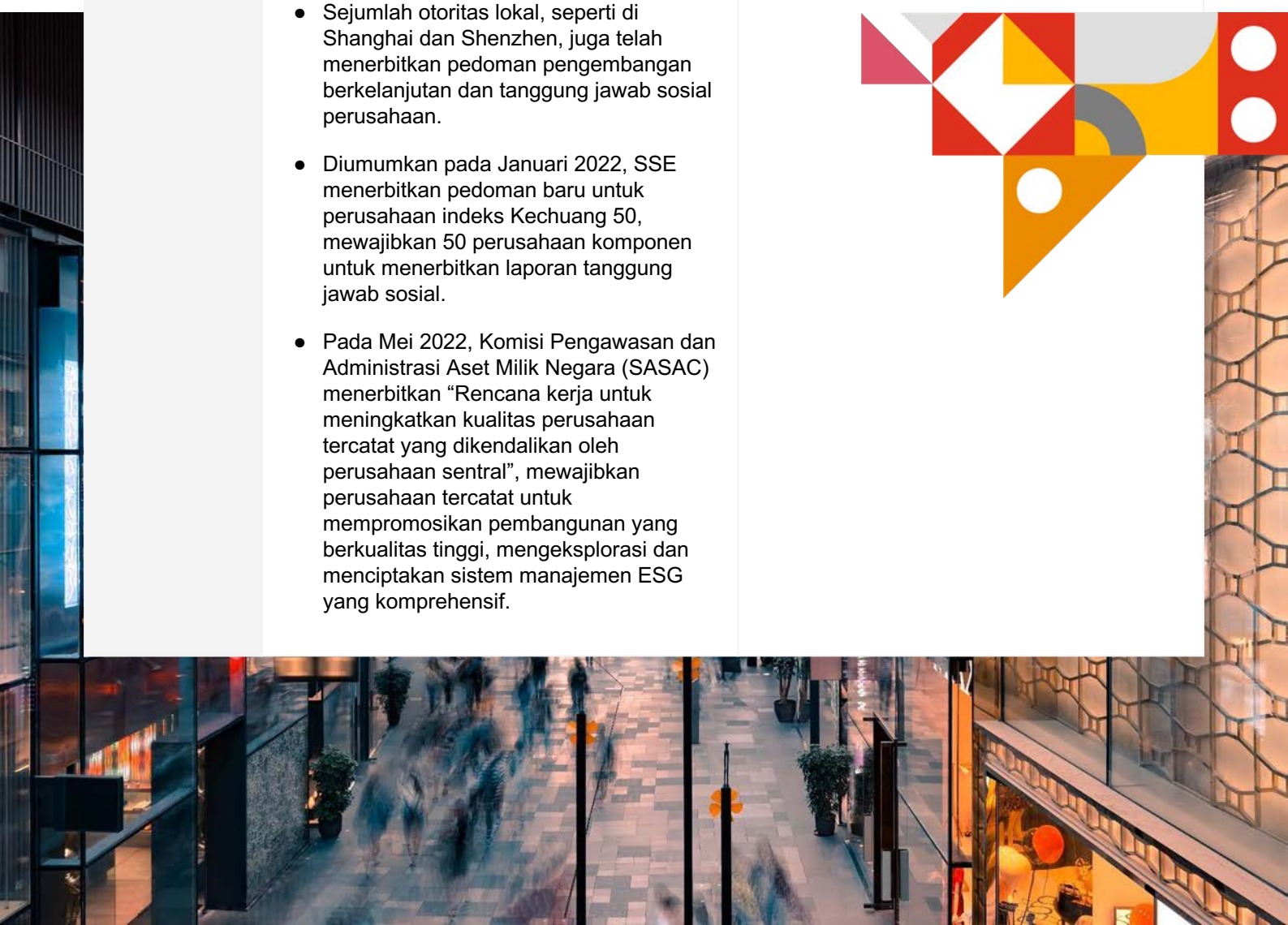

Yurisdiksi	Kini	Mendatang
Hong Kong SAR	• Peraturan pencatatan HKEX mencakup Pedoman Pelaporan ESG. Terdapat dua tingkat kewajiban pengungkapan: (a) persyaratan pengungkapan wajib; dan (b) ketentuan "*comply or explain*". • Pembaruan terbesar, efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Juli 2020, mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi ESG tambahan. • HKEX mewajibkan perusahaan tercatat untuk memasukkan risiko terkait ESG dalam penilaian manajemen risiko perusahaan yang berlaku mulai 1 Januari 2022. • Kerangka kerja strategis untuk pengembangan keuangan hijau di Hong Kong SAR diumumkan pertama kali pada 2018. Pada 2019, Securities and Futures Commission (SFC) menyelesaikan dan mempublikasikan Hasil "Survei Integrasi Faktor ESG dan Risiko Iklim dalam Manajemen Aset". • Pada Agustus 2021, SFC mempublikasikan kesimpulan konsultasi tentang manajemen dan pengungkapan risiko terkait iklim oleh pengelola dana. Pengelola dana kolektif wajib mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman "Manajemen dan Pengungkapan Risiko Terkait Iklim oleh Pengelola Dana" yang diterbitkan SFC (tanggal efektif paling awal pada Agustus 2022). Pengungkapan tentang risiko terkait iklim wajib dilakukan jika syarat terpenuhi. • Bank wajib mengintegrasikan pertimbangan risiko iklim ke dalam kerangka kerja manajemen risiko perusahaannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam *Supervisory Policy Manual GS-1* Manajemen Risiko Iklim yang diterbitkan oleh Hong Kong SAR Monetary Authority, efektif pada 31 Desember 2022. Bank wajib mempublikasikan laporan TCFD pertamanya sebelum pertengahan 2023 dan selaras sepenuhnya dengan TCFD sebelum 2025.	• HKEX meluncurkan konsultasi tentang peningkatan pengungkapan terkait iklim di bawah kerangka kerja ESG pada April 2023. HKEX mengusulkan untuk mewajibkan semua emiten untuk menyampaikan pengungkapan terkait iklim dalam laporan ESG mereka, dan memperkenalkan pengungkapan terkait iklim baru yang selaras dengan Standar Iklim ISSB. Periode konsultasi diperkirakan akan ditutup pada 14 Juli 2023.

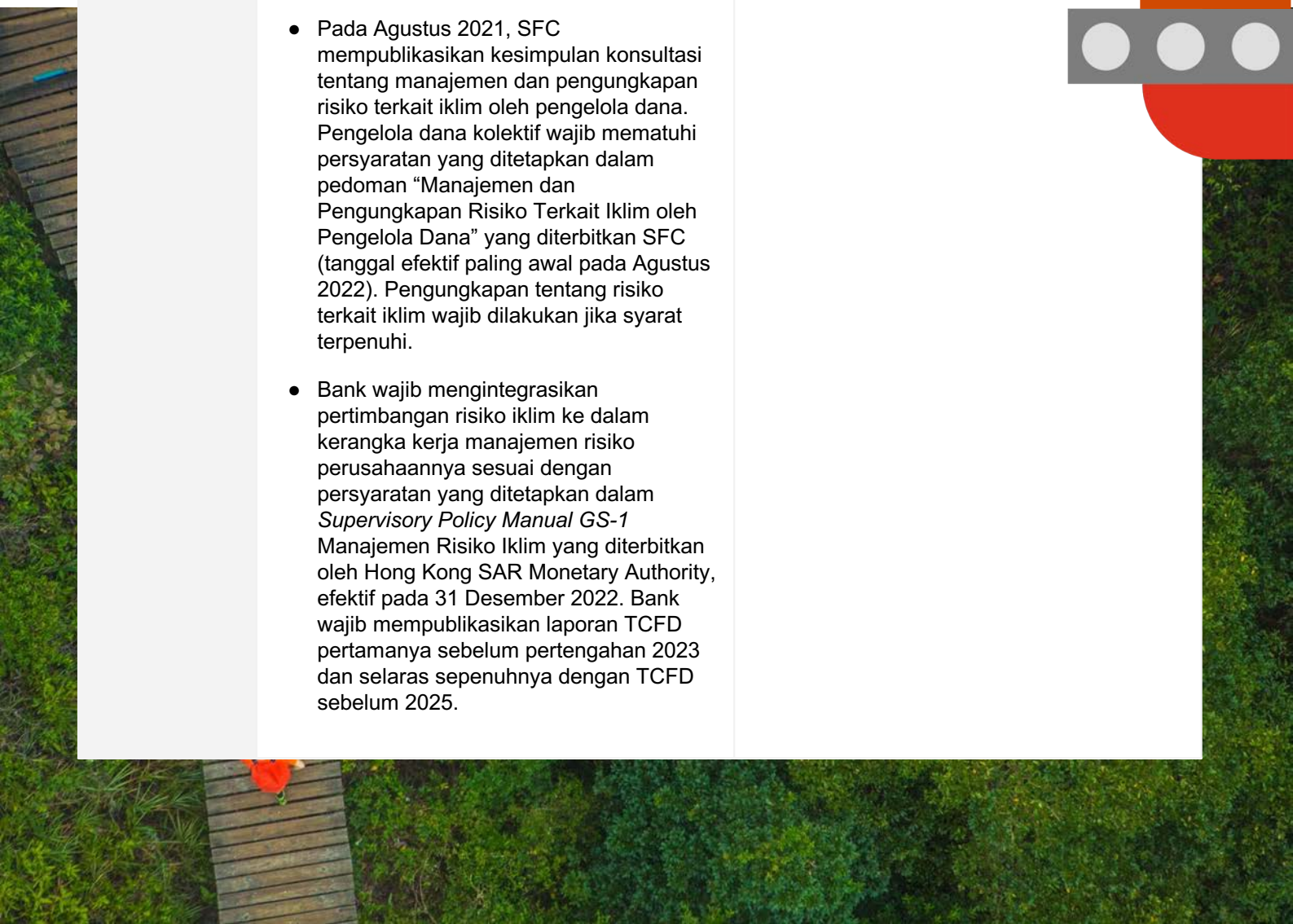

Yurisdiksi	Kini	Mendatang
India	• Kewajiban menyusun Laporan Tanggung Jawab dan Keberlanjutan Bisnis (BRSR) sehubungan dengan pelaporan ESG untuk 1.000 entitas tercatat terbesar menurut kapitalisasi pasar dari tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023. • IR dapat diterapkan secara sukarela oleh 500 perusahaan terbesar, yang diwajibkan untuk menyusun BRSR.	• Sejumlah mandat utama menurut rapat dewan SEBI pada Maret 2023 adalah sebagai berikut: - *Assurance* yang wajar terhadap seperangkat KPI yang terbatas (disebut BRSR Core) untuk 150 entitas tercatat terbesar (menurut kapitalisasi pasar) sebelum FY 2023-24 yang akan diperluas secara bertahap ke 1.000 entitas tercatat terbesar sebelum FY 2026-27. - Pengungkapan dan *assurance* ESG untuk BRSR Core akan mulai diterapkan untuk rantai nilai perusahaan tercatat, dengan batasan spesifik tertentu. - Pengungkapan dan *assurance* untuk rantai nilai akan berlaku terhadap 250 perusahaan tercatat terbesar (menurut kapitalisasi pasar) berdasarkan prinsip *comply or explain* dari FY 2024-25 dan FY 2025-26 secara berurutan. - Parameter yang teridentifikasi (yang memiliki konteks India) akan dipertimbangkan oleh pemeringkat ESG untuk peringkat ESG, membantu mereka menerapkan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. - Pemeringkat ESG harus menawarkan kategori terpisah peringkat ESG (yaitu Core ESG Rating) berdasarkan parameter *assurance* menurut BRSR Core. - Langkah wajib tertentu untuk skema ESG (reksa dana khusus ESG) yang mencakup *assurance* pihak ketiga dan sertifikasi oleh Dewan Perusahaan Manajemen Aset untuk kepatuhan terhadap tujuan skema ESG, pengungkapan yang ditingkatkan untuk keputusan pengambilan suara terkait ESG, komentar dan studi kasus pengelolaan dana, dll. • Reserve Bank of India (RBI) telah mengembangkan makalah diskusi yang membuka jalan untuk suatu kerangka kerja (diselaraskan dengan TCFD) yang mewajibkan entitas yang diatur untuk mengungkapkan bagaimana risiko iklim dimasukkan dalam mekanisme tata kelola, strategi, manajemen risiko, metrik, dan targetnya. • RBI telah merilis pemberitahuan “Kerangka Kerja Penerimaan Deposito Hijau”.

Yurisdiksi	Kini	Mendatang
Indonesia	• Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan lembaga keuangan dan perusahaan terbuka untuk mempublikasikan pelaporan keberlanjutan melalui POJK 51/POJK.03/2017, secara bertahap sejak 2019. • Pelaporan keberlanjutan diwajibkan secara bertahap sebagai berikut: - Lembaga jasa keuangan (bank besar dan bank asing) (sejak 2019) - Lembaga jasa keuangan (bank yang lebih kecil, lembaga jasa keuangan nonbank lainnya, dan perusahaan tercatat (sejak 2020) - Koperasi kredit besar dan perusahaan efek, perusahaan terbuka dengan aset berskala menengah (sejak 2022) - Koperasi kredit yang lebih kecil, pegadaian, lembaga penjamin dan lembaga penjamin syariah, perusahaan efek yang tidak mengelola rekening efek pelanggan, dan perusahaan terbuka dengan aset berskala kecil (sejak 2024) - Dana pensiun (sejak 2025) • Terdapat delapan prinsip keuangan berkelanjutan di Indonesia yang ditetapkan oleh OJK, yaitu Investasi Bertanggung Jawab, Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup, Komunikasi yang Informatif, Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas, Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan, Tata Kelola, Inklusif, serta Koordinasi dan Kolaborasi. • Pedoman laporan keberlanjutan ditetapkan dalam SEOJK 16/SEOJK.04/2021 untuk memandu perusahaan dalam melaporkan kinerja ESG-nya. • Selain pelaporan keberlanjutan, bank wajib mempublikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, yang mencakup rencana jangka pendek (satu tahun) dan rencana jangka panjang (lima tahun) bank setiap tahunnya.	• IDX menjadi pendukung TCFD pada Juni 2021 sebagai bagian dari ambisinya untuk mendukung keberlanjutan di pasar modal Indonesia.

Yurisdiksi	Kini	Mendatang
Jepang	• Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan mewajibkan setelah 4 April 2022: - Semua perusahaan yang tercatat di TSE atas persyaratan umum. - Perusahaan yang tercatat di Pasar Perdana dan Standar atas persyaratan tambahan menggunakan pendekatan *comply or explain*. - Revisi Pedoman Tata Kelola Jepang juga mewajibkan perusahaan yang tercatat di Pasar Perdana untuk memenuhi persyaratan TCFD setelah 4 April 2022. - Perusahaan yang tercatat di Pasar Perdana harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan berdasarkan rekomendasi TCFD atau kerangka kerja yang setara. • FSA Jepang mempublikasikan amendemen final atas "Perintah Kantor Kabinet tentang Pengungkapan Perusahaan" dan perintah kantor kabinet yang relevan dan berlaku lainnya setelah konsultasi publik pada 31 Januari 2023. Amendemen tersebut mewajibkan terutama perusahaan tercatat di Jepang dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Maret 2023 atau setelahnya untuk menyampaikan pengungkapan tambahan tentang inisiatif perusahaan terkait keberlanjutan dalam Laporan Efek Tahunannya.	• SSBJ di bawah Financial Accounting Standards Foundation (FASF) didirikan untuk berkontribusi terhadap pengembangan standar pengungkapan internasional dan domestik dan telah menyampaikan komentar atas *Exposure Draft* Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS yang diterbitkan oleh ISSB. • *Disclosure Working Group* (DWG) di FSA Jepang telah mempublikasikan laporan DWG dengan *roadmap* yang akan datang pada 27 Desember 2022, dan telah berencana untuk mempercepat peningkatan pengungkapan berdasarkan *roadmap* tersebut.

Yurisdiksi	Kini	Mendatang
Malaysia	• Pelaporan ESG diwajibkan sebagai aturan pencatatan, yaitu mengungkapkan pernyataan naratif dari manajemen tentang risiko dan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dalam laporan tahunan. • BM menerbitkan Pedoman Pelaporan Keberlanjutan pada 2015 (edisi pertama), 2018 (edisi kedua) dan 2022 (edisi ketiga). • Pedoman Tata Kelola Malaysia diperbarui pada 2021. Salah satu pembaruan pentingnya mencakup pedoman untuk memperkuat pengawasan manajemen dan integrasi pertimbangan keberlanjutan dalam strategi dan operasi perusahaan. • Pada 2021, BNM merilis *Climate Change and Principle based Taxonomy* (CCPT) untuk mendorong penerapan prinsip ESG dalam lembaga keuangan. • Pada Juni 2022, Joint Committee on Climate Change (JC3) merilis Pedoman Penerapan TCFD untuk lembaga keuangan. • Pada September 2022, BM meningkatkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutannya dengan persyaratan tentang pelaporan perubahan iklim bagi perusahaan di pasar Utama dan ACE, dengan pelaksanaan bertahap dimulai pada tahun buku yang berakhir pada atau setelah 31 Desember 2023. • Securities Commission Malaysia (SC) mengungkap *Principles-Based Sustainable and Responsible Investment Taxonomy* (SRI Taxonomy) untuk Pasar Modal Malaysia pada Desember 2022. Taksonomi tersebut selaras dengan Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan, Versi 1 (*ASEAN Taxonomy*) yang dirilis pada November 2021.	• Capital Market Masterplan 3 (2021) SC lima tahunan menegaskan komitmen SC terhadap aksi iklim. • SC dan BNM tengah menilai kesiapan perusahaan untuk memenuhi kriteria seleksi teknis menurut Versi 2 Taksonomi Asean untuk Keuangan Berkelanjutan yang dirilis pada Maret 2023, yang akan diberlakukan pada awal 2024. • BM tengah berkolaborasi dengan London Stock Exchange Group untuk mengembangkan Platform Pelaporan Keberlanjutan Terpusat pada 2023. Ini akan membantu perusahaan untuk mengungkapkan data ESG umum terstandar dengan cara yang sesuai dengan standar global yang telah ditetapkan. • JC3 akan terus berusaha mencapai prioritas berikut ini pada 2023: - Memperluas *use case* untuk penerapan *Climate Change and Principle-based Taxonomy*. - Menyelaraskan Pedoman Penerapan TCFD untuk lembaga keuangan dengan persyaratan pengungkapan ISSB setelah finalisasinya. - Mengembangkan kurikulum pelatihan perubahan iklim untuk lembaga keuangan. • Dokumen kebijakan BNM tentang *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMSA) mewajibkan lembaga keuangan untuk menyelaraskan pengungkapan terkait iklim dengan TCFD beserta laporan keuangan untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024.

Yurisdiksi	Kini	Mendatang
Selandia Baru	• Perusahaan terbuka memberikan rekomendasi dalam catatan pedoman ESG melalui pedoman tata kelola New Zealand's Exchange untuk menyampaikan pengungkapan nonkeuangan terkait faktor dan praktik keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial. • Pelaporan TCFD untuk emiten dan lembaga keuangan tercatat besar akan diwajibkan untuk tahun pelaporan mulai 2023. Ini mencakup persyaratan *external assurance* terhadap komponen emisi GHG mulai 27 Oktober 2024. • Perusahaan tercatat besar, bank terdaftar besar, penjamin berlisensi, koperasi kredit, *building society*, dan manajer skema investasi serta sejumlah Lembaga Keuangan Crown wajib melaporkan pengungkapan terkait iklim kepada External Reporting Board (XRB). Pelaporan wajib berlaku untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023.	• Pengungkapan terkait emisi gas rumah kaca (yang mencakup emisi Lingkup 1, 2, dan 3) akan wajib memiliki *assurance* independen untuk periode akuntansi yang berakhir pada atau setelah 27 Oktober 2024.
Filipina	• Perusahaan terbuka wajib melaporkan kontribusinya terhadap topik-topik keberlanjutan baik melalui laporan keberlanjutan yang sesuai dengan kerangka kerja dan standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional atau templat pelaporan SEC Filipina. Laporan-laporan ini harus disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan perusahaan. • Kerangka Kerja Pelaporan Keberlanjutan yang ditentukan SEC Filipina dikembangkan berdasarkan standar dan kerangka kerja yang diterima secara global, terutama Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI, Kerangka Pelaporan Terintegrasi IIRC, Standar Akuntansi Keberlanjutan SASB, dan rekomendasi TCFD. • Kerangka Pelaporan Keberlanjutan yang ditetapkan oleh SEC Filipina dibangun di atas standar dan kerangka kerja yang diterima secara global, terutama Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI, Kerangka Pelaporan Terintegrasi IIRC, Standar Akuntansi Keberlanjutan SASB, dan rekomendasi TCFD. • SEC Filipina menggunakan pendekatan "*comply and explain*" sejak periode pelaporan 2019. Namun, mulai dari 2023 (periode pelaporan 2022), semua perusahaan terbuka wajib mematuhi Pedoman Pelaporan Keberlanjutan yang ditetapkan oleh regulator.	• SEC Filipina juga bermaksud memperkenalkan pelaporan sukarela dan nantinya wajib bagi perusahaan tidak tercatat. • Bangko Sentra ng Pilipinas (BSP) memiliki inisiatif sebagai berikut dalam rencananya yang termasuk regulasi yang akan datang yang mencakup bidang-bidang berikut: - Melakukan *stress test* risiko iklim oleh bank - Perubahan Ketentuan Pengungkapan menurut Surat Edaran No. 1085 - Peningkatan laporan kehati-hatian untuk pengumpulan data dan analisis pengawasan - Pinjaman atau pembiayaan berinsentif untuk proyek atau kegiatan hijau atau berkelanjutan - Pengembangan taksonomi keuangan berkelanjutan • SEC Filipina juga bersiap untuk menerapkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS yang tengah dikembangkan oleh ISSB, tetapi jadwal dan pedomannya masih ditinjau dan belum difinalisasi.

Yurisdiksi	Kini	Mendatang
Singapura	• Semua perusahaan yang tercatat di SGX harus memenuhi kewajiban pelaporan keberlanjutan berdasarkan prinsip '*comply or explain*' (efektif sejak 2017). • Kewajiban pelaporan iklim dan keberagaman untuk perusahaan tercatat Singapura (efektif sejak 2022). Pelaporan iklim diselaraskan dengan kerangka kerja TCFD. SGX merekomendasikan daftar 27 metrik ESG inti kepada emiten untuk digunakan sebagai titik awal pelaporan keberlanjutan. Emiten wajib melakukan peninjauan internal atas proses pelaporan keberlanjutan. Emiten harus mengungkapkan kebijakan keberagaman manajemen dan detail seperti target, rencana, jadwal, dan kemajuan keberagaman. Semua direktur harus mengikuti sesi pelatihan keberlanjutan yang telah ditentukan. • Pada September 2022, Monetary Authority of Singapore (MAS) dan SGX meluncurkan Portal Pengungkapan ESGenome untuk merampingkan pelaporan keberlanjutan dan meningkatkan akses investor ke data ESG. • MAS mewajibkan agar semua lembaga keuangan di Singapura memiliki pengungkapan Manajemen Risiko Lingkungan (*Environmental Risk Management*) (efektif sejak Juni 2022). • NovA!, bagian dari Program Kecerdasan Artifisial Nasional untuk Keuangan, bertujuan untuk membantu lembaga keuangan memanfaatkan AI untuk menghasilkan wawasan tentang risiko keuangan. Pada tahap awalnya, program ini akan berfokus meningkatkan kemampuan lembaga keuangan untuk menilai dampak lingkungan perusahaan dan mengidentifikasi risiko lingkungan yang timbul.	• Green Finance Industry Taskforce (GFIT) yang dibentuk oleh MAS tengah mengembangkan taksonomi untuk membantu lembaga keuangan di Singapura dengan mengidentifikasi kegiatan yang dapat dianggap 'hijau' (ramah lingkungan) atau bertransisi menuju 'hijau'. Pada 15 Februari 2023, GFIT meluncurkan konsultasi publik finalnya tentang taksonomi hijau dan transisi untuk lembaga keuangan yang berbasis di Singapura. Konsultasi ketiga dilakukan berdasarkan dua sesi konsultasi GFIT sebelumnya pada Januari 2021 dan Mei 2021. GFIT akan mempublikasikan taksonomi finalnya, yang akan mempertimbangkan umpan balik dari ketiga konsultasi publik, sebelum Semester 1 2023. • Pada 6 Juli 2023, Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) dan Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) meluncurkan konsultasi publik tentang rekomendasi oleh Sustainability Reporting Advisory Committee (SRAC) untuk meningkatkan pelaporan iklim di Singapura. Rekomendasi-rekomendasi penting dari konsultasi tersebut meliputi: 1. Kewajiban pengungkapan terkait iklim (CRD) untuk emiten terdaftar mulai berlaku sejak FY 2025, untuk perusahaan tidak tercatat dengan pendapatan tahunan minimal $1 miliar mulai FY 2027. 2. Tinjauan akan dilakukan pada tahun 2027 dengan maksud untuk mewajibkan pelaporan iklim bagi perusahaan-perusahaan besar yang tidak tercatat dengan pendapatan tahunan minimal $100 juta sekitar FY 2030. 3. Anak perusahaan yang tidak tercatat dibebaskan dari kewajiban pelaporan jika laporan induknya (lokal atau asing) menyertakan CRD atau yang setara beserta aktivitasnya sebagaimana ditetapkan. 4. Baik emiten tercatat maupun perusahaan besar yang tidak tercatat harus melaporkan CRD menggunakan standar lokal yang ditentukan yang mencerminkan ketentuan standar ISSB. 5. Diperbolehkan menggunakan standar atau kerangka kerja lain secara bersamaan (misalnya GRI) dalam laporan yang sama. 6. Keringanan transisi untuk emisi Lingkup 3 diperpanjang hingga dua tahun untuk perusahaan tidak tercatat yang termasuk dalam lingkup. 7. Perusahaan yang tunduk pada kewajiban pelaporan iklim harus mendapatkan *external limited assurance* atas emisi GHG Lingkup 1 dan Lingkup 2, mulai FY 2027 untuk semua emiten yang terdaftar dan mulai FY 2029 untuk perusahaan besar yang tidak tercatat. 8. CRD harus memiliki jadwal pelaporan dan pengajuan yang sama dengan laporan keuangan untuk memfasilitasi pengomunikasian yang tepat waktu kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Yurisdiksi	Kini	Mendatang
Korea Selatan	• Pengungkapan hal-hal terkait ESG dilakukan melalui: – Laporan Tata Kelola Bursa Korea (wajib untuk perusahaan tercatat besar) – Laporan Informasi Lingkungan (wajib untuk perusahaan tercatat besar) – Laporan Keberlanjutan (sukarela) • Menurut *Framework Act on Green Growth*, perusahaan yang tunduk pada sistem manajemen target gas rumah kaca nasional wajib menerbitkan laporan yang mencakup pelaporan emisi GHG dan volume energi secara berkala. • Pengungkapan laporan tata kelola telah diwajibkan bagi perusahaan yang tercatat di pasar efek sejak 2019. • Pada Desember 2021, Kementerian Lingkungan mengumumkan Pedoman Sistem Klasifikasi Hijau Korea (*K-Taxonomy*).	• Pada 14 Januari 2021, Komisi Jasa Keuangan mengumumkan rencananya untuk menerapkan fase ketiga pengungkapan Laporan Keberlanjutan. • Sejak 2025, pengungkapan ESG akan diwajibkan bagi perusahaan dengan total aset minimal KRW 2 triliun. Sejak 2030, pengungkapan ESG wajib akan diperluas ke semua perusahaan yang tercatat di Korea Composite Stock Price Index (KOSPI). • Korea Sustainability Standards Board didirikan pada 2022 dan berperan dalam mempersiapkan pembentukan standar pengungkapan keberlanjutan dalam negeri dan berkontribusi dalam proses pembentukan standar pengungkapan keberlanjutan internasional.

Yurisdiksi	Kini	Mendatang
Taiwan	• *Taiwan Stock Exchange Corporation Rules* mewajibkan perusahaan tercatat dan OTC untuk menyusun Laporan Keberlanjutan (laporan ESG) dengan mengacu pada Standar GRI terbaru yang dipublikasikan oleh GRI. • Terdapat pengungkapan ESG dan *external assurance* yang spesifik sektor untuk industri terkait pangan, industri kimia, dan industri jasa keuangan tercatat dalam laporan ESG. • Regulasi yang mengatur pengungkapan terkait ESG dalam laporan tahunan diperbarui untuk mewajibkan data yang lebih spesifik dan kuantitatif. • Taiwan Stock Exchange meluncurkan platform pengungkapan ESG yang baru bagi perusahaan tercatat untuk menyampaikan pengungkapannya dan bagi investor dan para pihak yang berkepentingan lainnya untuk mengakses informasi ESG pada tingkat perusahaan atau industri.	• *Corporate Governance 3.0 – Sustainable Development Roadmap*, untuk laporan yang diterbitkan pada 2023 untuk tahun 2022, batasan pelaporan ESG diturunkan dari modal saham minimal NT$5 miliar menjadi NT$2 miliar. *Assurance* pihak ketiga juga wajib untuk industri tertentu. • Selain ketentuan pelaporan ESG yang ada, pencakupan pengungkapan ESG dengan mengacu pada TCFD dan SASB juga telah ditambahkan sejak 2023. • Bank dan industri asuransi wajib mengungkapkan informasi keuangan terkait iklim sejak 2023. • Financial Supervisory Commission meluncurkan rencana bertahap yang mewajibkan perusahaan tercatat dan OTC serta anak perusahaannya untuk melengkapi inventarisasi Gas Rumah Kaca (GHG) sebelum 2027 dan memperoleh verifikasi sebelum 2029. • Pada Maret 2023, Financial Supervisory Commission mengumumkan Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan (2023-2025).
Thailand	• Pedoman Tata Kelola Perusahaan SEC Thailand mewajibkan pelaporan keberlanjutan dengan beberapa pilihan kerangka kerja, tetapi GRI yang umum setelah pedoman SET. • Pada 2022, semua perusahaan publik wajib melaporkan kinerja ESG melalui Form 56-1 One Report (efektif sejak periode keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021). Penyampaian harus dilakukan dalam waktu tiga bulan sejak akhir laporan keuangan.	• Pada 17 November 2021, SET mengumumkan dukungannya terhadap TCFD. • SET telah memberikan pengetahuan tentang dampak perubahan iklim terhadap bisnis dengan mengadakan serangkaian lokakarya TCFD dan SDGs yang bertujuan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang cara menghadapi risiko dan peluang ekonomi yang timbul dari perubahan iklim dan meningkatkan standar sejalan dengan praktik-praktik terbaik internasional TCFD terkait pengungkapan iklim.
Vietnam	• Kementerian Keuangan Vietnam mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan dampak sosial dan lingkungan serta tata kelolanya secara publik dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri (informasi tertentu tidak wajib bagi lembaga keuangan). • Perusahaan publik didorong untuk menerapkan standar pelaporan dan pengungkapan yang diterima secara global dalam menyusun laporan keberlanjutannya.	• Dalam Surat Keputusan 06/2022/ND-CP, perusahaan telah membuat *roadmap* untuk membangun pasar karbon nasional dan telah memberikan kerangka kerja untuk pelaporan emisi GHG untuk membangun basis data inventarisasi GHG.

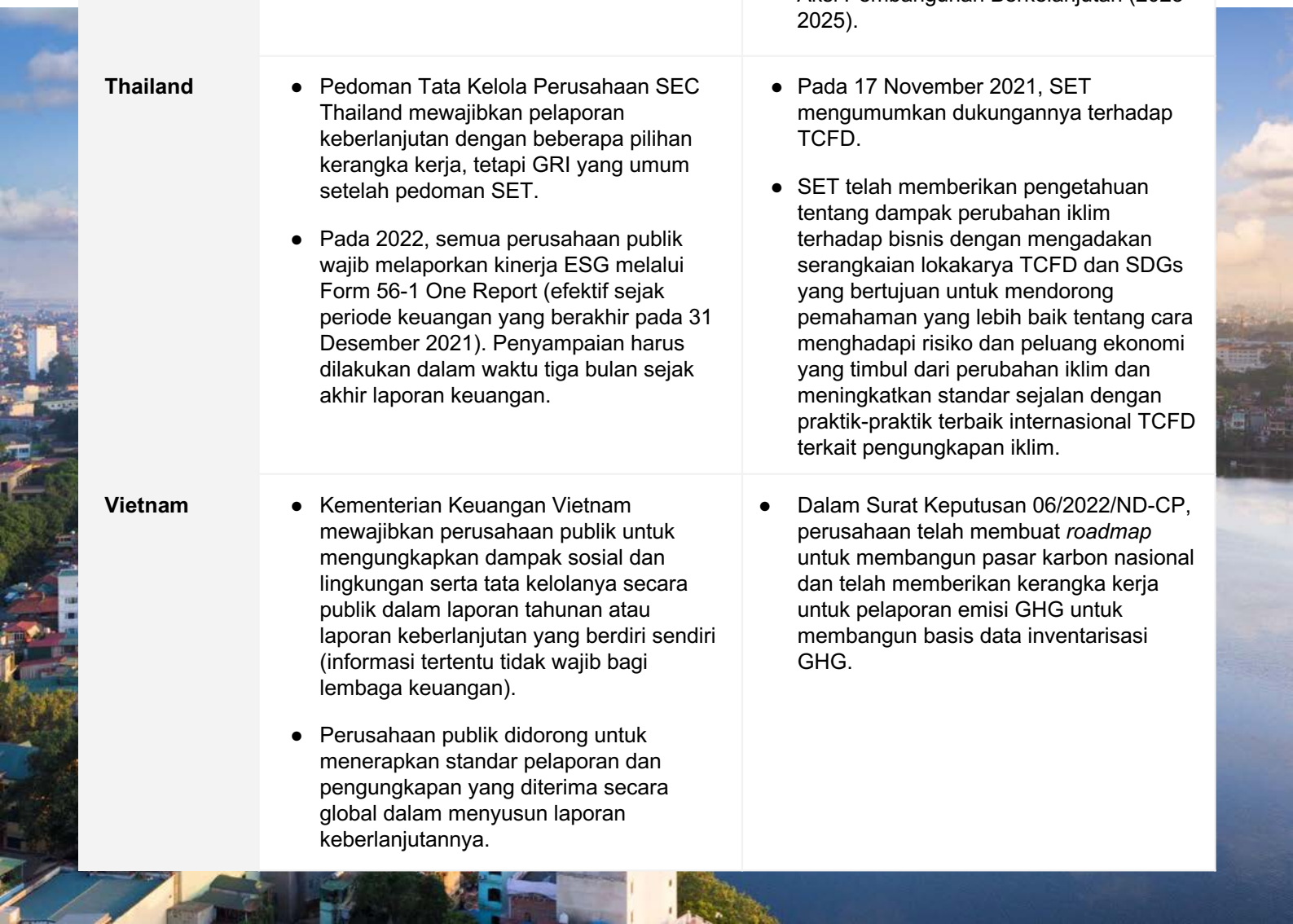

Glosarium istilah penting, akronim, dan singkatan

Singkatan	Definisi
ACRA	Accounting and Corporate Regulatory Authority
AI	*Artificial intelligence* / Kecerdasan buatan
APRA	Australian Prudential Regulation Authority
ASIC	Australian Securities & Investments Commission
ASX	Australian Securities Exchange
BM	Bursa Malaysia
BNM	Bank Negara Malaysia
BOD	*Board of Directors* / Direksi
BRSR	*Business Responsibility and Sustainability Report* / Laporan Tanggung Jawab dan Keberlanjutan Bisnis
BSE	Bombay Stock Exchange
BSP	Bangko Sentra ng Pilipinas
CCPT	*Climate Change and Principle based Taxonomy* / Taksonomi Berbasis Perubahan Iklim dan Prinsip
CDL	City Developments Limited
CDSB	Climate Disclosure Standards Board
CGS	Centre for Governance and Sustainability
COP	Conference of the Parties
COP15	United Nations Biodiversity Conference, the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity
COP26	The 26th meeting of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, held in Glasgow
COP27	The 27th meeting of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, held in Egypt
CRMSA	*Climate Risk Management and Scenario Analysis* / Analisis Manajemen Risiko dan Skenario Iklim
CSRC	China Securities Regulatory Commission
CSRD	*Corporate Sustainability Reporting Directive* / Pedoman Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan
DWG	*Disclosure Working Group* / Kelompok Kerja Pengungkapan
EC	European Commission / Komisi Eropa
ED	*Exposure draft*
EFRAG	European Financial Reporting Advisory Group
EPA	Environmental Protection Agency
ESG	Lingkungan, sosial, dan tata kelola / *Environmental, social and governance*
ESRS	European Sustainability Reporting Standards
EU	*European Union* / Uni Eropa
FASF	Financial Accounting Standards Foundation
FCA	Financial Conduct Authority
FI	Financial Institution / *Lembaga keuangan*
FRC	Financial Reporting Council
FSA	Financial Services Agency / Lembaga Jasa Keuangan
FY	Fiscal year / *Tahun buku*
GFIT	Green Finance Industry Taskforce
GHG	Greenhouse Gas / *Gas rumah kaca*
GRI	Global Reporting Initiative
HKEX	Hong Kong Stock Exchange
HOSE	Ho Chi Minh Stock Exchange

Glosarium istilah penting, akronim, dan singkatan

Singkatan	Definisi
IDX	Indonesia Stock Exchange / Bursa Efek Indonesia
IFAC	International Federation of Accountants
IFRS	International Financial Reporting Standards
IFRS S1	IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information
IFRS S2	IFRS S2 Climate-related Disclosures
IR	Integrated Reporting
ISO	International Organization for Standardization
ISSB	International Sustainability Standards Board
JC3	Joint Committee on Climate Change
KOSPI	Korea Composite Stock Price Index
KPI	Key performance indicator
KRX	Korea Stock Exchange
MAS	Monetary Authority of Singapore
MOF	Ministry of Finance
NFRD	Non-Financial Reporting Directive
NUS	National University of Singapore
NZSX	New Zealand Stock Exchange
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OTC	*Over the counter*
PIE	*Public Interest Entities*
PLC	Publicly listed company / *Perusahaan terbuka*
PSE	The Philippine Stock Exchange
RBI	The Reserve Bank of India
SASAC	State-Owned Assets Supervision and Administration Commission
SASB	Sustainability Accounting Standards Board
SBTi	Science Based Targets initiative
SC	Securities Commission Malaysia
SDG	Sustainable Development Goal
SEBI	Securities and Exchange Board of India
SEC	Securities and Exchange Commission
SET	Stock Exchange of Thailand
SFC	Securities and Futures Commission
SGX	Singapore Exchange
SME	Small and medium-sized enterprise
SSBJ	Sustainability Standards Board of Japan
SSE	Shanghai Stock Exchange
SZSE	Shenzhen Stock Exchange
TCFD	Task Force on Climate-related Financial Disclosures
TNFD	Task Force on Nature-related Financial Disclosures
TSE	Tokyo Stock Exchange
TWSE	Taiwan Stock Exchange
US SEC	United States Securities and Exchange Commission
VRF	Value Reporting Foundation
XRB	External Reporting Board

Publikasi thought leadership terkait keberlanjutan PwC

01 [Managing nature risks: From understanding to action]

04 [Green taxes and incentives can help businesses achieve ESG goals]

02 [Accelerating Business Action on Climate Change Adaptation]

05 [When the going gets tough, can Asia Pacific CEOs get ESG going?]

03 [PwC's Global Investor Survey 2022 - The ESG execution gap: What investors think of companies' sustainability efforts]

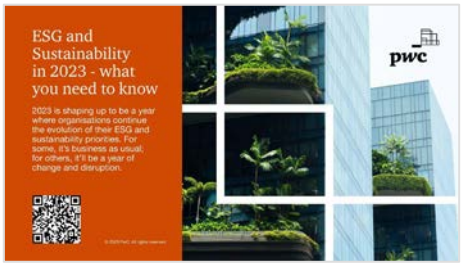

06 [ESG and Sustainability in 2023 - what you need to know]

Tentang PwC

Dengan kantor di 152 negara dan lebih dari 328,000 personel, kami merupakan salah satu jaringan jasa profesional terkemuka di dunia. Kami membantu organisasi dan individu menciptakan nilai yang mereka cari, dengan memberikan jasa *Assurance*, Pajak, dan *Advisory* yang berkualitas.

Kami adalah komunitas pemecah masalah yang menggabungkan kecerdasan manusia, pengalaman, dan inovasi teknologi untuk memberikan hasil yang berkelanjutan dan membangun kepercayaan. Semua itu berkontribusi dalam The New Equation.

Tentang Centre for Governance and Sustainability, NUS Business School

Centre for Governance and Sustainability (CGS) didirikan oleh National University of Singapore (NUS) Business School pada 2010. Lembaga ini bertujuan untuk memelopori penelitian yang relevan dan berdampak besar tentang isu-isu tata kelola perusahaan dan keberlanjutan perusahaan yang berkaitan dengan institusi, badan pemerintah, dan bisnis di Singapura dan Asia Pasifik. Memelopori *thought leadership*, CGS menyelenggarakan kuliah umum, *roundtable* industri, dan konferensi akademik tentang topik-topik terkait tata kelola dan keberlanjutan. CGS adalah asesor nasional untuk kinerja keberlanjutan perusahaan dan tata kelola perusahaan bagi perusahaan tercatat di Singapura. Seiring dengan meningkatnya tuntutan dari konsumen dan investor bahwa imbal hasil keuangan harus dicapai dengan integritas, dilatarbelakangi pertimbangan lingkungan dan sosial, CGS memiliki banyak penelitian yang berfokus pada pelaporan keberlanjutan di Asia Pasifik, perbankan berkelanjutan, pelaporan alam, dan pelaporan iklim di ASEAN. Informasi lebih lanjut mengenai CGS dapat diakses di https://bschool.nus.edu.sg/cgs/.

Selama lebih dari 50 tahun, NUS Business School menawarkan pendidikan bisnis yang intensif, relevan, dan bermanfaat bagi mahasiswa berprestasi dari seluruh dunia. Didirikan pada tahun yang sama dengan kemerdekaan Singapura, NUS Business School kini merupakan salah satu sekolah bisnis terkemuka di dunia. Ciri khas kami adalah menawarkan pengetahuan bisnis global terbaik dengan wawasan Asia yang mendalam, mempersiapkan mahasiswa untuk memimpin bisnis di Asia untuk mencapai keberhasilan internasional dan membantu bisnis global agar berhasil di Asia. Sekolah ini menarik beragam mahasiswa yang cerdas dan bertalenta ke dalam portofolio program akademik kami yang luas, termasuk program BBA, MBA, Executive MBA, MSc, dan PhD, selain kursus Executive Education kami yang disesuaikan dan terbuka untuk pendaftaran. Penerimaan NUS Business School sangat kompetitif, dan kami bangga dengan kualitas unggul mahasiswa kami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi https://bschool.nus.edu.sg/.

Kontak

Penulis utama

Fang Eu-Lin
Partner, Sustainability and Climate Change Practice Leader
Asia Pacific Centre for Sustainability Excellence Lead
PwC Singapore
eu-lin.fang@pwc.com

Professor Lawrence Loh
Director, Centre for Governance and Sustainability (CGS)
NUS Business School
National University of Singapore
bizlohyk@nus.edu.sg

Penulis dan Tim Proyek Riset CGS

Lim Lay Hsiah
Senior Manager, Assurance
PwC Singapore
lay.hsiah.lim@pwc.com

Indrie Tjahjadi
Senior Manager, Assurance
PwC Singapore
indrie.m.tjahjadi@pwc.com

Huang Minjun
Research Associate
CGS, NUS Business School
National University of Singapore
h.minjun@nus.edu.sg

Soon Wan Yi, Sabrina
Research Associate
CGS, NUS Business School
National University of Singapore
sabrina.soon@nus.edu.sg

Verity Thoi
Business Development Lead
CGS, NUS Business School
National University of Singapore
verity.thoi@nus.edu.sg

Pemimpin ESG

Ivy Kuo
PwC Asia Pacific ESG Leader
ivy.ws.kuo@cn.pwc.com

Jon Chadwick
Partner, Sustainability Leader
PwC Australia
jon.d.chadwick@pwc.com

Amy Cai
Partner, ESG Managing Partner
PwC China
amy.cai@cn.pwc.com

Sambitosh Mohapatra
Partner, ESG Leader
PwC India
sambitosh.mohapatra@pwc.com

Yuliana Sudjonno
Partner, ESG Leader
PwC Indonesia
yuliana.sudjonno@pwc.com

Julian Smith
Partner
PwC Indonesia
smith.julian@pwc.com

Toshiya Banno
Partner, Sustainability Centre of Excellence Executive Lead
PwC Japan
toshiya.banno@pwc.com

Yuki Isogai
Partner, Sustainability Centre of Excellence Lead
PwC Japan
yuki.isogai@pwc.com

Andrew Chan
Partner, Sustainability & Climate Change Leader
PwC Malaysia
andrew.wk.chan@pwc.com

Annabell Chartres
Partner, Sustainability & Climate Change Leader
PwC New Zealand
annabell.l.chartres@pwc.com

Alexander Cabrera
Partner, ESG Leader
PwC Philippines
alex.cabrera@pwc.com

Fang Eu-Lin
Partner, Sustainability & Climate Change Practice Leader
Asia Pacific Centre for Sustainability Excellence Lead
PwC Singapore
eu-lin.fang@pwc.com

Parul Munshi
Partner, Sustainability Leader, South East Asia Consulting
parul.v.munshi@pwc.com

Steven Kang
Partner, ESG Platform Leader
Samil PricewaterhouseCoopers, South Korea
steven.c.kang@pwc.com

Eliza Li
Leader of Sustainability and Climate Change Services
PwC Taiwan
eliza.li@pwc.com

Kulawal Supesuntorn
ESG Leader
PwC Thailand
kulawal.supesuntorn@pwc.com

Chris Suradejvibul
Partner, Sustainability and Climate Change
PwC Thailand
chris.suradejvibul@pwc.com

Dinh Thi Quynh Van
Partner, ESG Leader
PwC Vietnam
dinh.thi.quynh.van@pwc.com

Nguyen Hoang Nam
Partner, ESG Leader
PwC Vietnam
nguyen.hoang.nam@pwc.com

Konten Bagian 2, 3, dan Lampiran dalam laporan ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia hingga Mei 2023. Konten studi yang dilakukan dalam Bagian 4 dibuat berdasarkan laporan keberlanjutan dan laporan tahunan terbaru yang tersedia hingga Januari 2023.

Publikasi ini disusun sebagai pedoman umum hanya untuk hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan, dan bukan merupakan saran profesional. Anda diharapkan untuk tidak bertindak berdasarkan informasi di dalam publikasi ini tanpa mendapatkan saran profesional spesifik. Tidak ada pernyataan atau jaminan (secara tersurat atau tersirat) yang diberikan sehubungan dengan ketepatan atau kelengkapan informasi yang dimuat dalam publikasi ini, dan sepanjang diizinkan oleh hukum, PwC Indonesia, para anggota, karyawan, dan agennya tidak menerima atau menanggung beban, tanggung jawab atau kewajiban kehati-hatian apa pun atas setiap akibat yang ditimbulkan dari keputusan Anda atau pihak lain untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan yang didasarkan atas informasi yang dimuat dalam publikasi ini atau atas keputusan apa pun yang diambil berdasarkan publikasi ini.

Dokumen, atau informasi yang diperoleh dari PwC, tidak boleh disediakan atau disalin, secara keseluruhan atau sebagian, untuk orang-orang/pihak-pihak lain tanpa izin tertulis terlebih dahulu yang, menurut kebijaksanaan kami, dapat kami berikan, kami tolak atau berikan dengan persyaratan tertentu (termasuk persyaratan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atau tidak adanya tanggung jawab hukum).

PwC Indonesia meliputi KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT Prima Wahana Caraka, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia, dan PwC Legal Indonesia, masingmasing merupakan badan hukum yang terpisah dan semuanya merupakan firma anggota jaringan global PwC, yang secara bersama-sama disebut sebagai PwC Indonesia.

© 2023 PwC. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. PwC mengacu pada jaringan PwC dan/atau salah satu firma anggotanya, yang masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah. Untuk perincian lebih lanjut, kunjungi: http://www.pwc.com/structure.